

**TRANSPARANSI PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN  
DAN NON KEUANGAN DENGAN *INTERNET FINANCIAL  
REPORTING* BERBASIS *WEBSITE* PADA PEMERINTAH  
DESA DI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**'IZZUDDIN ARRIDLO**

**NIM : 13520059**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**TRANSPARANSI PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN  
DAN NON KEUANGAN DENGAN *INTERNET FINANCIAL  
REPORTING* BERBASIS *WEBSITE* PADA PEMERINTAH  
DESA DI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)



Oleh

**'IZZUDDIN ARRIDLO**

**NIM : 13520059**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

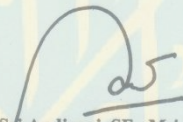
**TRANSPARANSI PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN  
DAN NON KEUANGAN DENGAN *INTERNET FINANCIAL  
REPORTING* BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH  
DESA DI JAWA TIMUR**

Oleh

**'IZZUDDIN ARRIDLO**  
NIM : 13520059

Telah disetujui pada tanggal 11 Desember 2017

Dosen Pembimbing,

  
Sri Andirani, SE., Msi  
NIP/19750313 200912 2 001

Mengetahui :  
Ketua Jurusan,

  
  
Hji. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP: 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

TRANSPARANSI PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN DAN NON  
KEUANGAN DENGAN *INTERNET FINANCIAL REPORTING* BERBASIS  
*WEBSITE* PADA PEMERINTAH DESA DI JAWA TIMUR

SKRIPSI

Oleh

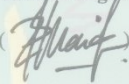
'IZZUDDIN ARRIDLO  
NIM : 135200059

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji dan Dinyatakan  
Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada 3 Januari 2018

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua  
Zuraidah,SE.,MSA  
NIP 19761210 200912 2 001

Tanda Tangan

: (  )

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris  
Sri Andriani,SE.,M.Si  
NIP 19750313 200912 2 001

: (  )

3. Penguji Utama  
Nawirah,SE.,MSA.,Ak.,CA

: (  )

Disahkan Oleh:  
Ketua Jurusan,



H. Ruzi Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 'Izzuddin Arridlo  
NIM : 13520043  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: TRANSPARANSI PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN DENGAN *INTERNET FINANCIAL REPORT* BERBASIS *WEBSITE* PADA PEMERINTAH DESA DI JAWA TIMUR adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 11 Desember 2017  
Hormat saya,



'Izzuddin Arridlo  
NIM: 13520059

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**ALHAMDULILLAH PUJI SYUKUR, PENULIS PANJATKAN KEPADA ALLAH SWT KARENA ATAS SEGALA NIKMAT-NYA KARYA INI DAPAT SELESAI. SHALAWAT SERTA SALAM PENULIS HATURKAN KEPADA NABI MUHAMMAD SAW ATAS PETUNJUK DAN KETAULADANNYA.**

**DENGAN PENUH RASA SUKA CITA, KARYA SEDERHANA INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK:**

**BAPAK DAN IBU (SUCIPTO DAN NURUL AISYAH) SERTA KELUARGA BESAR KAKEK ALM. SUYUTI DAN KAKEK PRAMONO YANG SENANTIASA MENYAYANGI, MEMBERIKAN NASIHAT DAN SELALU MENDOAKAN. TERIMAKASIH ATAS SEGALANYA.**

**PARA GURU-GURU YANG TELAH MEMBERIKAN ILMU YANG TAK TERUKUR NILAINYA, SEMOGA KELAK ILMU INI DAPAT BERMANFAAT.**

**UNTUK TEMAN-TEMAN ANDRIAN, ZIKA, FAUZAN, DEDI, ALFIAN, PUTRA, KHASANAH, FUFAH YANG TELAH MENGISI HARI-HARI PENULIS SELAMA DI MALANG.**

**DEMIKIAN SEDIKIT PERSEMBAHAN YANG DAPAT PENULIS SAJIKAN, SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERI KEBERKAHAN DAN KEBAHAGIAAN DALAM HIDUP.  
AMIN....**

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ فِي عَمَلِهِ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ

Dari Abu Hurairah rodhiallohu ‘anhu, Nabi sholallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa melepaskan seorang mukmin dari kesusahan hidup di dunia, niscaya Allah akan melepaskan darinya kesusahan di hari kiamat, barang siapa memudahkan urusan (mukmin) yang sulit niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba, selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca Kitabulloh dan mempelajarinya bersama-sama, melainkan akan turun kepada mereka ketenteraman, rahmat Allah akan menyelimuti mereka, dan Allah memuji mereka di hadapan (para malaikat) yang berada di sisi-Nya. Barang siapa amalnya lambat, maka tidak akan disempurnakan oleh kemuliaan nasabnya.”

(HADITS RIWAYAT MUSLIM)

**“BERI NILAI DARI USAHANYA JANGAN DARI HASILNYA. BARU KITA BISA MENGETI KEHIDUPAN  
(ALBERT EINSTEIN)**

**“KITA BOLEH SAJA KECEWA DENGAN APA YAG TELAH TERJADI, TETAPI JANGAN PERNAH KEHILANGAN HARAPAN UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK  
(BAMBANG PAMUNGKAS)**

**“INDONESIA INI BUTUH PEMUDA PENCARI SOLUSI BUKAN PEMUDA PEMAKI-MAKI”  
(RIDWAN KAMIL)**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Transparansi Pelaporan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Dengan *Internet Financial Report* Berbasis *Website* Pada Pemerintah Desa di Jawa Timur.”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- 1 Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2 Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3 Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4 Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan memberikan waktunya untuk membimbing dan memotivasi dalam penyusunan skripsi.
- 5 Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 6 Bapak, Ibu, Keluarga Besar Alm. Kakek Suyuti dan Kakek Pramono yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan material.
- 7 Keluarga Besar Akuntansi 2013, UNIOR, PMII RAYON EKONOMI Moch. HATTA, ANGGOTA MUDA IAI KOMISARIAT MALANG RAYA, yang selalu mengisi hari-hari penulis.
- 8 Serta seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari adanya ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya, penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Malang, 11 Desember 2017

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab).....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.3.2.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.3.2.2 Manfaat Praktis.....	9
1.4 Batasan Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahlu.....	10
2.2 Laporan Keuangan.....	16
2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan .....	16
2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan .....	16
2.2.3 Komponen Laporan Keuangan Desa.....	17
2.3 Transparansi .....	18
2.3.1 Pengertian Transparansi.....	18

2.3.2	Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa.....	19
2.4	Teori Keagenan .....	20
2.5	Konsep Dasar Sistem Informasi .....	22
2.5.1	Pengertian Sistem Informasi .....	22
2.5.2	Komponen-Komponen Sistem Informasi.....	23
2.5.3	Prinsip-Prinsip Sistem Informasi.....	24
2.6	Sistem Informasi Keuangan Daerah.....	25
2.7	Peran Internet Dalam Mengkomunikasikan Informasi Keuangan.....	28
2.8	Dampak Internet Terhadap Pelaporan Keuangan .....	28
2.9	Analisis Pelaporan Keuangan di Internet.....	30
2.10	Manfaat Internet Untuk Masyarakat .....	35
2.11	<i>Internet Financial Reporting</i> .....	37
2.12	Manfaat <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR).....	41
2.13	Keunggulan <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR).....	41
2.14	Perspektif Islam.....	42
2.14.1	Tujuan Adanya Sistem Informasi Berdasarkan Perspektif Islam .....	42
2.14.2	Peranan sistem Informasi dalam Perspektif Islam....	43
2.14.3	Dalil dalam Al-Qur'an.....	47
2.15	Kerangka Berfikir.....	48

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49
3.2	Obyek Penelitian .....	50
3.3	Sumber dan Jenis Data .....	51
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.5	Model Analisis Data.....	53
3.5.1	Ketersediaan dan Penggunaan <i>Website</i> .....	53
3.5.2	Penggunaan <i>Website</i> untuk Mengkomunikasikan Informasi Keuangan dan Informasi-informasi dari Pemerintahan Desa.....	53
3.5.3	Analisis ketepatan waktu informasi tambahan (berita).....	54
3.5.4	Analisis teknologi dan Analisis fitur dukungan pengguna <i>website</i> .....	54

### **BAB IV PEMBAHASAN**

4.1	Gambaran Umum Jawa Timur .....	56
4.1.1	Kabupaten Lamongan .....	57
4.1.2	Kabupaten Bojonegoro .....	64
4.1.3	Kabupaten Malang .....	67
4.2	Contoh Desa Pengguna Website .....	
4.2.1	Desa Kemamang Kabupaten Bojonegoro.....	67
4.2.2	Desa Pucangro Kabupaten Lamongan.....	69
4.2.3	Desa Purwoharjo Kabupaten Malang .....	70

4.3	Analisi Data dan Pembahasan.....	72
4.3.1	Deskripsi Data.....	72
4.3.2	Analisi Data .....	74
4.3.2.1	Ketersediaan dan Penggunaan <i>Website</i> .....	74
4.3.2.2	Ketersediaan Laporan Keuangan.....	96
4.3.2.3	Ketersediaan Laporan Keuangan Tambahan .....	101
4.3.2.4	Manfaat Fitur-Fitur Teknologi <i>Website</i> dan Tampilan <i>Website</i> Dalam Penyampaian Informasi .....	107
4.3.2.5	Ketersediaan Informasi Tambahan (Berita).....	116
4.3.3	Pembahasan .....	123
4.3.3.1	Ketersediaan dan Penggunaan <i>Website</i> .....	123
4.3.3.2	Ketersediaan Laporan Keuangan.....	123
4.3.3.3	Ketersediaan Laporan Keuangan Tambahan .....	123
4.3.3.4	Ketersediaan Informasi Tambahan (Berita).....	124
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan .....	126
5.2	Saran.....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>129</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahlu .....	10
Tabel 3.1 Dana ADD.....	50
Tabel 4.1 3 Kabupaten Penerima Dana ADD Terbesar di Jawa Timur .....	72
Tabel 4.2 Daftar Nama-nama desa kabupaten lamongan.....	75
Tabel 4.3 Ringkasan Tabel 4.2.....	82
Tabel 4.4 Daftar Nama-nama Desa Kabupaten Bojonegoro.....	83
Tabel 4.5 Ringkasan Tabel 4.4.....	89
Tabel 4.6 Daftar Nama-nama Desa Kabupaten Malang .....	90
Tabel 4.7 Ringkasan Tabel 4.6.....	95
Tabel 4.8 Laporan Keuangan Desa Kabupaten Lamongan.....	96
Tabel 4.9 Laporan Keuangan Desa Kabupaten Bojonegoro .....	97
Tabel 4.10 Laporan Keuangan Desa Kabupaten Malang.....	99
Tabel 4.11 Laporan Keuangan Tamabaha Desa Kabupaten Lamongan .....	102
Tabel 4.12 Laporan Keuangan Tamabaha Desa Kabupaten Bojonegoro .....	103
Tabel 4.13 Laporan Keuangan Tamabaha Desa Kabupaten Malang .....	105
Tabel 4.14 Teknologi dan Fitur-Fitur <i>Website</i> Kabupaten Lamongan .....	107
Tabel 4.15 Teknologi dan Fitur-Fitur Website Kabupaten Bojonegoro .....	110
Tabel 4.16 Teknologi dan Fitur-Fitur Website Kabupaten Malang.....	113
Tabel 4.17 Berita Tambahan Kabupaten Lamongan.....	116
Tabel 4.18 Berita Tambahan Kabupaten Bojonegoro.....	118
Tabel 4.19 Berita Tambahan Kabupaten Malang .....	121

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	49
Gambar 4.1 <i>Website</i> Desa Kemamang .....	68
Gambar 4.2 <i>Website</i> Desa Pucangro .....	70
Gambar 4.3 <i>Website</i> Desa Purwoharjo .....	72
Gambar 4.4 Desa Pemakai <i>Website</i> di Lamongan .....	83
Gambar 4.5 Desa Pemakai <i>Website</i> di Bojonegoro .....	89
Gambar 4.6 Desa Pemakai <i>Website</i> di malang .....	96
Gambar 4.7 Ketersediaan Fitur-Fitur Teknologi <i>Website</i> Pemerintah Desa Kabupaten Lamongan .....	109
Gambar 4.8 Ketersediaan Fitur-Fitur Teknologi <i>Website</i> Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro .....	112
Gambar 4.9 Ketersediaan Fitur-Fitur Teknologi <i>Website</i> Pemerintah Desa Kabupaten Malang .....	115
Gambar 4.10 Ketersediaan Informasi Tambahan (Berita) Kabupaten Lamongan .....	118
Gambar 4.11 Ketersediaan Informasi Tambahan (Berita) Kabupaten Bojonegoro .....	120
Gambar 4.12 Ketersediaan Informasi Tambahan (Berita) Kabupaten Malang...	123

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bukti Konsultasi
Lampiran 2	Biodata Peneliti
Lampiran 3	Alamat <i>Website</i> Desa



## ABSTRAK

Izzuddin Arridlo. 2017, SKRIPSI. Judul: “ Tranparansi Pelaporan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Dengan *Internet Financial Reporting* Berbasis *Website* Pada Lembaga Pemerintah Desa Di Jawa Timur “

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Kata Kunci : *Website*, Pelaporan Keuangan

---

---

Perkembangan terbesar di bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah internet. Dengan internet desa dapat memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi positif tentang pembangunan desa kepada masyarakat ataupun pihak-pihak lain yang ingin mengetahui tentang pembangunan desa, dalam penyebaran informasi keuangan maupun non keuangan desa. Melalui *website*, desa dapat menyajikan informasi seperti pelaporan keuangan desa secara lebih *update*. Pelaporan keuangan yang terdiri dari informasi yang bersifat keuangan dan non keuangan merupakan sumber informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ataupun pihak lain yang berkepentingan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif tujuannya adalah untuk mengetahui pelaporan informasi keuangan dan non keuangan berbasis *website* pada lembaga pemerintah desa. Obyek penelitian pada lembaga pemerintah desa yang ada di Jawa Timur namun hanya terbatas pada desa yang ada di 3 kabupaten yang menerima ADD (Alokasi Dana Desa) terbesar di Jawa Timur. Data dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi. Analisa datanya melalui 5 tahap: Ketersediaan *Website*, laporan keuangan, informasi berita, manfaat teknologi *website* dan perspektif keislaman.

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa sebagian besar pada lembaga pemerintah desa tidak memiliki *website* sehingga banyak lembaga pemerintah desa yang tidak memberikan informasi keuangan maupun informasi non keuangan. Didapatkan 139 lembaga pemerintah desa yang memiliki *website* dari 1.235 data lembaga pemerintah desa yang dijadikan obyek penelitian dengan rincian sebagai berikut: Kabupaten Lamongan 31 (6,709%), Kabupaten Bojonegoro 64 (16,202%), Kabupaten Malang 44 (11,640%). Seharusnya pemerintah desa lebih menekankan keterbukaan informasi agar bisa menghindari terjadinya kesalah pahaman antara masyarakat dengan pemerintah dengan yang telah menggunakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat.

## ABSTRACT

'Izzuddin Arridlo. 2017, THESIS. Title: " Transparency Financial and Non Financial Reporting Information With *Internet Financial Reporting* Based *Websites* at Village Government Institutions In East Java "

Counselor : Sri Andriani, SE., M. Si

Keywords : *Website*, Financial Reporting

---

The biggest development in the field of information and communication technology is the *internet*. With the internet, village can be utilized to spread the village's positive information about village development to the community or other parts who want to know about village development, in the dissemination of financial and non-financial information. Through the *website*, villages can present information such as village finance reporting in more *updates*. Financial reporting consisting of financial and non financial information is a source of information that is needed by the community or other interested parts.

This research uses a descriptive qualitative approach that has the aim to know the reporting of financial and non-financial information based on *website* at village government institution. The researcher 's object in the village government institution is in East Java but only limited to the village in the 3 districts that receive the largest ADD (Village Fund Allocation) in East Java. Data was collected by observation and documentation. Analysis of the data through 5stages: *Website* availability, financial report, news information, the benefits of *website* technology, and Islamic perspective.

From this research, it can be seen that most of the village government institutions do not have *website*. So, many village government institutions do not provide financial or non-financial information. There were 139 village government institutions which have *website* of 1,235 data from village government institutions used as research objects with details as follows: Lamongan 31 ( 6.709% ), Bojonegoro 64 ( 16.202% ), Malang Regency 44 (11,640% ). Village government should emphasize the disclosure of information in order to avoid misunderstandings between the community and the government that has used the budget given by the central government.

## مستخلص البحث

عزالدين، الرضى. ٢٠١٧. البحث الجامعي. الموضوع: شفافية تقرير المعلومات النقودية و غير النقودية بالشبكة النقودية التقريرية على أساس المواقع في مؤسسة الحكومة القرية بجاوى الشرقية.

المشرفة: سري أندرياني الماجستير.

كلمات أساسية: المواقع ، تقرير النقودية

أكبر تنمية في مجال التكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الشبكة الدولية. بالشبكة الدولية الشركة تستطيع القرية لانتشار المعلومة الايجابية عن تنمية القرية إلى المجتمع أو جهة الأخرى الذي يريد أن يعرف تنمية القرية، في انتشار المعلومة النقودية و غير النقودية للقرية. بالوصيلة الشبكة الدولية، القرية تعرض المعلومة كتقرير النقودية بالتحديثات. تقرير النقودية تنقسم إلى قسمين يعني المعلومة النقودية و المعلومة غير النقودية يعني مصدر المعلومة التي تحتاج المجتمع أو جهة الأخرى المهتم. هذا البحث يستخدم مدخل الكيفي الوصفي ليعرف تقرير المعلومة النقودية والمعلومة غير النقودية بالوصيلة الشبكة الدولية في مؤسسة الحكومة القرية. أغراض من هذا البحث بمؤسسة الحكومة القرية تقع في جاوى الشرقية لكن محدود بالقرية في ثلاث المناطق التي تستقبل أكبر منحة القرية (ADD) في جاوى الشرقية. جمع البيانات بالطريقة ملاحظة وتوثيقة. وتحليل البيانات بالطريقة خمسة الخطوات: توفر المواقع، تقرير النقودية، معلومة الاختبار، إفادة التكنولوجيا الواقعية ومنظور الإسلامية.

من هذا البحث يجد أن معظم مؤسسة الحكومة القرية لا تملك المواقع، إذان كثير من مؤسسة الحكومة القرية التي لا تعطي المعلومات النقودية و المعلومات غير النقودية. هناك ١٣٩ مؤسسة الحكومة القرية من ١٢٣٥ البيانات التي تستخدم البحث لا تملك المواقع، بالتفاصيل كمايلي: منطقة لامنجان ٣١ (٦، ٧٠.٩%)، منطقة بوجونغارا ٦٤ (١٦، ٢٠.٢%)، منطقة مالانج ٤٤ (١١، ٦٤.٠%). يجب على مؤسسة الحكومة القرية للشفافية المعلومات لكي ابتعاد سوء الفهم بين المجتمع و مؤسسة الحكومة التي تستخدم الميزانية من الحكومة الاتحادي.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelaporan keuangan adalah segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum atau *Generally Accepted Accounting Principles/ GAAP*). Selanjutnya pelaporan keuangan untuk pemerintah telah diatur dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2003 dimana undang-undang tersebut mengatur tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut mewajibkan untuk setiap pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar bisa dinilai kebenaran dan keandalan dari informasi terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan berjalannya kedua proses tersebut maka diharapkan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah dapat lebih dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan Pedoman Umum *Good Public Governance* (GPG), selain akuntabilitas, transparansi juga merupakan salah satu asas yang harus dipenuhi demi terwujudnya GPG.

Dengan demikian, salah satu langkah untuk mewujudkan GPG maka Pemda harus menyediakan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh para pihak yang berkepentingan, baik pemerintah pusat, masyarakat maupun pihak lain. Asas transparansi ini juga sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dimana salah satu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pemda sebagai badan publik adalah informasi mengenai laporan keuangan. Untuk mewujudkan pemerintahan baik yang baik GPG pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melakukan transparansi terhadap segala informasi yang ada pada pemerintah tersebut baik itu masalah transparansi keuangan maupun yang lainnya.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut akan menjadi dasar untuk pemerintah baik itu pemerintah pusat atau daerah untuk melakukan transparansi. Dengan dikeluarkannya UU tersebut transparansi informasi pemerintah mulai menjadi perhatian dimana UU tersebut menyebutkan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka, serta dapat diakses oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Suatu pemerintah daerah (pemda) yang transparan harus mampu menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan pengguna lainnya. Salah satu bentuk transparansi yang dapat dilakukan oleh pemda adalah dengan mempublikasikan laporan keuangan melalui internet. Publikasi laporan keuangan melalui internet merupakan salah satu bentuk pengungkapan secara sukarela (*voluntary disclosure*). Dengan memanfaatkan

perkembangan zaman dan teknologi informasi (TI) pemerintah akan semakin mudah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan.

Perkembangan teknologi informasi (TI) semakin hari semakin berkembang pesat sehingga mengakibatkan perubahan yang cukup signifikan. Banyak aspek seperti perusahaan, dan pemerintahan dari desa sampai kota saling belomba-lomba dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Salah satu hal yang dilakukan oleh perusahaan ataupun pemerintahan adalah mengubah sistem yang ada tersebut dari sistem manual menjadi sistem komputerisasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi "*internet*" perusahaan maupun pemerintah dapat melakukan transparansi informasi dengan sangat mudah dan juga dapat menghemat banyak biaya

Teknologi informasi "*Internet*" adalah sebuah jaringan komputer yang saling terhubung dengan menggunakan suatu sistem *standar global transmission control protocol/internet protocol suite* (TCP/IP) yang digunakan sebagai protokol pertukaran paket dalam melayani miliaran pengguna yang terdapat di seluruh dunia. Internet merupakan kependekan dari *interconnected network*. *Internet* juga dapat diartikan sebagai jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan atau milyaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi misalnya telepon, satelit, dan sebagainya. Dan internet adalah suatu media yang tepat yang dapat digunakan sebagai sarana mengakomodasi perubahan yang dibutuhkan oleh pemerintah desa.

“Menurut berita yang dilansir oleh situs “kompas.com” menyebutkan bahwa survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet. Survei yang dilakukan sepanjang tahun 2016 menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Adapun total dari penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang. Hal ini mengindikasikan kenaikan 51,8% dibandingkan pada tahun 2014 kemarin. Survei yang dilakukan oleh (APJII) pada tahun 2014 hanya ada 88 juta pengguna internet” (Yoga dan Rezka, 2016). Ini membuktikan bahwa media internet dapat diakses oleh semua kalangan baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan oleh orang tua dengan sangat mudah bahkan dengan alat yang paling sederhana yaitu *smarthphone*. Begitu banyak kemudahan yang ditawarkan oleh internet, terutama kemudahan dalam komunikasi, informasi, dan juga salah satu sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi keuangan yang ada pada pemerintah.

*Internet Financial Reporting (IFR)* merupakan suatu hal yang masih baru, *IFR* baru-baru ini mulai berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. ”Penyampaian informasi keuangan melalui internet (*Internet Financial Reporting* yang disingkat menjadi *IFR*) merupakan cara yang murah dan efektif (*cost effective*) bagi pemda untuk menyajikan informasi tentang pengelolaan keuangan (Styles dan Tennyson, 2007), namun pemanfaatannya oleh pemerintah daerah belum maksimal. Penelitian Muhammad (2012) menunjukkan bahwa *website* pemda belum digunakan secara optimal dalam mengembangkan pelaporan keuangan. Rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan pemda

terbukti lebih rendah daripada rata-rata indeks pengungkapan informasi non keuangan (Muhammad, 2012). Selain belum maksimalnya pemanfaatan *website* sebagai media pelaporan keuangan pemerintah, terdapat keberagaman dalam ketersediaan dan keteraksesan komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal tersebut disebabkan belum adanya regulasi yang menjadi standar dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di *internet*. Hal ini sangat menarik untuk diteliti, namun sejauh ini masih sedikit penelitian yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi dorongan pemerintah dalam mengungkapkan informasi keuangannya. Penelitian yang ada masih terbatas pada sektor privat” (Ikhlis Wau, Ratmono 2015).

*Website* merupakan salah satu komponen dari internet yang berisi kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar, gerak, dan suara atau gabungan semuanya yang membentuk suatu rangkaian yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan *link*. Melalui *website*, desa dapat menyajikan informasi terkait laporan keuangan desa secara lebih *update*. Pelaporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan dan non keuangan merupakan sumber informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi masyarakat desa setempat, selain itu pelaporan keuangan dan non keuangan tersebut dapat digunakan pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban untuk membuat desa semakin maju. Desa dapat mengungkapkan informasi apa pun dalam *website*.

Penelitian Andriani (2010) pada perusahaan LQ-45 yang ada di BEI Mayoritas perusahaan sampel (95,6%) dalam penelitian ini memiliki Web site tersendiri, perusahaan sampel yang memiliki *website* tidak mencantumkan kode efek perusahaan dalam *website* mereka dan mayoritas (86,05%) memanfaatkan homepage mereka untuk menginformasikan informasi keuangan terutama laporan keuangan pokok yaitu neraca dan laba rugi. Styles dan Tennyson (dalam Medina, 2012) menyatakan bahwa internet adalah media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang efektif bagi pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangannya secara *online*. Penggunaan internet membuat publikasi laporan keuangan menjadi lebih cepat dan mudah, sehingga dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun. Selanjutnya pada skripsi Prima (2014) yang berobjek pada transparansi keuangan pada lembaga keuangan syariah yang berbasis *website* mengungkapkan bahwa pada lembaga keuangan syariah sebagian besar masih belum mempunyai *website* sehingga banyak lembaga keuangan syariah tidak memberikan informasi keuangan maupun non keuangan.

Provinsi Jawa Timur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan disebutkan sebagai salah satu dari sebanyak 34 Provinsi di Indonesia. Di provinsi ini terdapat sebanyak 7.724 desa, 777 kelurahan, dan 664 kecamatan yang tersebar di 29 kabupaten dan 9 kota. Dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa Kabupaten Lamongan dengan jumlah desa sebanyak 462 desa, 12 kelurahan dan 27 kecamatan berada di Peringkat ke 1 atau merupakan Kabupaten Dengan Jumlah Desa Terbanyak di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. Diikuti pada Peringkat ke 2 yaitu

Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah desa sebanyak 419 desa, 11 kelurahan, dan 28 kecamatan. Pada Peringkat ke 3 yaitu Kabupaten Malang dengan jumlah desa sebanyak 378 desa, 12 kelurahan, dan 33 kecamatan. Kabupaten Kediri berada di Peringkat ke 4 dengan jumlah desa sebanyak 343 desa, 1 kelurahan, dan 26 kecamatan. Kabupaten Pasuruan berada di Peringkat 5 dengan jumlah desa sebanyak 341 desa, 24 kelurahan, dan 24 kecamatan. Sedangkan Kota Batu di Peringkat Ke 28 atau Terbawah merupakan satu-satunya Kota di Provinsi Jawa Timur yang terdapat desa yaitu sebanyak 19 desa, 5 kelurahan, dan 3 kecamatan.

Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa Desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, antara lain terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan Kepala Desa (Kades) serta proses pembangunan desa. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa atau ADD (berdasarkan PP No.72

tahun 2005), seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pencatatan akuntansi serta manajemen keuangannya sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Dari latar belakang teori dan kasus yang dijelaskan di atas peneliti akhirnya dapat mengambil judul tentang **“Transparansi Pelaporan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Dengan *Internet Financial Reporting* Berbasis *Website* Pada Pemerintah Desa Di Jawa Timur”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Transparansi Pelaporan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Dengan *Internet Financial Reporting* Berbasis *Website* Pada Pemerintah Desa Di Jawa Timur.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Transparansi Pelaporan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Dengan *Internet Financial Reporting* Berbasis *Website* Pada Pemerintah Desa Di Jawa Timur.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

#### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan referensi dan menambah wawasan tentang sejauh mana transparansi yang ada pada pemerintahan, dan mengetahui tentang pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah desa.

#### **2. Manfaat Praktis**

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang sejauh mana transparansi yang ada pada lembaga pemerintahan, dan mengetahui tentang pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah desa. Bagi masyarakat isi dari website pemerintah desa, sehingga dapat memberikan informasi lebih tentang desa tersebut.

### **1.4 Batasan Penelitian**

1. Laporan keuangan yang disajikan pada website pemerintah desa minimal selama 2 tahun atau 2 periode sebelumnya (2016, 2015).
2. 3 kabupaten penerima ADD ( Alokasi Dana Desa) terbesar di Jawa Timur dan desa yang sudah menggunakan website

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun), Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Andriani (2010) <i>Internet Sebagai Media Pelaporan Informasi Keuangan Pada Perusahaan Lq-45 Di Bei</i>	Ketersediaan dan penggunaan homepage, penggunaan homepage untuk mengkomunikasikan informasi keuangan, keberadaan informasi keuangan tambahan, keberadaan informasi masa lalu dan laporan interim, keberadaan informasi tambahan, fitur-fitur <i>internet</i>	Bahwa mayoritas (86,05%) perusahaan memanfaatkan homepage mereka untuk menginformasikan informasi keuangan terutama laporan keuangan pokok yaitu neraca dan laba rugi. Itu membuktikan bahwa di Indonesia belum secara optimal memanfaatkan <i>website</i> untuk mengungkapkan informasi
2	Medina, Febri (2012) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Indonesia	Pengaruh pendapatan per-kapita terhadap ketersediaan IKD pada situs resmi pemerintah, pengaruh rasio kemandirian pemerintah	Bahwa ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, dan kompleksitas berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah. Sedangkan pendapatan

**Lanjutan Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun), Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		terhadap ketersediaan IKD pada situs resmi pemerintah daerah, pengaruh ukuran ( <i>size</i> ) pemerintah daerah terhadap ketersediaan IKD pada situs resmi pemerintah	perkapita berpengaruh negatif terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah.
3	Andira Prima (2014) Pelaporan Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Dengan <i>Internet Financial Reporting</i> Berbasis <i>Website</i> Pada Lembaga Keuangan Syariah	Ketersediaan dan penggunaan <i>website</i> , penggunaan <i>website</i> untuk mengkomunikasikan informasi-informasi dari lembaga keuangan syariah	Bahwa sebagian besar lembaga keuangan syariah tidak memiliki <i>website</i> sehingga banyak lembaga keuangan syariah yang tidak memberikan informasi keuangan maupun informasi non keuangan. Didapatkan dari penelitian tersebut hanya ada 51 lembaga keuangan syariah dari 130 data lembaga keuangan syariah yang sudah menggunakan <i>website</i>
4	Jeckly Darma, Eka Ardhani Sisdyani (2014) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah Melalui	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal	Bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan informasi Keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia

**Lanjutan Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun), Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Situs Resmi Pemerintah Provinsi		sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia.
5	Suci Indah Hanifa, Sugeng Praptoyo (2015) Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes)	Penerapan akuntansi keuangan desa kepatihan kecamatan menganti kabupaten gresik, manajemen keuangan desa kepatihan kecamatan menganti kabupaten gresik, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan desa kepatihan, upaya untuk mengatasi hambatan	1. Proses pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan dengan baik dan belum sesuai Undang-Undang No.6 tahun 2014 karena di Desa Kepatihan pada proses pencatatan akuntansi, setiap transaksi-transaksi yang dilakukan hanya di catat ke dalam buku kas harian dan Desa Kepatihan belum menyusun buku kas umum hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia

**Lanjutan Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun), Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		hambatan dalam pencatatan akuntansi dan pengelolaan keuangan desa kepatihan	<p>yang berkompeten dalam bidang akuntansi, sehingga pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan belum berjalan secara maksimal.</p> <p>2. Sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas padaakuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik belum melakukan pemisahan pencatatan antara sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas yang seharusnya di catat ke dalam buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran</p> <p>3. Manajemen keuangan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sudah menunjukkan pelaksanaan yang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), sehingga</p>

**Lanjutan Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun), Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
			<p>pengelolaan keuangan di gunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya. pemberdayaan masyarakat Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.</p>
6	<p>Ikhlas Wau, Ratmono (2015) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan <i>Internet Financial Reporting</i> Oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>Pengaruh kompetisi politik terhadap tingkat ketersediaan dan keteraksesan ifr oleh pemda, pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat ketersediaan dan keteraksesan ifr oleh pemda, pengaruh rasio kemandirian finansial terhadap tingkat ketersediaan dan keteraksesan ifr oleh pemda, pengaruh pendapatan per kapita masyarakat terhadap tingkat ketersediaan dan keteraksesan ifr oleh pemda,</p>	<p>1. Bahwa dalam pengujian model I yang menggunakan metode regresi logistik ordinal bahwa pendapatan per kapita dan opini memiliki pengaruh terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah, sedangkan kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah dan kemandirian finansial pemda tidak berpengaruh terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah. Pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan dorongan untuk memperoleh informasi atas pengelolaan sumber-sumber daya</p>

**Lanjutan Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun), Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		pengaruh opini audit bpk terhadap tingkat ketersediaan dan keteraksesan ifr oleh pemda	oleh pemerintah yang berasal dari masyarakat. 2. Pengujian model II dengan menggunakan metode regresi berganda menunjukkan bahwa kemandirian finansial pemda memiliki pengaruh terhadap keteraksesan IFR pada <i>website</i> pemerintah daerah, sedangkan kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, pendapatan per kapita dan opini tidak berpengaruh terhadap keteraksesan IFR pada <i>website</i> pemerintah daerah. Pemerintah yang memiliki pendapatan daerah yang tinggi menunjukkan kinerja yang positif dalam memaksimalkan potensi daerahnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah obyek penelitian. Obyek penelitian ini adalah pemerintah desa. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan media *internet* berbasis *website* untuk mengetahui transparansi yang ada pada pemerintah desa. Sehingga dapat dibedakan lagi bahwa peneliti sekarang meneliti transparansi laporan keuangan dan non keuangan dengan *internet* berbasis *website*.

## **2.2 Laporan Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. “Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak diluar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan” Soemarsono (2004: 34). Menurut PSAK (*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*) No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2012), “Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”

### **2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah NO. 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah).

### **2.2.3 Komponen Laporan Keuangan Desa**

Pada akhir periode anggaran setiap tahunnya, kepala desa wajib membuat atau menyusun Laporan Keuangan Desa. Laporan keuangan menurut Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

**a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemda yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemda, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang harus disajikan dalam LRA sekurang-kurangnya terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

**b. Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintahan daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pos-pos dalam neraca sekurang-kurangnya meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.

**c. Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

#### **d. Catatan atas Laporan Keuangan**

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, neraca, dan laporan arus kas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya

Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia yang pada umumnya dimiliki pemerintahan desa, pemerintah kemudian hanya menetapkan laporan wajib yang sangatlah sederhana karena hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran (APBDesa) yang kemudian turut serta dilampirkan:

- a) Buku Kas Umum
- b) Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan
- c) Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran
- d) Buku Kas Harian Pembantu
- e) Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja ADD

### **2.3 Transparansi**

#### **2.3.1 Pengertian Transparansi**

Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap

orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik ( Bapenas & Depdagri, 2002 dalam taufeni taufiq 2013).

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggungjawab kepada semua *stakeholders* yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik

### **2.3.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa**

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Mengatakan prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut (Krina 2003) :

- a) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik;
- b) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor public.
- c) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

#### **2.4 Teori Keagenan**

Hubungan keagenan muncul ketika satu pihak (principal) memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain (agent) untuk melakukan pengambilan keputusan. Teori keagenan sendiri muncul berdasarkan pemikiran bahwa pemilik perusahaan (principal) dan manajer perusahaan (agent) memiliki kepentingan yang berbeda (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam penelitian ini agen adalah pemerintah yang memiliki otoritas atas suatu daerah (desa), sedangkan prinsipal adalah masyarakat. Agen-agen (pemerintah desa) yang ditunjuk sebagai delegasi dari pemilik (prinsipal/ masyarakat) ini adalah agen yang dipercaya untuk mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, masyarakat tentunya tidak dapat mengawasi seluruh tindakan yang dilakukan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah selaku agen, sehingga dapat

menimbulkan agen yang akan mengambil keputusan yang hanya menguntungkan kesejahteraan mereka saja tanpa menghiraukan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara tradisional, hubungan antara pemerintah dan warga telah dianggap di bawah teori prinsipal-agen (keagenan) yang telah digunakan secara luas dalam administrasi publik untuk memeriksa masalah yang terkait dengan manajemen dan administrasi di negara yang berlandaskan prinsip desentralisasi (Thompson, 1998). Namun, permasalahan yang timbul dalam hubungan principal-agent secara inheren terkait ketersediaan informasi yang diungkap oleh agent (Alvarez dan Hall, 2006). Dengan demikian, di bawah principal-agent upaya teori telah dibuat untuk mengidentifikasi insentif-insentif yang timbul pada beberapa pengungkapan di sektor publik (Gang, 1988).

Masalah keagenan menimbulkan informasi asimetri antara pemerintah selaku agen dan masyarakat sebagai principal. Akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan information asymmetry Mohamad dkk. (2004) dalam Mulyana (2006) dalam Mediana Febri (2012). Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung atas informasi yang dimilikinya dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Bahwa kemampuan bertahan suatu organisasi ditentukan oleh bagaimana menciptakan informasi yang terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) Scott (1997) dalam Mediana Febri (2012).

## 2.5 Konsep Dasar Sistem Informasi

### 2.5.1 Pengertian Sistem Informasi

Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu (Wing, 2006). Sistem berfungsi menerima input (masukan), mengolah input, dan menghasilkan output (keluaran). Input dan output berasal dari luar sistem, atau berasal dari lingkungan sistem itu berada. Oleh karenanya system akan berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem yang mampu berinteraksi dengan lingkungannya akan mampu bertahan lama, begitu pula sebaliknya.

Sistem perlu adanya suatu masukan (*input*) ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Melalui tahap proses yang merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna. Didalam sistem informasi didalam sistem informasi, proses dapat berupa suatu tindakan yang bermacam-macam, meringkas data, melakukan perhitungan dan mengurutkan data merupakan beberapa contoh proses.

Hasil dari suatu proses adalah keluaran (*output*) yang merupakan hasil dari pemrosesan. Sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan dan sebagainya. Dalam rangka menjamin sistem berjalan sesuai tujuan perlu mekanisme pengendalian (*control mechanism*) dengan menggunakan umpan balik (*feedback*), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses.

Sistem informasi sebagai sistem merupakan suatu pengumpulan data yang terorganisir beserta tata cara penggunaannya yang mencakup lebih jauh dari pada sekedar penyajian.

Keberhasilan suatu sistem informasi yang diukur berdasarkan maksud pembuatannya tergantung pada tiga faktor utama, yaitu keserasian dan mutu data, pengorganisasian data dan tata cara penggunaan data.

### 2.5.2 Komponen-Komponen Sistem Informasi

Guna menjamin berjalannya suatu sistem informasi perlu didukung oleh komponen-komponen sebagai berikut:

- a) Perangkat keras (*hardware*): mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer dan printer
- b) Perangkat lunak (*software*) atau program: sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data.
- c) Prosedur: sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki.
- d) Orang: semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem informasi.
- e) Basis data (*database*): sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data.
- f) Jaringan komputer dan komunikasi data: sistem penghubung yang memungkinkan sumber (*resources*) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.

Pengembangan sistem informasi yang berbasis pelaporan tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem informasi itu sendiri. Selanjutnya, dalam pemanfaatan teknologi dalam suatu sistem informasi, sistem pelaporan yang dilakukan secara elektronik perlu memperhatikan sistem pelaporan (*reporting system*) yang terkait sistem itu sendiri. Hal ini dikarenakan kelancaran dan mutu data yang akan diolah sangat tergantung dengan kehandalan sistem pelaporan tersebut.

### 2.5.3 Prinsip-Prinsip Sistem Informasi

Sistem pelaporan yang ideal diperlukan 6 (enam) prinsip utama yang harus diperhatikan, yaitu:

**a. *Timely* (tepat waktu)**

Agar informasi dan data dapat digunakan secara maksimal, sistem pelaporan harus meyakinkan penggunanya bahwa informasi dan data yang diperlukan dapat disajikan secara cepat dan tepat waktu.

**b. *Accurate* (keakuratan)**

Informasi dan data yang dilaporkan harus bebas dari kesalahan dan manipulasi.

**c. *Reasonable* (tingkat kesulitan).**

Pihak penerima laporan (regulator) harus mempertimbangkan tingkat kesulitan yang dihadapi pihak pelapor dalam menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sistem dan mekanisme pelaporan jangan sampai menyulitkan pihak pelapor sehingga menghasilkan hasil yang kontra produktif.

**d. *Relevant* (relevansi)**

Data dan informasi yang disampaikan oleh pelapor dan kemudian diolah oleh penerima laporan harus menghasilkan informasi yang benar-benar dibutuhkan sebagaimana yang telah ditentukan.

**e. *Efficient* (efisien)**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pengumpulan data dan informasi harus proporsional dengan besarnya manfaat dan nilai informasi yang dihasilkan.

**f. *Transforming* (dapat diolah).**

Data dan informasi yang diterima harus dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut dan mempermudah user (analisis) untuk melakukan kajian lebih lanjut. Hal ini dikarenakan banyak sistem pelaporan yang menghasilkan data yang statis, tidak up-to-date, dan tidak dapat diolah kembali.

## **2.6 Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Sistem adalah satu set komponen-komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan (O'brien, 2011). Sistem biasanya terdiri dari beberapa subsistem yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk mendukung sistem yang lebih besar. Sistem informasi adalah suatu kombinasi yang terorganisir terdiri dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi dan sumber data serta alat kebijakan dan prosedur untuk menyimpan, mengambil, mengubah dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi (O'brien, 2011). Sistem informasi dimaksudkan untuk menyediakan informasi kepada spesifik users (Wilkinson 2000) dalam Medina Febri 2012).

Sedangkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel (<http://www.depdagri.go.id>). UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah pasal 103 yang menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah data yang terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah dituntut untuk membuka akses kepada masyarakat secara luas atas informasi keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan informasi keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.

Pasal 101 menyebutkan tujuan pemerintah dalam rangka menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional adalah:

- a. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional
- b. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional
- c. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti dana perimbangan, pinjaman daerah dan pengendalian defisit anggaran
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi daerah, dan defisit anggaran daerah

Untuk menindaklanjuti pelaksanaan dari UU Nomor 33 tahun 2004 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 56 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam PP tersebut informasi keuangan daerah adalah

informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang harus disampaikan oleh pemerintah daerah dan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi keuangan yang telah diolah dan didokumentasikan haruslah dapat disajikan kepada masyarakat. Informasi tersebut juga berguna sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah yang tertuang dalam PP Nomor 56 tahun 2005 pasal 4 pada pelaksanaannya disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup:

- a. APBD dan realisasi APBD provinsi, kabupaten dan kota
- b. Neraca daerah
- c. Laporan arus kas
- d. Catatan atas laporan keuangan daerah
- e. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan
- f. Laporan keuangan perusahaan daerah, dan
- g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah

Informasi keuangan tersebut harus disampaikan kepada menteri keuangan dan menteri dalam negeri. Penyampaian informasi keuangan daerah dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat. Sarana yang paling efisien dalam menyampaikan informasi keuangan adalah dengan menggunakan internet sebagai media penyampaiannya. Pemerintah daerah dapat menggunakan situs resminya sebagai media publikasi informasi keuangan.

## 2.7 Peran *Internet* Dalam Mengkomunikasikan Informasi Keuangan

Beberapa karakteristik *internet* sangat relevan untuk pelaporan keuangan. Sebagai media komunikasi, *internet* mempengaruhi aspek komunikatif dari pelaporan keuangan, seperti: akses, distribusi, interaksi, dan penyajian serta presentasi

(Xiao et.al.: 2002).

- a) Akses dan Distribusi semakin mudah dan global.
- b) Fitur *World Wide Web* seperti *hypertext*, *hyperlinks* menyediakan potensi untuk merubah cara penyajian laporan keuangan, informasi keuangan akan dapat dihubungkan langsung dengan informasi non keuangan (Xiao et.al.: 2002).
- c) Komunikasi informasi keuangan kepada *stakeholder* dapat dilakukan secara interaktif.

## 2.8 Dampak *Internet* Terhadap Pelaporan Keuangan

*Internet* akan membawa perubahan besar dalam pelaporan keuangan dalam: metode distribusi informasi, pendekatan untuk akses informasi, frekuensi pelaporan, bahasa yang digunakan, maupun permasalahan politis dan sosiologis.

Pengaruh *Internet* terhadap Pelaporan Keuangan antara lain (Xiao et.al. : 2002) :

### a. Meningkatkan Penyajian Informasi Kualitatif dan Non Keuangan.

Sesuai dengan penelitian, dalam industri yang intensif teknologi, investor akan menilai lebih informasi non keuangan dan berusaha untuk melakukan penyesuaian kembali atas laba yang dilaporkan (Amir & Lev: 1996 dalam Andriani 2010).

**b. Meningkatkan Disclosure.**

Peningkatan ekspektasi pengguna informasi keuangan dan permintaan akan informasi spesifik individual akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan informasi yang disediakan.

**c. Keberadaan Laporan Keuangan Tertulis (Tradisional).**

Berkaitan dengan keberadaan laporan keuangan tradisional, para ahli berpandangan bahwa laporan keuangan tradisional akan masih tetap ada dan digunakan untuk memverifikasi akurasi dari informasi keuangan yang ada di *Internet* (Xiao et.al. 2002).

**d. Dampak Terhadap Pengguna Informasi Keuangan.**

Pengguna informasi keuangan di tempat yang jauh dan terpencil akan sangat terbantu dengan.

**e. Dampak Terhadap Peraturan dan Standar Akuntansi.**

*Internet* akan meningkatkan kebutuhan akan standar dan peraturan global. *Internet* akan semakin mendorong ke arah harmonisasi standar atau penggunaan standar Internasional.

**f. Dampak Terhadap Audit.**

*Internet* akan mendorong timbulnya *real-time* pelaporan keuangan, sehingga akan dibutuhkan sistem audit berkelanjutan yang dilakukan oleh auditor.

## 2.9 Analisis Pelaporan Keuangan Di *Internet*

Analisis dalam pelaporan keuangan di *internet* meliputi beberapa analisis yaitu analisis isi, analisis ketepatan waktu, teknologi dan dukungan pengguna. Berikut akan dibahas mengenai masing-masing analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini:

### a) *Indeks*

*Indeks* adalah suatu alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas *internet financial reporting* dalam *website* perusahaan. Indeks yang dikembangkan oleh Cheng *et al* (2000) (dalam emma, luciana 2013) terdiri dari empat komponen, dari keempat komponen masing-masing akan diberi bobot sebagai berikut Isi/*content* sebesar 40 persen, ketepatwaktuan/*timeliness* sebesar 20 persen, Pemanfaatan teknologi 20 persen dan dukungan pengguna/*user support* sebesar 20 persen.

### b) Analisis Isi (*Content*)

Analisis isi (*Content*) adalah suatu metodologi dalam ilmu-ilmu sosial untuk mempelajari isi dari komunikasi. Studi yang mencatat komunikasi manusia, seperti buku-buku, *website*, lukisan dan hukum. Hal ini paling sering digunakan oleh para peneliti dalam ilmu-ilmu sosial untuk menganalisis transkrip rekaman wawancara dengan peserta. Sejak tahun 1980-an, analisis isi telah menjadi alat yang semakin penting dalam pengukuran keberhasilan dalam hubungan masyarakat (terutama hubungan media) program dan penilaian media profil. (Earl Babbie 2002)

Analisis isi dapat dikatakan sebagai elemen dari evaluasi media atau analisis media. Analisis jenis ini, dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang ada dan biasanya dikombinasikan beberapa data yang ada untuk ditarik kesimpulannya. Analisis ini dilakukan dengan melihat kelengkapan isi dari tiap desa.

Kelengkapan Laporan Keuangan Pokok dinyatakan dengan keberadaan informasi keuangan pokok, yaitu 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2. Neraca, 3. Laporan Arus Kas, 4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), atau: (a) Buku Kas Umum; (b) Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan; (c) Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran; (d) Buku Kas Harian Pembantu; (e) Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja ADD.

Sementara itu tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas dan arus kas desa yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewdership*) pemerintah desa atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Sedangkan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang disusun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban pemerintah desa berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi.

**c) Ketepatan Waktu (*Timelines*)**

Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan sangat penting terutama bagi pemerintah desa dalam memberikan laporan pada *websiten*-ya. Agar informasi dan data dapat digunakan secara maksimal, sistem pelaporan harus meyakinkan penggunanya bahwa informasi dan data yang diperlukan dapat disajikan secara cepat dan tepat waktu. Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan dapat diartikan sebagai ketepatan dan konsistensi dalam memberikan pelaporan keuangan pada *website* pemerintah desa. Ketepatan waktu dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut: pemerintah desa selalu mengupdate laporan keuangan tepat pada

tanggal tahun sebelumnya saat perusahaan mengupdate laporan keuangan. Konsisten dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut; pemerintah desa selalu melaporkan laporan keuangan sesuai dengan tahun sebelumnya, sehingga ketepatan waktu dan kekonsistenan dapat memberikan kemudahan bagi para pengakses.

**d) Teknologi (*Technology*)**

Teknologi merupakan salah satu alat manajer untuk mengatasi perubahan (Laudon dan Laudon, 2006: 14). Definisi Teknologi Informasi secara lengkap dinyatakan oleh Martin et al. (2002: 1), yaitu teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi serta teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Definisi teknologi informasi sangatlah luas dan mencakup semua bentuk teknologi yang digunakan dalam menangkap, manipulasi, mengkomunikasikan, menyajikan, dan menggunakan data yang akan diubah menjadi informasi (Martinet al., 2002: 125). Lingkungan teknologi memungkinkan pemerintah desa untuk memajukan kinerjanya. Teknologi dan kinerja memiliki hubungan simbiosis.

Perkembangan Teknologi Informasi yang terjadi selama ini mencakup perkembangan infrastruktur, yakni hardware, software, data, dan komunikasi. Teknologi dalam penggunaan *website* dapat dinilai dengan pemanfaatan yang ada pada homepage. Pemanfaatan teknologi dapat menarik perhatian pengguna laporan keuangan atau yang lainnya dalam

mengakses *website* pemerintah desa. Pemanfaatan ini merupakan aplikasi macromedia flash yang terdapat gambar bergerak.

**e) Dukungan Pengguna (*User Support*)**

Beberapa perusahaan dapat memanfaatkan *website* dengan desain tools dan format untuk membantu menganalisis dan menggunakan laporan keuangan dalam berbisnis. Format atau bentuk pelaporan dimasukkan pada *website* pemerintah desa dengan laporan tahunan yang dibuat dengan kemudahan bagi para pengguna seperti:

1. Adanya tabel atau grafik yang menjelaskan isi pelaporan keuangan.
2. Adanya *hiperlink* yang menghubungkan bagian pelaporan dan dokumen lain yang mendukung
3. Tampilan laporan ditampilkan secara *multiple* file format yaitu *Portable Document Format* (PDF) dan *Hypertext Markup Language* (HTML).

Pemerintah desa juga dapat menampilkan aplikasi lain, seperti *streaming* audio dan video pada *website*. Penampilan *streaming* audio dan video pada *website* desa dapat memberikan gambaran tentang desa secara jelas sehingga menarik masyarakat untuk lebih mengetahui seluk beluk desa. *Streaming* audio dan video dapat diisi dengan beberapa presentasi oleh desa seperti presentasi produk unggulan dari desa tersebut, wahana rekreasi, dan lain sebagainya.

Indeks *website* pemerintah desa akan semakin tinggi jika pemerintah mengimplementasikan secara maksimal semua sarana dalam *website*

pemerintah desa seperti beberapa media yaitu pencarian dan navigasi. Analisis untuk pengguna atau *user* ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemudahan pengguna dalam mengakses *website* pemerintah desa. Bagian yang dapat dinilai pada *website* ditinjau dari segi pengguna (*user*) adalah seberapa mudah tampilan pada perusahaan untuk pengguna yang dilihat dari keberadaan email, keberadaan fasilitas pencarian (*search engines*).

### 2.10 Manfaat *Internet* untuk Masyarakat

Secara umum banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat apabila mempunyai akses ke *internet* antara lain:

- a) Informasi online untuk kehidupan pribadi meliputi info kesehatan, rekreasi, hobby, pengembangan pribadi, rohani, sosial.
- b) Informasi online untuk kehidupan profesional/pekerja meliputi informasi sains, info teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum komunikasi.

Yang cukup menarik dari penggunaan *internet* adalah bisa berhubungan dari belahan dunia manapun, sehingga jarak bukan menjadi masalah. Penggunaan *internet* tidak mengenal akan batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. *Internet* adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat *internet* terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sudah

waktunya para profesional Indonesia memanfaatkan jaringan *internet* dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia.

Manfaat *internet* dalam kehidupan masyarakat antara lain:

- a. Media mengeluarkan pendapat dan menulis.

Tidak semua orang yang bisa atau pandai untuk bicara menyampaikan pendapat secara langsung. Dan juga ada beberapa orang yang memang mempunyai kemampuan dan hobi untuk menulis. Dan *internet* dengan sebuah blog misalnya bisa menjadi sarana yang bermanfaat bagi seseorang untuk menyampaikan pendapat dan menyalurkan hobi menulis.

- b. Untuk memperoleh informasi.

Banyak informasi yang bisa kita dapat khususnya bagi pelajar dan masyarakat luas pada umumnya. Tentang kemajuan teknologi terkini negara lain misalnya atau kemajuan komunikasi dan lainnya. Semua bisa bermanfaat bagi masyarakat.

- c. Untuk sarana bersosialisasi.

Bukan hal baru dan hampir semua lapisan masyarakat tahu akan keberadaan jejaring social seperti Facebook atau Twitter dan lainnya. Mengasikkan kadang sampai lupa waktu bila sudah tenggelam dalam kegiatan selancar di Facebook dengan teman-teman. Dan lewat jejaring social tersebut bisa menjadi ajang sosialisasi juga mencari teman-teman baru dengan segudang pengalaman dan wawasan serta ilmu pengetahuan baru yang belum pernah didapat. Bahkan dari beberapa peristiwa, kita bisa

melacak keberadaan saudara atau teman lama yang sudah terpisah dan kehilangan jejak sejak lama.

- d. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

*Internet* bagi masyarakat yang terbanyak adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas, sangat luas. Tidak terbatas pada buku, guru atau sekolah. Di *internet* seseorang bisa memperoleh semua informasi yang diperlukan dengan cepat dan mudah, tanpa harus beranjak dari tempat duduk di depan monitor. Keterbatasan waktu untuk membaca buku bisa teratasi dengan solusi dari *internet*.

### **2.11 *Internet Financial Reporting***

*Internet Financial Reporting* adalah suatu cara yang dilakukan perusahaan untuk mencantumkan laporan keuangannya melalui *internet*, yaitu melalui *website* perusahaan. Dengan memberikan laporan melalui *internet*, perusahaan mampu menyebarkan informasi secara lebih luas, lebih cepat dan lebih murah. (Kusumawardani, 2011)

Penggunaan *internet* sebagai saluran penyajian dan pendistribusian laporan keuangan membagi menjadi tiga tahapan (Kusumawardani, 2011):

- a) Perusahaan menggunakan *internet* hanya sebagai saluran mendistribusikan laporan keuangan yang telah dicetak dalam format *digital*, seperti *file* dengan format pengolah kata atau *portable data file* (PDF).
- b) Perusahaan menggunakan *internet* untuk menyajikan laporan keuangan mereka dalam format web, yang memungkinkan mesin pencari mengindeks

data-data tersebut sehingga mesin pencari dan pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi tersebut.

- c) Perusahaan menggunakan *internet* tidak hanya sebagai saluran distribusi laporan keuangan tetapi juga menyediakan cara yang lebih interaktif sehingga pengguna tidak hanya dapat melihat laporan baku yang dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi mereka juga dapat mengkostumisasi sendiri informasi-informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut, sehingga lebih bermanfaat bagi mereka tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan dan bahkan pengguna informasi pun dapat mengkonversi format file atau cetakan yang mereka perlukan untuk pengambilan keputusan.

Berbagai format yang dapat digunakan dalam mempresentasikan laporan keuangan melalui *internet* yakni (Hargyantoro 2010):

**a) *Portable Document Format (PDF)***

Merupakan sebuah format file yang dikembangkan oleh Adobe Corporation untuk membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mewakili dokumen yang asli. Semua elemen dalam dokumen asli disimpan sebagai gambaran elektronik.

**b) *Hypertext Markup Language (HTML)***

HTML merupakan standar yang biasa digunakan untuk mempresentasikan informasi melalui *internet*.

**c) *Graphics Interchange Format (GIF)***

GIF adalah sebuah format file grafik, dengan meringkas mengenai gambaran informasi tanpa mengurangi informasi tersebut, yang dapat dibaca oleh kebanyakan pengguna.

**d) *Joint Photographic Expert Group***

(JPEG) Sebuah format grafik yang digunakan untuk meringkas foto agar mempunyai ukuran yang dapat digunakan dalam *website*.

**e) *Microsoft Excel Spreadsheet***

Sebuah aplikasi komputer yang berupa spreadsheet dengan menyimpan, memperlihatkan, dan memanipulasi data yang disusun dalam kolom dan lajur.

**f) *Microsoft Word Microsoft***

Merupakan aplikasi program komputer yang paling banyak digunakan dalam *Internet Financial Reporting (IFR)*.

**g) *Zip Files***

*Winzip* adalah program windows yang mengizinkan para pengguna untuk menyimpan dan meringkas dokumen informasi sehingga mereka dapat menyimpan dan mendistribusikan informasi tersebut dengan lebih efisien.

**h) *Macromedia Flash Software***

Merupakan standar untuk mengirim informasi dengan cepat.

i) ***Real Network Real Player Software*** Format yang menggunakan efek video

*Macromedia Shockware Software Shockware* merupakan bagian dari multimedia player.

j) ***Macromedia Shockware Software Shockware***

Merupakan bagian dari multimedia player.

*Internet Financial Reporting* memberikan berbagai keuntungan, yaitu (Fitriana 2009):

- a. Menawarkan solusi biaya rendah (bagi kedua belah pihak). Bagi investor, memberikan kemudahan dalam mengakses informasi perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan, dapat mengurangi biaya untuk mencetak serta mengirim informasi perusahaan kepada investor. Menawarkan ketepatan waktu dalam penyebaran serta akses informasi sehingga informasi lebih relevan karena tepat waktu.
- b. Sebagai media komunikasi massa untuk laporan perusahaan. Informasi dapat diakses oleh pengguna yang lebih luas daripada media komunikasi yang lama. Tidak ada batasan wilayah sehingga dapat mengembangkan jumlah investor potensial.
- c. Menawarkan informasi keuangan dalam berbagai format yang memudahkan dan bisa didownload. *Adobe acrobat* format dalam PDF biasanya merupakan format yang paling umum digunakan (Pervan, 2006 dalam Fitriana 2009 ). Selain itu format yang digunakan adalah HTML, Excel dan XBRL.

- d. Memungkinkan pemakai berinteraksi dengan perusahaan untuk bertanya atau memesan informasi tertentu dengan cara yang jauh lebih mudah dan murah dibanding mengirim surat atau telepon ke perusahaan.

### 2.12 Manfaat *Internet Financial Reporting (IFR)*.

Manfaat pelaporan keuangan menggunakan *internet* diantaranya adalah sebagai berikut (suripto,2005):

- a. Meningkatkan efisien biaya, karena menurunkan biaya produksi dan distribusi yang berhubungan dengan laporan tahunan cetakan dan menekan jumlah permintaan laporan keuangan yang bukan pemegang saham.
- b. Memperbaiki akses pemakai terhadap informasi dengan: Fleksibilitas akses yang tidak berurutan terhadap informasi dengan menggunakan hyperlink,
- c. Menyediakan informasi lebih banyak dibanding yang tersedia dalam laporan cetakan tahunan,
- d. Menyediakan informasi realtime dan menyediakan informasi dalam cara interaktif.

### 2.13 Keunggulan *Internet Financial Reporting (IFR)*

Beberapa keunggulan *internet financial reporting*, antara lain:

- a) Adanya fasilitas yang memungkinkan pemakai untuk berinteraksi dengan pemerintah desa untuk bertanya atau memesan informasi tertentu dengan cara yang jauh lebih mudah dan murah dibanding mengirim surat atau menelepon ke perusahaan.
- b) Menyajikan informasi yang lebih terinci dibandingkan yang dimungkinkan oleh laporan tahunan tradisional.

- c) Pelaporan keuangan menggunakan *internet* memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan keuangan yang tidak ringkas dan data keuangan tambahan (misalnya penjualan mingguan atau kuartalan dalam *website*). (Ashbaugh et al., 1999)
- d) Menyediakan informasi terkini melalui pemeliharaan secara teratur terhadap *website* (FASB,2000)
- e) Meningkatkan relevansi informasi melalui peningkatan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan. (ashbaught et al., 1999 dalam Kusumawardani)

## 2.14 Perspektif Islam

### 2.14.1 Tujuan Adanya Sistem Informasi Berdasarkan Perspektif Islam

Sistem informasi akuntansi ini, diharapkan dapat mengurangi kecurangan yang ada didalam sebuah lembaga pemerintahan, seperti yang telah diperintahkan didalam Al-Quran surat An-Nisaa' (4: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

29. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu*[287]; *Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

#### 2.14.2 Peranan Sistem Informasi Dalam Perspektif Islam

Islam mengemukakan dan memandu prinsip-prinsip, serta menentukan satu perangkat aturan-aturan, karena semua aspek hidup manusia, termasuk masalah keuangan dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, masyarakat Islam mempunyai tantangan terbesar untuk mereformasi institusi keuangan mereka secara sejalan dengan ajaran Islam.

sistem informasi (information system) adalah Sekumpulan komponen yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem berfungsi menerima dan diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para pengguna". Berdasarkan pengertian tersebut, dimana didalam sistem informasi akuntansi itu terdapat proses dan sistem yang harus dilakukan (Wing, 2006).

Proses melakukan pencatatan yang ada didalam akuntansi, Al-Qur'an telah mengatur tentang pencatatan yang hingga saat ini dijadikan pedoman untuk ekonomi Islam, yaitu Allah SWT menjelaskan dalam Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَيِّنْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ

تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا  
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
(البقرة: ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepadatidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak

*ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*

Adapun kandungan ayat tersebut terdapat prinsip dasar yang universal dalam operasional yaitu:

**a) Prinsip Pertanggungjawaban Prinsip**

pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang *khaliq* mulai dari alam kandungan. manusia diciptakan oleh Allah sebagai *khalifah* dimuka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalfahannya. Inti kekhalfahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Yang intinya banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Dan jika diimplikasikan dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk pelaporan akuntansi.

### b) Prinsip Keadilan

Surat Al-Baqarah;282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai *inheren* yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar.

### c) Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktifitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Dalam surat An-Nisaa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu*

*karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*

### 2.14.3 Dalil dalam Al-Qur'an

Didalam perspektif Islam transparansi dalam hal keuangan sangat diperlukan untuk mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, karena data- data tersebut merupakan kesaksian, sebagaimana firman Allah SWT:

*“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”*

Islam melarang seorang muslim untuk melakukan penipuan karena hal ini dapat menyebabkan kerugian pada pelanggan. Secara tegas Allah SWT berfirman dalam QS. *Asy Syura* ' ayat 181-183.

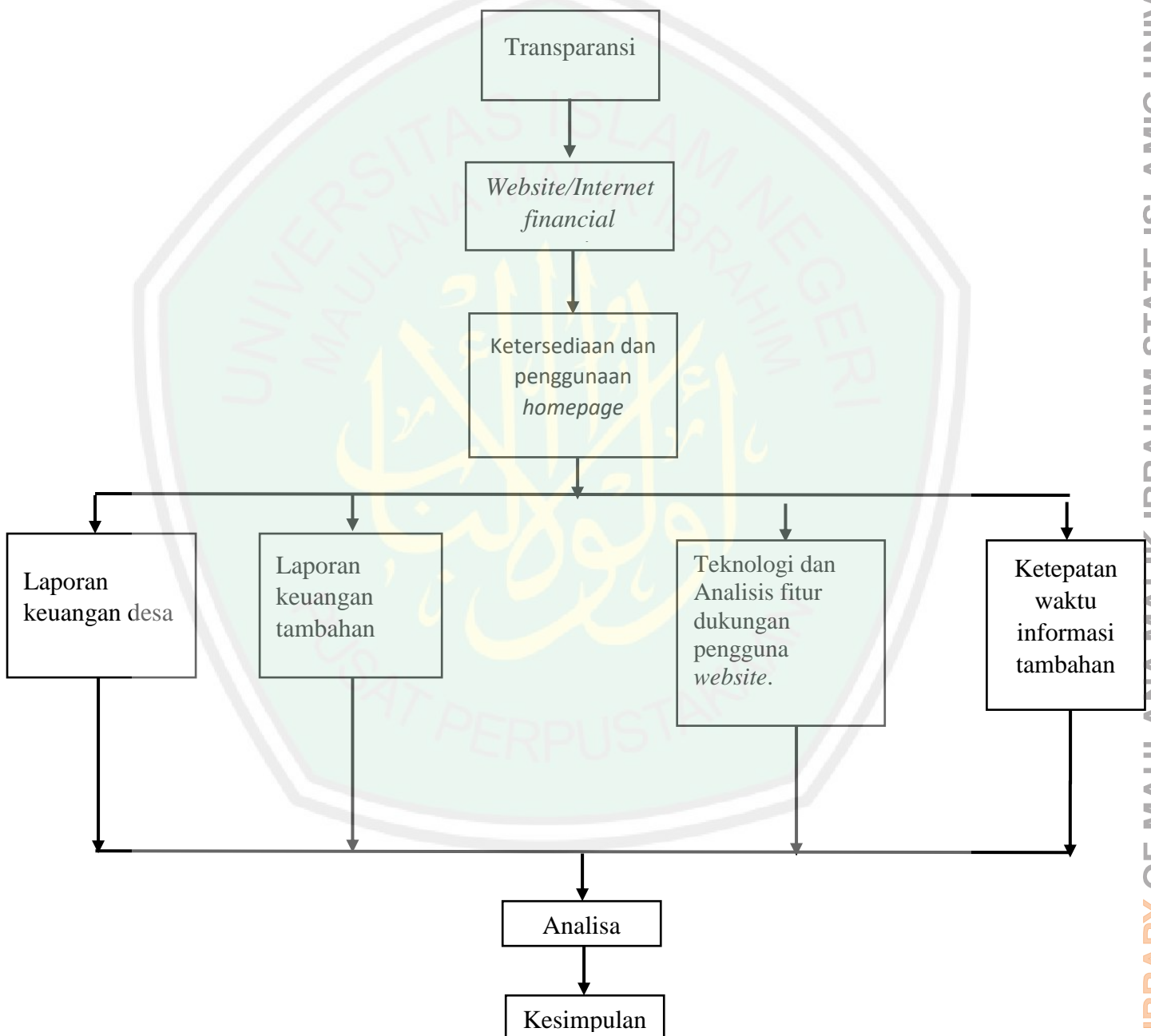
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا  
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

*181. sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan; 182. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 183. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*

## 2.15 Kerangka Befikir

Digambarkan di dalam diagram dibawah ini

Gambar 2.1



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. (Sugiyono, 2012)

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, Karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik Karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, Karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive Karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan. (Sugiyono, 2012)

Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif. Menurut metode deskriptif menjelaskan bahwa suatu metode dengan melakukan suatu

penelitian yang mengemukakan keadaan sebenarnya yang ada di perusahaan, kemudian hasil dari penelitian yang diperoleh itu dilakukan suatu analisa untuk memperoleh gambaran mengenai masalah yang ada.

### 3.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah desa yang berada di provinsi jawa timur. Pada obyek penelitian ini nanti akan dibatasi 3 penerima dana ADD (alokasi dana desa) terbesar di jawa timur. Peneliti akan menyajikan tabel dengan dana ADD dimasing-masing kabupaten/kota di jawa timur.

Tabel 3.1  
Dana ADD

No	Nama Kabupaten/Kota	Alokasi (Dalam Rupiah)	Rank
1	Kab. Bangkalan	79.115.023.000	13
2	Kab. Banyuwangi	59.888.614.000	21
3	Kab. Blitar	62.103.692.000	18
4	Kab. Bojonegoro	116.539.758.000	2
5	Kab. Bondowoso	60.687.619.000	20
6	Kab. Gresik	91.691.495.000	8
7	Kab. Jember	71.400.973.000	16
8	Kab. Jombang	85.437.433.000	11
9	Kab. Kediri	97.418.474.000	4

Lanjutan Tabel 3.1

## Dana ADD

No	Nama Kabupaten/Kota	Alokasi (Dalam Rupiah)	Rank
10	Kab. Lamongan	127.056.805.000	1
11	Kab. Lumajang	57.562.288.000	23
12	Kab. Madiun	55.287.810.000	25
13	Kab. Magetan	56.708.716.000	24
14	Kab. Malang	109.423.772.000	3
15	Kab. Mojokerto	82.636.892.000	12
16	Kab. Nganjuk	75.231.367.000	15
17	Kab. Ngawi	61.959.247.000	19
18	Kab. Pacitan	46.754.834.000	27
19	Kab. Pamekasan	54.023.090.000	26
20	Kab. Pasuruan	96.110.603.000	5
21	Kab. Ponorogo	78.829.344.000	14
22	Kab. Probolinggo	94.777.663.000	7
23	Kab. Sampang	58.384.564.000	22
24	Kab. Sidoarjo	91.414.871.000	9
25	Kab. Situbondo	38.962.693.000	29
26	Kab. Sumenep	94.880.517.000	6
27	Kab. Trenggalek	44.080.846.000	28
28	Kab. Tuban	88.124.523.000	10
29	Kab. Tulungagung	71.037.288.000	17
30	Kota Batu	6.484.041.000	30
	<b>Jumlah</b>	<b>2.214.014.855.000</b>	

### 3.3 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data primer dan sekunder. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012). Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dokumen-dokumen yang telah ada. Alasan penggunaan data sekunder antara lain:

- a) lebih mudah diperoleh jika dibandingkan dengan data primer,

- b) tidak memakan banyak biaya dan waktu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi keuangan dan non keuangan yang terdapat dalam *website* pemerintah desa tersebut.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari:

- a) Observasi *website* pada *website* pemerintah desa yang ada di provinsi Jawa timur.
- b) Berbagai artikel, buku, *internet* dan beberapa penelitian terdahulu dari berbagai sumber.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode:

- a) Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen. Hal ini mencari data nama-nama desa yang ada di Jawa timur.
- b) Studi pustaka yaitu pengumpulan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu. Hal ini data diperoleh melalui buku-buku, penelitian terdahulu, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan.
- c) Observasi *website* pemerintah desa dengan tahap-tahap:
1. Mencari nama-nama desa se-Jawa timur. Peneliti menggunakan *sosmed* (*sosial media*), *search engine*. *Search engine* yang umum digunakan seperti *Google*, *Yahoo*, *UC Browser*, *E-xplorer* dan *Mozilla Firefox*.
  2. *Website* desa diakses untuk menguji aksesibilitasnya dan untuk keperluan pengumpulan data.

3. Apabila tidak ditemukan *website* melalui *search engine* dan *Sosmed*, maka desa tersebut dianggap tidak mempunyai *website*.

### **3.5 Model Analisis Data**

#### **3.5.1 Ketersediaan dan Penggunaan Website**

Analisis awal yang dilakukan adalah mendata desa yang telah memiliki *website*. Data ini dapat ditemukan melalui fasilitas *sosmed* (*sosial media*), dan *search engines* (*Google, Yahoo, UC Browser, E-xplorer* dan *Mozilla Firefox*), dengan memasukkan nama-nama desa yang ada di Jawa Timur. Hasil yang diperoleh digunakan sebagai sampel dalam melaksanakan penelitian.

#### **3.5.2 Penggunaan website untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dan informasi-informasi dari pemerintah desa.**

Analisis pada tahap ini meliputi beberapa kriteria, yaitu:

##### **a. Analisis Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Desa**

Analisa pertama dilakukan untuk menentukan ketersediaan informasi-informasi keuangan dalam *website* masing-masing desa kepada pengguna. Pertama, ketersediaan dan kelengkapan Laporan Keuangan Pokok tahun 2015. Pada tahap ini, langkah awal dilakukan untuk menganalisa keberadaan informasi keuangan pokok yang telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## b. Analisis Laporan Keuangan Tambahan

Pada tahap ini adalah melakukan analisa informasi keuangan tambahan yang berupa ketersediaannya catatan atas laporan keuangan, dan rasio keuangan yang diinformasikan melalui *website*.

### 3.5.3 Analisis ketepatan waktu informasi tambahan (berita)

Rendahnya biaya dan cepatnya dalam menyampaikan informasi lebih secara detail merupakan keunggulan lain dari *internet* kepada pengguna (users). Pada bagian ini akan menganalisa bagaimana pemerintah desa memanfaatkan teknologi *internet* dalam menyampaikan sebuah informasi secara cepat dan tepat bagi para pengguna informasi tersebut dan pemerintah desa tersebut memperbarui informasi atau berita yang dipublikasikan atau tidak.

### 3.5.4 Analisis teknologi dan Analisis fitur dukungan pengguna *website*.

**Analisis pada tahap ini meliputi beberapa kriteria, yaitu:**

Pada tahap ini akan dianalisa masing-masing pemerintah desa yang memiliki *website*, bagaimana pemerintah desa memanfaatkan media *website* sebagai teknologi yang sedang berkembang. Analisa pertama melihat kecepatan tampilan *website* pada saat di buka, kedua manfaat aplikasi *JAVA* untuk menampilkan gambar bergerak, ketiga penggunaan *external links*, fitur pencarian (*search engines*) didalam *website* dan alamat dan contact person yang dapat dihubungi, keempat adalah kandungan isi *website* dan tampilan *website* agar penyajian informasi yang maksimal bagi pengguna *website* tersebut. Faktor penggunaan *frame*, teks yang dapat jelas dibaca, menu *pull*

*down* dan *sitemap* akan sangat berpengaruh dan sangat penting bagi para pengguna agar tertarik dan kemudahan membaca dari isi *website* tersebut.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan disebutkan sebagai salah satu dari sebanyak 34 Provinsi di Indonesia. Di provinsi ini terdapat sebanyak 7.724 desa, 777 kelurahan, dan 664 kecamatan yang tersebar di 29 kabupaten dan 9 kota.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang perekonomiannya cukup baik. Menurut laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perekonomian Jawa Timur pada tahun 2013 tumbuh mencapai 6,68%. Pertumbuhan ini secara umum lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional saat itu yang hanya mencapai 5,83%. Melihat paparan tersebut tak ayal bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang perekonomiannya selalu masuk dalam sepuluh besar di seluruh Indonesia, serta berada pada posisi kedua tertinggi di Jawa1. Pertumbuhan perekonomian yang baik di Jawa Timur secara tidak langsung dipengaruhi oleh banyaknya industri di Jawa Timur. Industriindustri yang ada di Jawa Timur di antaranya industri tekstil, rokok, peternakan, dan pertanian. Pertanian di Jawa Timur merupakan sektor yang paling lamban dalam sumbangsihnya untuk perekonomian Jawa Timur. Sekalipun seperti di atas, tidak lantas tidak ada permasalahan ekonomi di Jawa Timur. Dari

jumlah 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur ada 3 kabupaten yang menerima ADD (Alokasi Dana Desa) paling besar di Jawa Timur

3 kabupaten penerima ADD (Alokasi Dana Desa) paling besar di Jawa Timur yaitu:

#### 4.1.1 Kabupaten Lamongan

##### a. Geografis

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada  $651^{\circ}54'' - 723^{\circ}06''$  Lintang Selatan dan  $11233^{\circ}45'' - 11233^{\circ}45''$  Bujur Timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih  $1.812,8 \text{ km}^2$  atau  $+3.78\%$  dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang  $47 \text{ km}$ , maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas  $902,4 \text{ km}^2$ , apabila dihitung  $12 \text{ mil}$  dari permukaan laut.

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu:

Bagian Tengah Selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.

Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.

Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah.

Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah: Sebelah Utara perbatasan dengan laut jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut.

Jika dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0-2% yang tersebar di kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedongpring, Sebagian Bluluk, Modo, dan Sambeng, sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam, atau kurang dari 1% (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40% lebih.

Kondisi tata guna tanah di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: baku sawah (PU) 44.08 Hektar, Baku sawah tidak resmi (Non PU) 8.168,56 Hektar, sawah tadah hujan 25.407,80 Hektar, Tegalan 32.844,33 Hektar, pemukiman 12.418,89 Hektar, Tambak / kolam / waduk 3.497,72 Hektar, kawasan hutan

32.224,00 Hektar, kebun Campuran 212,00 Hektar, Rawa 1.340,00 Hektar, Tanah tandus / kritis 889,00 Hektar dan lain-lain 15.092,51 Hektar.

#### b. Demografis

Menurut data Survey Sensus Ekonomi Nasional (susenas) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 jumlah penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2005 sebanyak 1.261.972 jiwa, terdiri dari 646.830 jiwa (51,26%) perempuan dan 615.142 jiwa (48,74%) laki-laki. Dengan komposisi kelompok umur berdasarkan jenis kelamin laki-laki; laki usia 0-14 tahun sebanyak 170.087 jiwa (27,65%), usia 15-64 tahun sebanyak 407.040 (66,17%) dan usia di atas 65 tahun sebanyak 38.015 jiwa (6,18%). Sedangkan kelompok umur perempuan usia 0-14 tahun sebanyak 151.617 jiwa (23,44%), usia 15-64 tahun sebanyak 436.092 (67,42%) dan usia di atas 65 sebanyak 59.121 jiwa (9,14%), sehingga jumlah penduduk Kabupaten Lamongan secara keseluruhan berdasarkan kelompok usia 0-14 tahun sebanyak 321.704 jiwa, usia 15-64 tahun sebanyak 843.132 jiwa, usia 65 ke atas sebanyak 97.136 jiwa.

Banyaknya pencari kerja tamatan SD yang terdaftar sebanyak 55 orang, tamatan SMP sebanyak 216 orang, tamatan SMU / sederajat sebanyak 5.371 orang, tamatan Diploma I/II/III sebanyak 2.125 orang, tamatan sarjana sebanyak 3.419 orang. Adapun pemenuhan lowongan kerja menurut sektor listrik, gas dan air 186 orang, bangunan 242 orang, perdagangan 417 orang, angkutan 240 orang, bank dan keuangan 78 orang dan jasa-jasa 2.351 orang.

### c. Ekonomi

Sebagai langkah strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, maka ada komponen utama yang perlu diketahui yaitu potensi unggulan daerah. Dengan mengetahui dan memahami potensi unggulan daerah dapat diketahui sektor-sektor basis dan unggulan yang dapat dipacu/diakselerasi dan dioptimalkan guna memacu perkembangan kondisi perekonomian / pembangunan daerah pada wilayah tersebut. Hal ini tentunya akan digunakan sebagai pendorong dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Lamongan.

Hasil analisis komparatif dan sektor unggulan berdasarkan data produk Domestik regional Bruto (PDRB) melalui indeks Dominasi antar daerah di propinsi Jawa Timur (38 kabupaten/kota) dengan menggunakan 2(dua) indikator utama yaitu statis location Quotion (SLQ) dan Dynamic Location Quotion (DLQ), maka dapat diketahui sektor-sektor unggulan daerah di Kabupataen Lamongan. Adapun sektor unggulan Kabupaten Lamongan tersebut antara lain :

- Sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dan perikanan,
- Sektor industri pengolahan (khususnya sub sektor industri tanpa migas: industri tekstil, barang kulit, barang kayu, kertas dan barang cetakan),
- Sektor bangunan / kontruksi,
- Sektor perdagangan, hotel dan restoran (khususnya sub sektor perdagangan besar dan eceran dan sub sektor hotel),
- Sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta

- Sektor jasa (khususnya sub sektor sosial dan kemasyarakatan, hiburan, rekreasi, dan perumahan dan rumah tangga).

Selain berdasarkan hasil analisis diatas, potensi unggulan suatu daerah juga dapat dilihat dari kondisi sumberdaya yang dimiliki. Berdasarkan kondisi sumber daya alam yang ada, potensi unggulan daerah Kabupaten Lamongan di sektor pertanian khususnya nampak pada sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perikanan. Dengan total baku lahan sawah seluas 83.213 hektare(sekitar 7,23% dari total Jawa Timur Kabupaten Lamongan pada tahun 2006 mampu memberikan kontribusi produksi gabah sebanyak 776.085 ton GKG (7,14% dari total produksi gabah di Jawa Timur atau terbesar ke-2 di Jawa Timur). Kabupaten Lamongan juga merupakan penghasil nomor 5 (lima) terbesar di Jawa Timur untuk komoditi jagung, yaitu sebesar 5,61% dari total Jawa Timur.

Sedangkan untuk sub sektor perikanan, Kabupaten Lamongan mampu memberikan kontribusi sebesar 15,25% dari total produksi ikan di Jawa Timur atau merupakan penghasil ikan terbesar di Jawa Timur, yaitu sekitar 65.874,984 ton senilai kurang lebih Rp.446 milyar. Kontribusi terbesar produksi ikan di Kabupaten Lamongan disumbangkan oleh produksi ikan air tawar (sawah tambak) dan produksi perikanan laut. Perikanan sawah tambak yang didukung areal 22.422,49 hektare mampu memberikan produksi ikan air tawar sebesar di Jawa Timur, sedangkan perikanan laut yang didukung 19.994 nelayan dan 5.385 armada kapal penangkap ikan mampu menghasilkan produksi ikan terbesar nomor 3 (tiga) di Jawa Timur setelah Kabupaten Sumenep dan Probolinggo.

Sedangkan pada sektor industri pengolahan, keunggulan potensi sektor ini banyak ditopang oleh besarnya keberadaan industri rumah tangga (IRT) dan Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) yang ada. Berdasarkan data tahun 2006, di Kabupaten Lamongan berkembang 13.676 unit industri non formal dan 445 unit industri formal yang kesemuanya memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan.

Sektor bangunan /kontruksi merupakan salah satu sektor unggulan daerah di Kabupaten Lamongan. Hal ini menunjukkan suatu indikasi cepatnya laju gerak pembangunan sarana prasarana di Kabupaten Lamongan, baik itu berupa gedung, jalan jembatan, sarana irigasi dan infrastruktur lainnya seperti pelabuhan penyeberangan (ASDP), obyek wisata (WBL) dan kawasan industri (LIS) yang didukung peranan swasta/ investor.

Besarnya volume perdagangan di Kabupaten Lamongan khususnya komoditi pertanian, pertambangan dan penggalian dan industri hasil produk lamongan merupakan suatu potensi unggulan daerah yang perlu didukung dengan system pemasaran yang efisien dan dukungan sarana prasarana (infrastruktur) yang baik. Surplus beras pada tahun 2006 yang kurang lebih mencapai 358.000 ton merupakan salah satu komoditi perdagangan unggulan daerah, demikian juga komoditi perikanan air tawar (sawah tambak) dan perikanan laut yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2006 memberikan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu sebesar 10,37%.

Sedangkan untuk sektor jasa, khususnya sub sektor hiburan dan rekreasi menunjukkan suatu perkembangan yang nyata/ significant untuk memberikan kontribusi yang semakin meningkat terhadap perekonomian daerah Kabupaten Lamongan. Pembangunan Wisata Bahari Lamongan (WBL) nampak nyata memberikan pengaruh langsung terhadap besarnya kontribusi sub sektor ini terhadap PDRB. Dengan kunjungan wisatawan mencapai kurang lebih 850.000 per tahun merupakan suatu potensi daerah yang besar untuk terus dikembangkan dan disinergikan dengan obyek wisata lainnya seperti wisata religi / ziarah Makam Sunan Drajat dan Goa Maharani. Keberadaan WBL juga secara tidak langsung memberikan multiplier effect terhadap kembang tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif lainnya di masyarakat. Pada tahun 2006 sub sektor hiburan dan rekreasi mampu tumbuh sebesar 5,23%.

Wilayah Kab.Lamongan yang mempunyai letak strategis di antara pusat-pusat pertumbuhan di Jawa Timur merupakan potensi yang cukup besar untuk dioptimalkan dalam rangka pengembangan wilayah. Model pembangunan ekonomi daerah dengan pendekatan kutub pertumbuhan (Growth Pole Approach), yaitu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan (growth pole) khususnya di wilayah pantura dengan pihak investor merupakan strategi yang telah dikembangkan selama beberapa tahun ini. Diharapkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut bisa menjadi engine of growth dari perekonomian Kabupaten Lamongan secara keseluruhan tanpa mengesampingkan pengembangan wilayah lainnya.

Struktur perekonomian Kabupatena Lamongan yang masih besar ditopang oleh sektor pertanian mengakibatkan laju pertumbuhan ekonominya masih dibawah

rata-rata Jawa Timur dan Nasional. Persoalan struktural yang dialami oleh sektor pertanian selama ini mengakibatkan rendahnya kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai pertumbuhan ekonomi yang disumbangkan oleh sektor pertanian selama kurun waktu 2002-2006 relatif stagnan, dimana pada tahun 2006 hanya tumbuh sebesar 1,72%, paling rendah dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Berkaitan dengan kondisi tersebut, upaya peningkatan nilai tambah produk-produk komoditi pertanian pada tahun-tahun mendatang melalui pengembangan kegiatan pengolahan hasil komoditi pertanian (industri pengolahan berbasis komoditi pertanian) menjadi salah satu pemecahannya.

#### **4.1.2 Kabupaten Bojonegoro**

Kabupaten Bojonegoro secara administratif memiliki luas wilayah yaitu mencapai 230.706 Ha dan secara administratif memiliki batas wilayah yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tuban
- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Selatan: Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang
- Barat: Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah)

Tahun 2016 wilayah Kabupaten Bojonegoro secara administratif Kabupaten Bojonegoro saat ini terbagi menjadi 28 kecamatan dengan 419 desa dan 11 kelurahan. Lebih jelas wilayah administrasi Kabupaten Bojonegoro beserta luas wilayah perkecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1. Luas Wilayah Per Kecamatan

di Kabupaten Bojonegoro dan Gambar Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bojonegoro.

Letak dan Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara orientasi berada di bagian paling barat wilayah Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Bojonegoro berada pada koordinat 6o 59' sampai 7o 37' Lintang Selatan dan 112o25' sampai 112o 09' Bujur Timur, dengan jarak + 110 km dari ibu kota provinsi.

Keadaan topografi Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah yang berbukit yang berada di sebelah selatan (Pegunungan Kapur Selatan) dan sebelah utara (Pegunungan Kapur Utara) yang mengapit dataran rendah yang berada di sepanjang aliran Bengawan Solo yang merupakan daerah pertanian yang subur. Lebih jelaskondisi topografidi Kabupaten Bojonegoro

Wilayah Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh lahan dengan kemiringan yang relatif datar. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada tabel diatas, bahwa 91,26% wilayah Kabupaten Bojonegoro memiliki kemiringan antara 0-15%. Permukaan tanah di Kabupaten Bojonegoro rata-rata berada pada ketinggian dari permukaan laut yang relatif rendah, yaitu berada pada ketinggian antara 25 - 500 m dari permukaan laut.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro dengan migas tahun 2015 tumbuh sebesar 19,87 % mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2014 sebesar 2,36 %. Sedangkan untuk tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa

migas mencapai 5,99 %, sedikit terjadi perlambatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,19 %. Sebagai pembandingan untuk tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mencapai 5,44% dan Nasional mencapai 4,79%. Hal mendasar yang mempengaruhi progress laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro diantaranya adalah peningkatan signifikan pada beberapa sektor produksi diantaranya adalah meningkatnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian yang dipengaruhi secara langsung oleh meningkatnya lifting migas sebesar 40% dari tahun 2014, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan motor. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang relatif cukup rendah ditahun 2015 yang mencapai 2,91%. Capaian inflasi tersebut relatif stabil dan masih dibawah inflasi Jawa Timur dan Nasional. Sebagai gambaran dan komparasi regional, inflasi Jawa Timur mencapai 3,08% dan inflasi nasional mencapai 3,35%. Dari sisi kontribusi PDRB Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015 ini sektor pertambangan dan penggalian menempati kontributor terbesar dalam peranan pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2015, yaitu mencapai 50,10% dan kemudian disusul sektor pertanian yang memiliki kontribusi mencapai 12,80%. Dari kondisi riil perekonomian daerah tersebut diatas, menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan mampu memberikan impact yang besar dalam meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Selanjutnya, untuk melihat posisi tentang trend laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita dan tingkat inflasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

#### **4.1.3 Kabupaten Malang**

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Propinsi Jawa Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo
- Sebelah timur : Kabupaten Lumajang
- Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah barat : Kabupaten Blitar

Luas wilayah Kabupaten Malang sekitar 3.238,26 km<sup>2</sup> yang merupakan wilayah kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara administrasi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 wilayah kecamatan yang membawahi 12 kelurahan dan 378 desa, yang terbagi ke dalam 3.133 RW dan 14.054 RT. Sementara dari segi perekonomian sumber penghasilan masyarakat Kabupaten Malang sangat heterogen, tetapi mayoritas bekerja di sektor agrobisnis yang meliputi: pertanian, perkebunan dan peternakan.

#### **4.2 Contoh Desa Pengguna Websaite**

##### **4.2.1 Desa Kemamang Kabupaten Bojonegoro**

Desa Kemamang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Letak Geografis desa Kemamang berada di wilayah Timur Kabupaten Bojonegoro. Keseharian masyarakat Desa Kemamang adalah bercocok tanam, bertani , buruh tani, peternak

sapi dan peternak kambing, bangunan dan buruh yang lainnya. Mengingat keadaan wilayah desa Kemamang persawahan 80 persen dari luas Desa Kemamang. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Kemamang secara umum berupa persawahan pada ketinggian 14 meter di atas permukaan laut. Dengan suhu rata-rata 27 sampai dengan 30° Celcius, dan curah hujan 2.000-3.000 mm.

Berdasarkan data umum Desa Kemamang, jumlah penduduknya adalah 2.084 orang dengan jumlah 575 KK dengan luas wilayah 158,566 hektar.

Jarak tempuh Desa Kemamang ke ibu kota Kecamatan Balen yaitu sekitar 3 kilometer. Sedang jarak ke ibu kota Kabupaten Bojonegoro adalah sekitar 12 kilometer.

Secara administratif, Desa Kemamang dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Suwaloh. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Kabunan dan Desa Ngadiluhur. Di sisi selatan berbatasan dengan Desa Sidobandung dan Desa Mayangkawis, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Bulu.

**Gambar 4.1 Website Desa Kemamang**



#### 4.2.2 Desa Pucangro Kabupaten Lamongan

Desa Pucangro merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Profinsi Jawa Timur. Desa Pucangro secara geografis merupakan dataran rendah yang terletak diketinggian laut 1,25 m. Terletak disebelah selatan pusat Kecamatan Kalitengah dengan jarak 10 km dan berada disebelah utara pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan yang berjarak 17 km.

Batas- batas wilaya administrasi Desa Pucangro adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Pucangtelu Kec. Kalitengah & Desa Sungelebak Kec. Karanggeneng
- Sebelah Selatan : Desa Geger Kec. Turi & Desa Banjarmasin Kec. Karanggeneng
- Sebelah Barat : Desa Kalanganyar Kec. Karanggeneng
- Sebelah Timur : Desa Karangwedoro Kec. Turi

Wilayah Desa Pucangro memiliki luas 218,42 Ha M<sup>2</sup> dan terdiri atas pemukiman, sawah, dll. Luas wilayah masing-masing adalah sebagai berikut :

- Sawah dan tambak : 187 Ha
- Jalan : 5,2 Ha
- Pemukiman : 28 Ha
- Pasar : 1 Ha
- Pemakaman/kuburan : 0,5 Ha
- Lain-lain : 1,92 Ha

Kondisi alam Desa Pucangro di pengaruhi oleh iklim tropis dengan 2 musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan pertahunnya adalah 229 mm dengan suhu rata-rata tiap hari adalah 25 hingga 32 derajat celcius.

**Gambar 4.2 Website Desa Pucangro**



### 4.2.3 Desa Purwoharjo Kabupaten Malang

Desa Purwoharjo merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang yang merupakan Desa yang terdiri dari 1 perdukuan , 2 Perdukuan dan 10 Rt , yang sangat berpotensi untk pengembangan kesejahteraan social dan perekonomian masyarakat. Kondisi diatas diperlukan adanya perbaikan sarana sarana yang memadai yaitu perbaikan jalan, jembatan , penambahan lokasi gedung untuk sekolah , air bersih dan lain lain yang sekiranya nanti akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidup.

#### a. Geografi

Kondisi geografis Desa purwoharjo dengan kontur tanah berbukit bukit pada ketinggian 475 M dPl dan memiliki ciurah hujan yang cukup tinggi . Batas Batas Desa sebagai berikut:

Utara	: Desa Tirtomoyo dan Sidorenggo
Barat	: Desa Tirtomarto
Selatan	: Desa Lebakharjo
Timur	: Desa Sidorenggo Dan Kabupaten Lumajang

Luas Wilayah Desa purwoharjo adalah 210 Ha. Dengan perincian senagai berikut

Tanah sawah	: 15 Ha
Tanah Tegalan	: 123 Ha
Tanah Perkebunan	: - Ha
Lain Lain	: 72 Ha

#### b. Demografis

Desa Purwoharjo Secara Kondisi Demografis sebagai berikut

- Perdukuan : 1 dukuh
- RW : 2 Rw
- RT : 10 Rt
- Jumlah KK : 541 KK
- Jumlah Penduduk : 1857 Kiwa

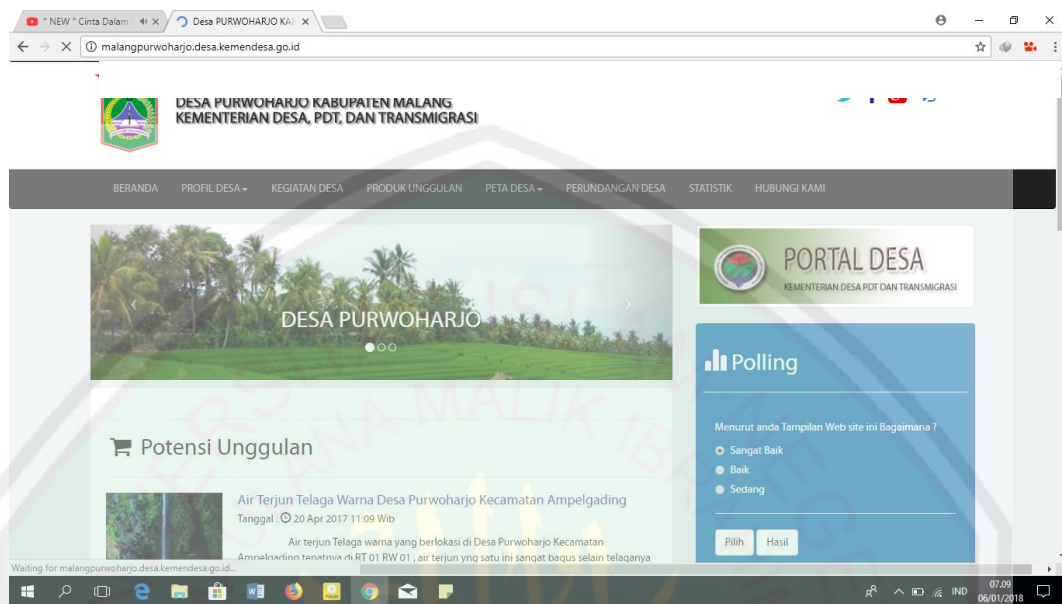
#### Terdiri Dari

- Laki Laki : 956 jiwa
- Perempuan : 901 Jiwa

#### c. Mata Pencaharian

- Petani : 318 Jiwa
- Buruh Tani : 181 Jiwa
- Pengusaha : 1 Jiwa
- Pengrajin : - Jiwa
- Pedagang : 27 Jiwa
- Peternak : 2 Jiwa
- PNS : 4 Jiwa
- TNI/Polri : 1 Jiwa
- Usaha Trnsportasi : 6 Jiwa
- Tukang Kayu : 29 Jiwa
- Tukang Batu : 47 Jiwa
- Pensiunan : 4 Jiwa

**Gambar 4.3 Website Desa Purwoharjo**



### 4.3 Analisis Data dan Pembahasan

#### 4.3.1 Deskripsi Data

Data dalam penelitian ini ada 1.259 lembaga pemerintah desa yang menjadi sumber data penelitian ini, dari data tersebut dapat dibagi menjadi 3 kelompok kabupaten, adapun uraian seperti yang dijelaskan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1

3 Kabupaten Penerima Dana ADD Terbesar di Jawa Timur

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Presentase
1	Kabupaten Lamongan	462	37,409%
2	Kabupaten Bojonegoro	395	31,983%
3	Kabupaten Lamongan	378	30,607%
Total		1.235	100%

Berdasarkan tabel 4.2 kelompok lembaga pemerintah desa berjumlah 1.259 dapat diuraikan bahwa, 1. Kabupaten lamongan berjumlah 462 (37,409%) Desa, 2.

Kabupaten bojonegoro berjumlah 395 (31,983%) Desa, 3. Kabupaten malang berjumlah 378 (30,607%) Desa dan kabupaten terbanyak yang mempunyai desa adalah bojonegoro dan yang paling sedikit memiliki desa adalah kabupaten malang.

Data penelitian dianalisa dalam jangka waktu  $\pm$  4 minggu, terhitung mulai tanggal 1 juli 2017 sampai dengan 1 agustus 2017. Sedangkan analisa penggunaan internet oleh lembaga pemerintah desa dilakukan dengan menggunakan fasilitas *search engines* yaitu *yahoo* dan *google*, dengan memasukkan nama-nama desa di 3 kabupaten.

Penelitian dianalisa dengan beberapa tahapan, tahapan tersebut yaitu:

1. Ketersediaan dan penggunaan *website* pada lembaga pemerintah desa
2. Penggunaan *website* untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dan informasi-informasi dari lembaga pemerintah desa.
3. Analisis ketepatan waktu informasi tambahan (berita)
4. Analisis teknologi dan Analisis fitur dukungan pengguna *website*. Analisis pada tahap ini meliputi beberapa kriteria, yaitu:
  - a) Kecepatan membuka *website*
  - b) Ketersediaan *JAVA*
  - c) *Eksternal links*
  - d) Fitur *Search*
  - e) Alamat dan *contact person*
  - f) *Frame*
  - g) *Pull down*

h) *Site map*

5. Perspektif Keislaman

#### **4.3.2 Analisis Data**

##### **4.3.2.1 Ketersediaan dan Penggunaan Website**

Penelitian yang dilakukan melalui fasilitas *search engines* (*yahoo dan google*) dikarenakan situs google atau yahoo sudah dipakai oleh masyarakat luas terutama pengguna internet dan mudah mendapatkan informasi yang dicari. Dengan fasilitas *search engines* ini penulis mencari alamat *website* masing-masing pemerintah desa dengan memasukkan nama desa tersebut ke dalam *search engines*.

##### **A. Kabupaten Lamongan**

Tahap pertama mengobservasi nama-nama desa dengan fasilitas *search engines* yaitu *yahoo dan google* penulis mencari alamat *website* masing-masing desa dengan memasukkan nama desa tersebut ke dalam *search engines*. Dapat dijelaskan hasil observasi data pada tabel berikut:

Tabel 4.2

## Daftar Nama-nama desa kabupaten lamongan

No	Nama Desa	Website		No	Nama Desa	Website	
		Ada	Tidak			Ada	Tidak
1	Desa Bedahan		√	19	Desa Trepan		√
2	Desa Bulumargi	√		20	Desa Tritunggal		√
3	Desa Datinawong		√	21	Desa Truni		√
4	Desa Gembong		√	22	Desa Banjargondang		√
5	Desa Gendongkulon		√	23	Desa Bluluk		√
6	Desa Karangembang		√	24	Desa Bronjong		√
7	Desa Kebalandono		√	25	Desa Cangkring		√
8	Desa Kebalanpelang		√	26	Desa Kuwurejo		√
9	Desa Kebonagung		√	27	Desa Primpen		√
10	Desa Keyongan		√	28	Desa Songowareng		√
11	Desa Kuripan		√	29	Desa Sumberbanjar		√
12	Desa Moropelang		√	30	Desa Talunrejo		√
13	Desa Patihan		√	31	Desa Brengkok		√
14	Desa Plaosan		√	32	Desa Labuhan		√
15	Desa Pucakwangi		√	33	Desa Lembor		√
16	Desa Sambangan		√	34	Desa Lohgung		√
17	Desa Sogo		√	35	Desa Sedayulawas		√
18	Desa Sumurgenuk		√	36	Desa Sendangharjo		√

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.2

## Daftar Nama-nama desa kabupaten lamongan

No	Nama Desa	Website		No	Nama Desa	Website	
		Ada	Tidak			Ada	Tidak
36	Desa Sendangharjo		√	56	Desa Weduni		√
37	Desa Sidomukti		√	57	Desa Bangkok		√
38	Desa Sumberagung		√	58	Desa Bapuhbandung		√
39	Desa Tlogoretno		√	59	Desa Bapuhbaru		√
40	Desa Babatagung		√	60	Desa Began		√
41	Desa Deketkulon		√	61	Desa Duduklor		√
42	Desa Deketwetan		√	62	Desa Dukuhtunggal		√
43	Desa Dinoyo		√	63	Desa Gempolpendowo		√
44	Desa Dlanggu		√	64	Desa Glagah		√
45	Desa Laladan		√	65	Desa Jatirenggo		√
46	Desa Pandanpancur		√	66	Desa Karangagung		√
47	Desa Plosobuden		√	67	Desa Karangturi		√
48	Desa Rejosari		√	68	Desa Kentong		√
49	Desa Rejotengah		√	69	Desa Konang		√
50	Desa Sidobinangun		√	70	Desa Margoanyar		√
51	Desa Sidomulyo		√	71	Desa Medang		√
52	Desa Sidorejo		√	72	Desa Meluntur		√
53	Desa Srirande		√	73	Desa Meluwur		√
36	Desa Sendangharjo		√	74	Desa Mendogo		√
37	Desa Sidomukti		√	75	Desa Menganti		√
38	Desa Sumberagung		√	76	Desa Morocalan		√
39	Desa Tlogoretno		√	77	Desa Panggang		√
40	Desa Babatagung		√	78	Desa Pasi		√
41	Desa Deketkulon		√	79	Desa Rayunggumuk		√
42	Desa Deketwetan		√	80	Desa Soko	√	
43	Desa Dinoyo		√	81	Desa Sudangan		√
44	Desa Dlanggu		√	82	Desa Tanggungprigel		√
45	Desa Laladan		√	83	Desa Wangen		√
46	Desa Pandanpancur		√	84	Desa Wedoro		√
47	Desa Plosobuden		√	85	Desa Wonorejo		√
48	Desa Rejosari		√	86	Desa Blajo		√
49	Desa Rejotengah		√	87	Desa Bojoasri		√
50	Desa Sidobinangun		√	88	Desa Butungan		√
51	Desa Sidomulyo		√	89	Desa Canditunggal		√
52	Desa Sidorejo		√	90	Desa Cluring		√
53	Desa Srirande		√	91	Desa Dibee		√
54	Desa Sugihwaras		√	92	Desa Gambuhan		√
55	Desa Tukkerto		√	93	Desa Jelacatur		√

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.2

## Daftar Nama-nama desa kabupaten lamongan

No	Nama Desa	Website		No	Nama Desa	Website	
		Ada	Tidak			Ada	Tidak
94	Desa Kalitengah	√		133	Desa Karanggeneng		√
95	Desa Kediren		√	134	Desa Karangrejo		√
96	Desa Kuluran		√	135	Desa Karangwungu		√
97	Desa Lukrejo		√	136	Desa Kawistolegi		√
98	Desa Mungli		√	137	Desa Kendalkemlagi		√
99	Desa Pengangsalan		√	138	Desa Latukan	√	
100	Desa Pucangro	√		139	Desa Mertani		√
101	Desa Pucangtelu		√	140	Desa Prijekngablak		√
102	Desa Somosari		√	141	Desa Sonoadi		√
103	Desa Sugihwaras		√	142	Desa Sumberwudi		√
104	Desa Tiwet		√	143	Desa Sungelebak		√
105	Desa Tunjungmekar		√	144	Desa Tracal		√
106	Desa Banjarejo		√	145	Desa Banjarejo		√
107	Desa Banyuurip		√	146	Desa Blawirejo		√
108	Desa Baranggayam		√	147	Desa Dradahblumbang		√
109	Desa Blawi		√	148	Desa Gunungrejo		√
110	Desa Bogobabadan		√	149	Desa Jatidrojog		√
111	Desa Gawerejo		√	150	Desa Kalen		√
112	Desa Karanganom		√	151	Desa Kandangrejo	√	
113	Desa Karangbinangun		√	152	Desa Karangcangkring		√
114	Desa Ketapangtelu		√	153	Desa Kedungpring		√
115	Desa Kuro		√	154	Desa Kradenanrejo		√
116	Desa Mayong		√	155	Desa Maindu		√
117	Desa Palangan		√	156	Desa Majenang		√
118	Desa Pendowolimo		√	157	Desa Mekanderejo		√
119	Desa Priyoso		√	158	Desa Mlati		√
120	Desa Putatbangah		√	159	Desa Mojodadi		√
121	Desa Sambopinggir		√	160	Desa Nglebur		√
122	Desa Somowinangun		√	161	Desa Sidobangun		√
123	Desa Sukorejo		√	162	Desa Sidomlagean		√
124	Desa Waruk		√	163	Desa Sukomalo		√
125	Desa Watangpanjang		√	164	Desa Sumengko		√
126	Desa Windu		√	165	Desa Tenggerejo		√
127	Desa Banjarmadu		√	166	Desa Tlanak		√
128	Desa Bantengputih		√	167	Desa Warungring		√
129	Desa Guci		√	168	Desa Doyomulyo		√
130	Desa Jagran		√	169	Desa Dumpiangung		√
131	Desa Kalanganyar	√		170	Desa Gintungan		√
132	Desa Kaligerman	√		171	Desa Klemas		√

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.2

## Daftar Nama-nama desa kabupaten lamongan

No	Nama Desa	Website		No	Nama Desa	Website	
		Ada	Tidak			Ada	Tidak
172	Desa Kaliwates		√	211	Desa Laren		√
173	Desa Kedungasri		√	212	Desa Mojoasem		√
174	Desa Kedungmegarih		√	213	Desa Pelangwot		√
175	Desa Kembangbahu		√	214	Desa Pesanggrahan		√
176	Desa Lopang		√	215	Desa Siser		√
177	Desa Mangkujajar		√	216	Desa Tamanprijeg		√
178	Desa Maor		√	217	Desa Tejoasri		√
179	Desa Moronyamplung		√	218	Desa Blumbang		√
180	Desa Pelang		√	219	Desa Brumbun		√
181	Desa Puter		√	220	Desa Duriwetan	√	
182	Desa Randubener		√	221	Desa Gedangan		√
183	Desa Sidomukti		√	222	Desa Gumantuk		√
184	Desa Sukosongo		√	223	Desa Jangkungsomo		√
185	Desa Tlogoagung		√	224	Desa Kanugrahan		√
186	Desa Karanglangit		√	225	Desa Klagensrampat		√
187	Desa Kebet		√	226	Desa Maduran		√
188	Desa Kramat		√	227	Desa Ngayung	√	
189	Desa Made		√	228	Desa Pangean		√
190	Desa Pangkatrejo		√	229	Desa Pangkatrejo		√
191	Desa Plosowahyu		√	230	Desa Parengan		√
192	Desa Rancangkencono		√	231	Desa Pringgoboyo		√
193	Desa Sendangrejo		√	232	Desa Siwuran		√
194	Desa Sidomukti		√	233	Desa Taji		√
195	Desa Sumberjo		√	234	Desa Turi		√
196	Desa Tanjung		√	235	Desa Kedukbembem		√
197	Desa Wajik		√	236	Desa Kedungsoko		√
198	Desa Brangsi		√	237	Desa Mantup		√
199	Desa Bulubrangsi		√	238	Desa Mojosari		√
200	Desa Bulutigo		√	239	Desa Plabuhanrejo		√
201	Desa Centini		√	240	Desa Rumpuk		√
202	Desa Dateng		√	241	Desa Sidomulyo		√
203	Desa Durikulon		√	242	Desa Sukobendu		√
204	Desa Gampangsejati		√	243	Desa Sukosari		√
205	Desa Gelap		√	244	Desa Sumberagung		√
206	Desa Godog		√	245	Desa Sumberbendo	√	
207	Desa Jabung	√		246	Desa Sumberdadi		√
208	Desa Karangtawar		√	247	Desa Sumberkerep		√
209	Desa Karangwungulor		√	248	Desa Tugu		√
210	Desa Keduyung		√	249	Desa Tunggunjagir	√	

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.2

## Daftar Nama-nama desa kabupaten lamongan

No	Nama Desa	Website		No	Nama Desa	Website	
		Ada	Tidak			Ada	Tidak
250	Desa Jatipayak		√	289	Desa Kemantren		√
251	Desa Jegreg		√	290	Desa Kranji		√
252	Desa Kacangan		√	291	Desa Paciran		√
253	Desa Kedunglerep		√	292	Desa Paloh		√
254	Desa Kedungpengaron		√	293	Desa Sendangagung	√	
255	Desa Kedungrejo		√	294	Desa Sendangduwur		√
256	Desa Kedungwaras		√	295	Desa Sidokelar		√
257	Desa Medalem		√	296	Desa Sidokumpul		√
258	Desa Mojorejo		√	297	Desa Sumurgayam		√
259	Desa Nguwok		√	298	Desa Tlogosadang		√
260	Desa Pule		√	299	Desa Tunggul		√
261	Desa Sambangrejo		√	300	Desa Warulor	√	
262	Desa Sambungrejo		√	301	Desa Weru	√	
263	Desa Sidodowo		√	302	Desa Babatkumpul		√
264	Desa Sidomulyo		√	303	Desa Bogoharjo		√
265	Desa Sumberagung		√	304	Desa Cungkup		√
266	Desa Yungyang		√	305	Desa Gempolpading		√
267	Desa Cerme		√	306	Desa Karangtinggil		√
268	Desa Drujugurit		√	307	Desa Kedali		√
269	Desa Durikedungrejo		√	308	Desa Kesambi		√
270	Desa Ganggangtingan		√	309	Desa Ngambeg		√
271	Desa Gebangangkrik		√	310	Desa Padenganploso		√
272	Desa Girik		√	311	Desa Paji		√
273	Desa Jejel		√	312	Desa Plososetro		√
274	Desa Kakatpenjalin		√	313	Desa Pucuk		√
275	Desa Kedungmentawar		√	314	Desa Sumberjo		√
276	Desa Lamongrejo		√	315	Desa Tanggungan		√
277	Desa Lawak		√	316	Desa Wanar		√
278	Desa Mendogo		√	317	Desa Warukulon	√	
279	Desa Munungrejo		√	318	Desa Waruwetan		√
280	Desa Ngasemlehambang		√	319	Desa Ardirejo		√
281	Desa Ngimbang		√	320	Desa Barurejo		√
282	Desa Purwokerto		√	321	Desa Candisari		√
283	Desa Sendangrejo		√	322	Desa Garung		√
284	Desa Slaharwotan		√	323	Desa Gempolmanis		√
285	Desa Tlemang		√	324	Desa Jatipandak		√
286	Desa Banjarwati		√	325	Desa Kedungbanjar		√
287	Desa Drajat		√	326	Desa Kedungwangi		√
288	Desa Drajat		√	327	Desa Kreteranggon	√	

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.2

## Daftar Nama-nama desa kabupaten lamongan

No	Nama Desa	Website		No	Nama Desa	Website	
		Ada	Tidak			Ada	Tidak
328	Desa Nogojatisari		√	367	Desa Siman		√
329	Desa Pamotan		√	368	Desa Sungegeneng		√
330	Desa Pasarlegi		√	369	Desa Titik		√
331	Desa Pataan		√	370	Desa Trosono		√
332	Desa Sekidang		√	371	Desa Banyubang		√
333	Desa Selorejo	√		372	Desa Bluri		√
334	Desa Semampirejo		√	373	Desa Dadapan		√
335	Desa Sidokumpul		√	374	Desa Dagan		√
336	Desa Summersari		√	375	Desa Payaman	√	
337	Desa Tenggiring	√		376	Desa Solokuro		√
338	Desa Wateswinangun		√	377	Desa Sugihan		√
339	Desa Wonorejo		√	378	Desa Takerharjo		√
340	Desa Wudi		√	379	Desa Tebluru		√
341	Desa Beru	√		380	Desa Tenggulun		√
342	Desa Canggih		√	381	Desa Bakalrejo		√
343	Desa Dermolemahbang		√	382	Desa Bedingin	√	
344	Desa Gempoltukmloko		√	383	Desa Daliwangun		√
345	Desa Kedungkumpul		√	384	Desa Deketagung	√	
346	Desa Sarirejo		√	385	Desa German		√
347	Desa Simbatan		√	386	Desa Gondanglor		√
348	Desa Sumberjo		√	387	Desa Jubelkidul		√
349	Desa Tambakmenjangan		√	388	Desa Jubellor		√
350	Desa Besar		√	389	Desa Kalipang		√
351	Desa Bugel		√	390	Desa Kalitengah		√
352	Desa Bulutengger		√	391	Desa Karangsembigalih		√
353	Desa Jugo	√		392	Desa Kedungbanjar		√
354	Desa Karang		√	393	Desa Kedungdadi		√
355	Desa Kebalankulon		√	394	Desa Lawanganagung		√
356	Desa Kembangan	√		395	Desa Lebakadi		√
357	Desa Kendal		√	396	Desa Pangkatrejo		√
358	Desa Keting		√	397	Desa Sekarbagus		√
359	Desa Kudikan		√	398	Desa Sekarbagus		√
360	Desa Latek		√	399	Desa Sidorejo		√
361	Desa Manyar	√		400	Desa Sugio		√
362	Desa Miru		√	401	Desa Supenuh		√
363	Desa Moro		√	402	Desa Balongtawun		√
364	Desa Ngarum		√	403	Desa Bandungsari		√
365	Desa Porodeso		√	404	Desa Banjarejo		√
366	Desa Sekaran		√	405	Desa Baturono		√

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.2

## Daftar Nama-nama desa kabupaten lamongan

No	Nama Desa	Website		No	Nama Desa	Website	
		Ada	Tidak			Ada	Tidak
406	Desa Gedangan		√	445	Desa Balun		√
407	Desa Kadungrebug		√	446	Desa Bambang		√
408	Desa Kebonsari		√	447	Desa Gedungboyountung		√
409	Desa Madulegi	√		448	Desa Geger		√
410	Desa Menongo		√	449	Desa Karangwedoro		√
411	Desa Pajangan		√	450	Desa Keben		√
412	Desa Plumpang		√	451	Desa Kemplagigede		√
413	Desa Sidogembul		√	452	Desa Kemplagilor		√
414	Desa Siwalanrejo		√	453	Desa Kepudibener		√
415	Desa Sugihrejo		√	454	Desa Ngujungrejo	√	
416	Desa Sukodadi	√		455	Desa Pomahanjangan		√
417	Desa Sukolilo	√		456	Desa Putatkumpul		√
418	Desa Sumberagung		√	457	Desa Sukoanyar		√
419	Desa Sumberaji		√	458	Desa Sukorejo		√
420	Desa Surabayan		√	459	Desa Tambakploso		√
421	Desa Tlogorejo		√	460	Desa Tawangrejo		√
422	Desa Banggle		√	461	Desa Turi		√
423	Desa Kedungkumpul		√	462	Desa Wangunrejo		√
424	Desa Kedungrejo		√				
425	Desa Mragel		√				
426	Desa Pendowokumpul		√				
427	Desa Sembung		√				
428	Desa Sewor		√				
429	Desa Sukorame		√				
430	Desa Wedoro		√				
431	Desa Bakalanpule		√				
432	Desa Balongwangi		√				
433	Desa Botoputih		√				
434	Desa Dukuhagung		√				
435	Desa Gumingrejo		√				
436	Desa Jatirejo		√				
437	Desa Jotosanur		√				
438	Desa Keloraram		√				
439	Desa Pengumbulanadi		√				
440	Desa Soko		√				
441	Desa Takeranklating		√				
442	Desa Tambakrigadung		√				
443	Desa Wonokromo		√				
444	Desa Badurame		√				

Sumber: Data primer diolah sendiri

Dari hasil data penelitian pada tabel 4.2 terhadap 462 desa dikabupaten lamongan didapatkan bahwa 31 (6,709%) *website* pemerintah desa tersebut dapat diakses dengan baik, dan ditemukan 431 (93,290%) pemerintah desa tidak memiliki *website*. Lebih jelas dapat dilihat pada diagram dan tabel berikut:

Tabel 4.3  
Ringkasan Tabel 4.2

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Desa Pemakai <i>Website</i>	31	6,709%
2	Desa Yang Tidak Memakai <i>Website</i>	431	93,290%
Jumlah		462	100%

Gambar 4.4  
Desa Pemakai *Website* di Lamongan



## B. Kabupaten Bojonegoro

Tahap pertama mengobservasi nama-nama desa dengan fasilitas *search engines* yaitu *yahoo* dan *google* penulis mencari alamat *website* masing-masing

desa dengan memasukkan nama desa tersebut ke dalam *search engines*. Dapat dijelaskan hasil observasi data pada tabel berikut:

Tabel 4.4  
Daftar Nama-nama Desa Kabupaten Bojonegoro

No	Nama Desa	Website		No	Nama Desa	Website	
		Ada	Tidak			Ada	Tidak
1	Desa Balenrejo	√		28	Desa Bumiayu		√
2	Desa Bulaklo		√	29	Desa Drajat		√
3	Desa Bulu		√	30	Desa Gajah		√
4	Desa Kabunan		√	31	Desa Gunungsari		√
5	Desa Kedungbendo		√	32	Desa Kalisari		√
6	Desa Kedungdowo		√	33	Desa Karangdayu		√
7	Desa Kemamang	√		34	Desa Kauman		√
8	Desa Kenep	√		35	Desa Kedungrejo		√
9	Desa Lengkong		√	36	Desa Lebaksari		√
10	Desa Margomulyo	√		37	Desa Ngeplak		√
11	Desa Mayangkawis		√	38	Desa Pamohan		√
12	Desa Mulyoagung		√	39	Desa Pasinan	√	
13	Desa Mulyorejo		√	40	Desa Pucungarum		√
14	Desa Ngadiluhur		√	41	Desa Selorejo		√
15	Desa Penganten	√		42	Desa Sembunglor	√	
16	Desa Pilanggede		√	43	Desa Sratujejo		√
17	Desa Pohbogo		√	44	Desa Sumuragung		√
18	Desa Prambatan		√	45	Desa Tanggungan		√
19	Desa Prambatan		√	46	Desa Tlogoagung		√
20	Desa Sekaran		√	47	Desa Trojalu		√
21	Desa Sidobandung	√		48	Desa Tulungagung		√
22	Desa Subontoro		√	49	Desa Campurejo	√	
23	Desa Suwaloh		√	50	Desa Kalirejo		√
24	Desa Banjaran		√	51	Desa Kauman		√
25	Desa Banjaranyar		√	52	Desa Mulyoagung		√
26	Desa Baureno		√	53	Desa Pacul		√
27	Desa Blongsong	√		54	Desa Semanding		√

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.4  
Daftar Nama-nama Desa Kabupaten Bojonegoro

No	Nama Desa	Website		No	Nama Desa	Website	
		Ada	Tidak			Ada	Tidak
55	Desa Sukorejo	√		94	Desa Sambongrejo		√
56	Desa Bubulan		√	95	Desa Senganten		√
57	Desa Cancung		√	96	Desa Brenggolo		√
58	Desa Clebung		√	97	Desa Grebegan		√
59	Desa Ngorogunung		√	98	Desa Kalitidu		√
60	Desa Sumberbendo		√	99	Desa Leran		√
61	Desa Dander	√		100	Desa Mayanggeneng	√	
62	Desa Growak		√	101	Desa Mayangrejo	√	
63	Desa Jatiblimbing		√	102	Desa Mlaten		√
64	Desa Karangsono		√	103	Desa Mojo		√
65	Desa Kunci		√	104	Desa Mojosari		√
66	Desa Mojaranu	√		105	Desa Ngiringinrejo		√
67	Desa Ngablak		√	106	Desa Ngujo		√
68	Desa Ngraseh	√		107	Desa Panjunan		√
69	Desa Ngulanan		√	108	Desa Pilangsari		√
70	Desa Ngumpakdalem		√	109	Desa Pungpungan	√	
71	Desa Ngunut	√		110	Desa Sukoharjo	√	
72	Desa Sendangrejo		√	111	Desa Sumengko		√
73	Desa Somodikaran		√	112	Desa Talok		√
74	Desa Sumberagung	√		113	Desa Wotanngare		√
75	Desa Sumberarum	√		114	Desa Bakung		√
76	Desa Sumbertlaseh		√	115	Desa Bungur		√
77	Desa Begadon		√	116	Desa Cangakan		√
78	Desa Beged		√	117	Desa Caruban		√
79	Desa Bonorejo		√	118	Desa Gedongarum		√
80	Desa Brabowan		√	119	Desa Kabalan		√
81	Desa Cengungklung		√	120	Desa Kanor		√
82	Desa Gayam	√		121	Desa Kedungprimpen		√
83	Desa Katur	√		122	Desa Nglaranga		√
84	Desa Manukan		√	123	Desa Palembang		√
85	Desa Mojodelik		√	124	Desa Pesen		√
86	Desa Ngraho		√	125	Desa Pilang		√
87	Desa Ringintunggal		√	126	Desa Piyak		√
88	Desa Sudu	√		127	Desa Prigi		√
89	Desa Gondang		√	128	Desa Samberan		√
90	Desa Jari		√	129	Desa Sarangan		√
91	Desa Krononon		√	130	Desa Sedeng		√
92	Desa Pajeng		√	131	Desa Semambung		√
93	Desa Paragelan		√	132	Desa Simbatan		√

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.4  
Daftar Nama-nama Desa Kabupaten Bojonegoro

No	Nama Desa	Website		No	Nama Desa	Website	
		Ada	Tidak			Ada	Tidak
133	Desa Simorejo	√		172	Desa Kawengan		√
134	Desa Sroyo		√	173	Desa Kedewan		√
135	Desa Sumberwangi		√	174	Desa Wonocolo		√
136	Desa Tambahrejo		√	175	Desa Babad		√
137	Desa Tejo		√	176	Desa Balongcabe		√
138	Desa Temu	√		177	Desa Dayukkidul		√
139	Desa Bakalan		√	178	Desa Drokilo		√
140	Desa Bangilan		√	179	Desa Duwel	√	
141	Desa Bendo		√	180	Desa Geger		√
142	Desa Bogo	√		181	Desa Jamberejo		√
143	Desa Kalianyar		√	182	Desa Kedungdalem		√
144	Desa Kapas		√	183	Desa Kedungejo		√
145	Desa Kedaton		√	184	Desa Kendung		√
146	Desa Klampok	√		185	Desa Kepohkidul		√
147	Desa Kumpulrejo		√	186	Desa Kesongo		√
148	Desa Mojodeso		√	187	Desa Megale	√	
149	Desa Ngampel	√		188	Desa Mlideg		√
150	Desa Padang mentoyo		√	189	Desa Mojorejo		√
151	Desa Plesungan	√		190	Desa Ngrandu		√
152	Desa Sambiroto	√		191	Desa Panjang		√
153	Desa Sembung		√	192	Desa Pejok		√
154	Desa Semenpinggir		√	193	Desa Sidomulyo		√
155	Desa Sukowati		√	194	Desa Sidorejo		√
156	Desa Tanjung Harjo		√	195	Desa Tlogoagung		√
157	Desa Tapelan		√	196	Desa Tondomulo		√
158	Desa Tikusan		√	197	Desa Trumbrasanom		√
159	Desa Wedi	√		198	Desa Balongdowo		√
160	Desa Basah		√	199	Desa Bayemgede		√
161	Desa Batokan		√	200	Desa Betet		√
162	Desa Betet		√	201	Desa Brangkal		√
163	Desa Kasiman		√	202	Desa Brangkal		√
164	Desa Ngaglik		√	203	Desa Cengkir		√
165	Desa Sambeng		√	204	Desa Jipo		√
166	Desa Sekaran		√	205	Desa Karanggang		√
167	Desa Sidomukti		√	206	Desa Kepoh		√
168	Desa Tambakmerak		√	207	Desa Krangkong	√	
169	Desa Tembeling		√	208	Desa Mojosari		√
170	Desa Beji		√	209	Desa Mudung		√
171	Desa Hargomulyo		√	210	Desa Nglumber		√

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.4  
Daftar Nama-nama Desa Kabupaten Bojonegoro

No	Nama Desa	Website		No	Nama Desa	Website	
		Ada	Tidak			Ada	Tidak
211	Desa Ngranggonanya		√	250	Desa Karangmangu		√
212	Desa Pejok		√	251	Desa Ngambon	√	
213	Desa Pohwates		√	252	Desa Nglamping		√
214	Desa Sidomukti		√	253	Desa Sengon	√	
215	Desa Simorejo	√		254	Desa Bandungrejo		√
216	Desa Suberoto		√	255	Desa Bareng	√	
217	Desa Sugih Waras		√	256	Desa Butoh		√
218	Desa Sumberagung	√		257	Desa Dukuhkidul		√
219	Desa Sumbergede		√	258	Desa Jampet		√
220	Desa Tlogorejo	√		259	Desa Jelu	√	
221	Desa Turigede		√	260	Desa Kolong		√
222	Desa Woro		√	261	Desa Mediyunan		√
223	Desa Banaran		√	262	Desa Ngadiluwih		√
224	Desa Banaran		√	263	Desa Ngantru		√
225	Desa Kacangan		√	264	Desa Ngasem	√	
226	Desa Kedungrejo		√	265	Desa Sambong		√
227	Desa Kemiri		√	266	Desa Sendangharjo		√
228	Desa Ketileng		√	267	Desa Setren		√
229	Desa Kliteh		√	268	Desa Tengger		√
230	Desa Malo		√	269	Desa Trenggulangan		√
231	Desa Ngujung		√	270	Desa Wadang		√
232	Desa Petak		√	271	Desa Bancer		√
233	Desa Rendeng	√		272	Desa Blimbinggede		√
234	Desa Semiaran		√	273	Desa Jumok		√
235	Desa Sudah		√	274	Desa Kalirejo		√
236	Desa Sukorejo	√		275	Desa Klempun		√
237	Desa Sumberjo	√		276	Desa Luwihaji		√
238	Desa Tambakromo		√	277	Desa Mojorejo		√
239	Desa Tanggir		√	278	Desa Nganti		√
240	Desa Tinawun		√	279	Desa Ngraho		√
241	Desa Trembes		√	280	Desa Pandan		√
242	Desa Tulungagung		√	281	Desa Payaman		√
243	Desa Geneng	√		282	Desa Sugihwaras		√
244	Desa Kalangan	√		283	Desa Sumber Agung		√
245	Desa Margomulyo		√	284	Desa Sumberarum	√	
246	Desa Meduri	√		285	Desa Tanggungan	√	
247	Desa Ngelo	√		286	Desa Tapelan		√
248	Desa Sumberrejo		√	287	Desa Banjarejo		√
249	Desa Bondol	√		288	Desa Cendono		√

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.4  
Daftar Nama-nama Desa Kabupaten Bojonegoro

No	Nama Desa	Website		No	Nama Desa	Website	
		Ada	Tidak			Ada	Tidak
289	Desa Dengok		√	328	Desa Glagahwangi		√
290	Desa Kebonagung		√	329	Desa Jatitengah		√
291	Desa Kendung		√	330	Desa Kedungdowo		√
292	Desa Kuncen		√	331	Desa Nglajang		√
293	Desa Ngasinan		√	332	Desa Panemon		√
294	Desa Ngeper		√	333	Desa Panunggalan		√
295	Desa Ngradin		√	334	Desa Siwalan		√
296	Desa Nguken		√	335	Desa Sugihwaras		√
297	Desa Padangan		√	336	Desa Trate		√
298	Desa Prangi		√	337	Desa Wedoro		√
299	Desa Purworejo		√	338	Desa Duyungan		√
300	Desa Sidorejo		√	339	Desa Jumput		√
301	Desa Sonorejo		√	340	Desa Kalicilik	√	
302	Desa Tebon		√	341	Desa Klepek	√	
303	Desa Donan		√	342	Desa Pacing		√
304	Desa Gapluk		√	343	Desa Purwoasri		√
305	Desa Kaliombo		√	344	Desa Semawot		√
306	Desa Kuniran		√	345	Desa Semenkidul		√
307	Desa Ngrejeng		√	346	Desa Sidodadi		√
308	Desa Pelem		√	347	Desa Sidorejo		√
309	Desa Pojok		√	348	Desa Sitiaji		√
310	Desa Punggur		√	349	Desa Sukosewu		√
311	Desa Purwosari		√	350	Desa Sumberejo Kidul		√
312	Desa Sedah Kidul	√		351	Desa Tegalkodo		√
313	Desa Tinumpuk		√	352	Desa Banjarrejo	√	
314	Desa Tlatah		√	353	Desa Bogangin		√
315	Desa Bareng		√	354	Desa Butoh		√
316	Desa Bobol	√		355	Desa Deru		√
317	Desa Deling		√	356	Desa Jatigede		√
318	Desa Klino	√		357	Desa Karangdinoyo		√
319	Desa Miyono		√	358	Desa Karangdowo		√
320	Desa Sekar		√	359	Desa Kayulemah		√
321	Desa Alasgung		√	360	Desa Kedungrejo		√
322	Desa Balongrejo		√	361	Desa Margoagung		√
323	Desa Bareng		√	362	Desa Mejuwet		√
324	Desa Bulu	√		363	Desa Mlinjeng		√
325	Desa Drenes		√	364	Desa Ngampal		√
326	Desa Genjor		√	365	Desa Pejambon		√
327	Desa Glagahan	√		366	Desa Pekuwon		√

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.4

## Daftar Nama-nama Desa Kabupaten Bojonegoro

No	Nama Desa	Website	
		Ada	Tidak
367	Desa Prayungan		√
368	Desa Sambongrejo		√
369	Desa Sendangagung		√
370	Desa Sumberharjo		√
371	Desa Sumberrejo		√
372	Desa Sumuragung		√
373	Desa Talun		√
374	Desa Teleng		√
375	Desa Tlogohaji		√
376	Desa Tulungrejo	√	
377	Desa Waton		√
378	Desa Bakalan	√	
379	Desa Dolokgede		√
380	Desa Gading		√
381	Desa Gamongan		√
382	Desa Jatimulyo		√
383	Desa Jawik		√
384	Desa Kacangan		√
385	Desa Kalisumber		√
386	Desa Malingmati		√
387	Desa Mulyorejo	√	
388	Desa Napis		√
389	Desa Ngrancang		√
390	Desa Pengkol		√
391	Desa Sendangrejo		√
392	Desa Sukerejo		√
393	Desa Tambakrejo		√
394	Desa Tanjung		√
395	Desa Turi		√

Sumber: Data primer diolah sendiri

Dari hasil data penelitian pada tabel 4.3 terhadap 395 desa dikabupaten bojonegoro didapatkan bahwa 64 (16,202%) *website* pemerintah desa tersebut dapat diakses dengan baik, dan ditemukan 329 (83,291%) pemerintah desa tidak memiliki *website*. Lebih jelas dapat dilihat pada diagram dan tabel berikut:

Tabel 4.5  
Ringkasan Tabel 4.4

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Desa Pemakai <i>Website</i>	64	16,202%
2	Desa Yang Tidak Memakai <i>Website</i>	329	83,291%
Jumlah		395	100%

Gambar 4.5  
Desa Pemakai *Website* di Bojonegoro



### C. Kabupaten Malang

Tahap pertama mengobservasi nama-nama desa dengan fasilitas *search engines* yaitu *yahoo dan google* penulis mencari alamat *website* masing-masing desa dengan memasukkan nama desa tersebut ke dalam *search engines*. Dapat dijelaskan hasil observasi data pada tabel berikut:

Tabel 4.6  
Daftar Nama-nama Desa Kabupaten Malang

No	Nama Desa	Website		No	Nama Desa	Website	
		Ada	Tidak			Ada	Tidak
1	Desa Argoyuwono		√	37	Desa Wandanpuro	√	
2	Desa Lebakharjo		√	38	Desa Amandanom		√
3	Desa Mulyoasri		√	39	Desa Baturetno		√
4	Desa Purwoharjo	√		40	Desa Bumirejo		√
5	Desa Sidorenggo	√		41	Desa Jambangan		√
6	Desa Simojayan		√	42	Desa Majangtengah		√
7	Desa Sonowangi		√	43	Desa Pamotan		√
8	Desa Tamanasri		√	44	Desa Pojok		√
9	Desa Tamansari		√	45	Desa Rembun		√
10	Desa Tawangagung		√	46	Desa Srimulyo		√
11	Desa Tirtomarto		√	47	Desa Sukodono		√
12	Desa Tirtomoyo		√	48	Desa Sumpersuko		√
13	Desa Wirotaman	√		49	Desa Gading Kulon		√
14	Desa Bandungrejo		√	50	Desa Kalisongo		√
15	Desa Bantur		√	51	Desa Karangwidoro		√
16	Desa Karang Sari		√	52	Desa Kucur		√
17	Desa Pringgondani		√	53	Desa Landungsari		√
18	Desa Rejosari		√	54	Desa Mulyoagung		√
19	Desa Rejoyoso		√	55	Desa Petungsewu		√
20	Desa Srigonco		√	56	Desa Selorejo		√
21	Desa Sumberbening		√	57	Desa Sumbersekar		√
22	Desa Wonokerto		√	58	Desa Tegalweru		√
23	Desa Wonorejo		√	59	Desa Banjarejo		√
24	Desa Bakalan		√	60	Desa Dono Mulyo		√
25	Desa Bululawang		√	61	Desa Kedungsalam		√
26	Desa Gading		√	62	Desa Mentaraman	√	
27	Desa Kasembon		√	63	Desa Purwodadi		√
28	Desa Kasri		√	64	Desa Purworejo		√
29	Desa Kerebet		√	65	Desa Sumberoto		√
30	Desa Kerebet Senggrenong		√	66	Desa Tempursari		√
31	Desa Kuwolu		√	67	Desa Tlogosari		√
32	Desa Lumbang Sari		√	68	Desa Tulung Rejo		√
33	Desa Pringu		√	69	Desa Gajahrejo	√	
34	Desa Sempalwadak		√	70	Desa Gedangan		√
35	Desa Sudimoro		√	71	Desa Girimulyo	√	
36	Desa Sukonolo		√	72	Desa Segaran	√	

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.6  
Daftar Nama-nama Desa Kabupaten Malang

No	Nama Desa	Website		No	Nama Desa	Website	
		Ada	Tidak			Ada	Tidak
73	Desa Sidodadi		√	112	Desa Sukowilangun		√
74	Desa Sidurejo		√	113	Desa Sumberpetung		√
75	Desa Sumberejo		√	114	Desa Tumpakrejo		√
76	Desa Tumpakrejo		√	115	Desa Ampeldento	√	
77	Desa Bulupitu		√	116	Desa Bocek		√
78	Desa Ganjaran		√	117	Desa Bonowarih		√
79	Desa Gondanglegi Kulon		√	118	Desa Girimoyo		√
80	Desa Gondanglegi Wetan		√	119	Desa Kepuharjo		√
81	Desa Ketawang		√	120	Desa Ngenep		√
82	Desa Panggungrejo		√	121	Desa Ngijo		√
83	Desa Putat Kidul	√		122	Desa Tawangargo		√
84	Desa Putat Lor		√	123	Desa Tegalgondo		√
85	Desa Putukrejo		√	124	Desa Bayem		√
86	Desa Sepanjang	√		125	Desa Kasembon		√
87	Desa Sukorejo		√	126	Desa Pait		√
88	Desa Sukosari		√	127	Desa Pondok Agung		√
89	Desa Sumberjaya		√	128	Desa Sukosari		√
90	Desa Urek Urek		√	129	Desa Wonoagung		√
91	Desa Argosari		√	130	Desa Curungrejo		√
92	Desa Gading Kembar		√	131	Desa Dilem		√
93	Desa Gunungjati		√	132	Desa Jatirejoso		√
94	Desa Jabung		√	133	Desa Jenggolo		√
95	Desa Kemantren		√	134	Desa Kedungpedaringan		√
96	Desa Kemiri		√	135	Desa Kemiri		√
97	Desa Kenongo		√	136	Desa Mangunrejo		√
98	Desa Ngadirejo		√	137	Desa Mojosari		√
99	Desa Pandansari Lor		√	138	Desa Ngadilangkung		√
100	Desa Samparejo		√	139	Desa Panggungrejo		√
101	Desa Sidomulyo		√	140	Desa Sengguruh		√
102	Desa Sidorejo		√	141	Desa Sukoharjo		√
103	Desa Sukolilo		√	142	Desa Talangagung		√
104	Desa Sukopuro	√		143	Desa Tegalsari		√
105	Desa Taji	√		144	Desa Jambuwer	√	
106	Desa Arjosari		√	145	Desa Jatikerto		√
107	Desa Arjowilangun		√	146	Desa Karangrejo		√
108	Desa Kaliasri		√	147	Desa Kromengan		√
109	Desa Kalipare		√	148	Desa Ngadirejo		√
110	Desa Kalirejo		√	149	Desa Peniwen		√
111	Desa Patuk Rejo		√	150	Desa Slorok		√

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.6  
Daftar Nama-nama Desa Kabupaten Malang

No	Nama Desa	Website		No	Nama Desa	Website	
		Ada	Tidak			Ada	Tidak
151	Desa Bedali		√	190	Desa Tlogorejo		√
152	Desa Ketindan		√	191	Desa Balarjo		√
153	Desa Mulyoarjo		√	192	Desa Banjarejo		√
154	Desa Sidodadi		√	193	Desa Brongkal		√
155	Desa Sidoluhur		√	194	Desa Clumpit		√
156	Desa Srigading		√	195	Desa Kademangan		√
157	Desa Sumbergepoh		√	196	Desa Kanigoro		√
158	Desa Sumberporong		√	197	Desa Karangsono		√
159	Desa Turi Rejo		√	198	Desa Pagelaran		√
160	Desa Wonorejo		√	199	Desa Sidorejo		√
161	Desa Babadan		√	200	Desa Suwaru		√
162	Desa Balesari		√	201	Desa Ampeldento		√
163	Desa Banjarsari		√	202	Desa Asrikaton		√
164	Desa Kesamben		√	203	Desa Banjarejo		√
165	Desa Kranggan		√	204	Desa Bunut Wetan		√
166	Desa Maguan		√	205	Desa Kedungrejo		√
167	Desa Ngajum		√	206	Desa Mangliawan		√
168	Desa Ngasem		√	207	Desa Pakis Ajar		√
169	Desa Palaan		√	208	Desa Pakis Kembar		√
170	Desa Banjarejo		√	209	Desa Pucangsono		√
171	Desa Banturejo		√	210	Desa Saptorenggo		√
172	Desa Jombok		√	211	Desa Sekarpuro	√	
173	Desa Kaumrejo		√	212	Desa Sukoanyar		√
174	Desa Mulyorejo		√	213	Desa Sumber Kradenan		√
175	Desa Ngantru		√	214	Desa Sumberpasir	√	
176	Desa Pagersari	√		215	Desa Tirtomoyo	√	
177	Desa Pandasari		√	216	Desa Gelanggang		√
178	Desa Purworejo		√	217	Desa Genangan		√
179	Desa Sidodadi		√	218	Desa Jatisari		√
180	Desa Sumberagung	√		219	Desa Karangduren		√
181	Desa Tulungrejo		√	220	Desa Karangpandan		√
182	Desa Waturejo	√		221	Desa Kebonagung		√
183	Desa Gampingan		√	222	Desa Kendal Payak		√
184	Desa Pagak		√	223	Desa Pakisaji		√
185	Desa Pandanrejo		√	224	Desa Permanu		√
186	Desa Sbr. Manjing Kulon		√	225	Desa Sutojayan		√
187	Desa Sempol		√	226	Desa Wadung		√
188	Desa Sumber Rejo		√	227	Desa Wonokerto		√
189	Desa Sumberkerto	√		228	Desa Argosuko	√	

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.6  
Daftar Nama-nama Desa Kabupaten Malang

No	Nama Desa	Website		No	Nama Desa	Website	
		Ada	Tidak			Ada	Tidak
229	Desa Belung		√	268	Desa Wonorejo		√
230	Desa Dawuhan		√	269	Desa Argotirto		√
231	Desa Gubugklakah		√	270	Desa Druju		√
232	Desa Jambesari		√	271	Desa Harjokuncaran		√
233	Desa Karanganyar		√	272	Desa Kedungbanteng		√
234	Desa Karangnongko		√	273	Desa Klepu	√	
235	Desa Ngadas	√		274	Desa Ringin Kembang		√
236	Desa Ngadirejo		√	275	Desa Ringinsari		√
237	Desa Ngebrug		√	276	Desa Sbr. Manjing Wetan		√
238	Desa Pajaran		√	277	Desa Sekarbanyu		√
239	Desa Pandansari		√	278	Desa Sidoasri		√
240	Desa Poncokusumo	√		279	Desa Sitarjo		√
241	Desa Sumberejo	√		280	Desa Sumberagung		√
242	Desa Wonomulyo		√	281	Desa Tambak Sari		√
243	Desa Wonorejo	√		282	Desa Tambakrejo		√
244	Desa Wringinanom	√		283	Desa Tegalrejo		√
245	Desa Bendosari		√	284	Desa Jatiguwi		√
246	Desa Madirejo		√	285	Desa Karangates		√
247	Desa Ngadab		√	286	Desa Ngebrug		√
248	Desa Ngroto		√	287	Desa Sambigede		√
249	Desa Pandensari		√	288	Desa Senggreng		√
250	Desa Pujon Kidul		√	289	Desa Sumberpucung		√
251	Desa Pujon Lor		√	290	Desa Ternyang		√
252	Desa Sukomulyo	√		291	Desa Gunung Renggo		√
253	Desa Tawang Sari		√	292	Desa Gunungsari		√
254	Desa Wiyurejo		√	293	Desa Jambearjo		√
255	Desa Ardimulyo		√	294	Desa Jatisari		√
256	Desa Banjararum		√	295	Desa Ngawonggo		√
257	Desa Baturetno	√		296	Desa Pandanmulyo		√
258	Desa Dengkol		√	297	Desa Purwosekar		√
259	Desa Gunungrejo		√	298	Desa Randugading	√	
260	Desa Klampok		√	299	Desa Summersuko		√
261	Desa Langlang		√	300	Desa Tajinan		√
262	Desa Losari		√	301	Desa Tambaksari		√
263	Desa Pagentan		√	302	Desa Tangkilsari	√	
264	Desa Purwoasri		√	303	Desa Ampelgading		√
265	Desa Randuangung		√	304	Desa Gedungsari		√
266	Desa Tanjungtirto		√	305	Desa Jogomulyo		√
267	Desa Watugede		√	306	Desa Kepatihan		√

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.6  
Daftar Nama-nama Desa Kabupaten Malang

No	Nama Desa	Website		No	Nama Desa	Website	
		Ada	Tidak			Ada	Tidak
307	Desa Pujiharjo	√		346	Desa Dalisodo		√
308	Desa Purwodadi		√	347	Desa Gondowangi		√
309	Desa Sukosari		√	348	Desa Jedong		√
310	Desa Sumbertangkil		√	349	Desa Mendalanwangi		√
311	Desa Taman Satriyan		√	350	Desa Pandanlandung		√
312	Desa Tamankuncaran		√	351	Desa Pandanrejo		√
313	Desa Tirtoyudo		√	352	Desa Parangargo		√
314	Desa Tlogosari		√	353	Desa Petungsewu		√
315	Desa Wonoagung		√	354	Desa Sidorahayu		√
316	Desa Benjor		√	355	Desa Sitirejo		√
317	Desa Bokor		√	356	Desa Sukodadi		√
318	Desa Duwet		√	357	Desa Sumbersuko		√
319	Desa Duwet Kerajan		√	358	Desa Bambang		√
320	Desa Jeru		√	359	Desa Blayu		√
321	Desa Kambangan		√	360	Desa Bringin		√
322	Desa Kidal		√	361	Desa Codo	√	
323	Desa Malangsuko		√	362	Desa Dadapan		√
324	Desa Ngingit		√	363	Desa Kidangbang		√
325	Desa Pandanajeng		√	364	Desa Ngembal		√
326	Desa Pulungdowo		√	365	Desa Patokpemis		√
327	Desa Slamet	√		366	Desa Sukoanyar	√	
328	Desa Tulusbesar	√		367	Desa Sukolilo	√	
329	Desa Tumpang		√	368	Desa Sumberputih		√
330	Desa Wringinsongo	√		369	Desa Wajak	√	
331	Desa Gedog Kulon		√	370	Desa Wonoayu	√	
332	Desa Gedog Wetan		√	371	Desa Bangelan		√
333	Desa Jeru		√	372	Desa Kebobang		√
334	Desa Kedok		√	373	Desa Kluwut		√
335	Desa Kemulan		√	374	Desa Plandi		√
336	Desa Pagedangan		√	375	Desa Plaosan		√
337	Desa Sanankerto		√	376	Desa Sumberdem		√
338	Desa Sananrejo		√	377	Desa Sumbertempur		√
339	Desa Sawahan		√	378	Desa Wonosari		√
340	Desa Talangsuko		√				
341	Desa Talok		√				
342	Desa Tanggung	√					
343	Desa Tawangrejeni	√					
344	Desa Tumpukrenteng	√					
345	Desa Undaan		√				

Sumber: Data primer diolah sendiri

Dari hasil data penelitian pada tabel 4.6 terhadap 378 desa dikabupaten malang didapatkan bahwa 44 (11,640%) *website* pemerintah desa tersebut dapat diakses dengan baik, dan ditemukan 334(88,359%) pemerintah desa tidak memiliki *website*. Lebih jelas dapat dilihat pada diagram dan tabel berikut:

Tabel 4.7  
Ringkasan Tabel 4.6

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Desa Pemakai <i>Website</i>	44	11,640%
2	Desa Yang Tidak Memakai <i>Website</i>	334	88,359%
Jumlah		378	100%

Gambar 4.6  
Desa Pemakai *Website* di malang



#### 4.3.2.2 Ketersediaan Laporan Keuangan

Analisa pertama dilakukan untuk menentukan ketersediaan informasi-informasi keuangan dalam *website* masing-masing lembaga pemerintah desa kepada pengguna. Pertama, ketersediaan dan kelengkapan Laporan Keuangan. Pada tahap ini, langkah awal dilakukan untuk menganalisa keberadaan informasi keuangan pokok yang telah diatur dalam PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas: 1. laporan realisasi anggaran, 2. neraca, 3. laporan arus kas, 4. catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan diinformasikan di masing-masing *website* lembaga pemerintah desa.

##### A. Kabupaten Lamongan

Pada tahap ini akan dianalisa masing-masing website desa pada kabupaten lamongan, bagaimana pemerintah desa melaporkan laporan keuangannya.

Tabel 4.8

Laporan Keuangan Desa Kabupaten Lamongan

No	Nama	Laporan Keuangan Desa			
		1	2	3	4
1	Desa Bulumargi	-	-	-	-
2	Desa Soko	-	-	-	-
3	Desa Kalitengah	-	-	-	-
4	Desa Latukan	-	-	-	-
5	Desa Pucangro	-	-	-	-
6	Desa Kandangrejo	-	-	-	-
7	Desa Kalanganyar	-	-	-	-
8	Desa Kaligerman	-	-	-	-
9	Desa Duriwetan	-	-	-	-
10	Desa Ngayung	-	-	-	-
11	Desa Sumberbendo	-	-	-	-
12	Desa Jabung	-	-	-	-
13	Desa Tunggungjagir	-	-	-	-
14	Desa Sendangagung	-	-	-	-

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.8  
Laporan Keuangan Desa Kabupaten Lamongan

No	Nama	Laporan Keuangan Desa			
		1	2	3	4
15	Desa Warulor	-	-	-	-
16	Desa Weru	-	-	-	-
17	Desa Warukulon	-	-	-	-
18	Desa Kreteranggon	-	-	-	-
19	Desa Payaman	-	-	-	-
20	Desa Selorejo	-	-	-	-
21	Desa Tenggingring	-	-	-	-
22	Desa Beru	-	-	-	-
23	Desa Bedingin	-	-	-	-
24	Desa Deketagung	-	-	-	-
25	Desa Jugo	-	-	-	-
26	Desa Kembangan	-	-	-	-
28	Desa Madulegi	-	-	-	-
29	Desa Sukodadi	-	-	-	-
30	Desa Sukolilo	-	-	-	-
31	Desa Ngujungrejo	-	-	-	-

Sumber: Data primer diolah sendiri

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dijelaskan dari 31 desa yang sudah menggunakan *website* di kabupaten lamongan tidak ada satu pun dari *website-website* tersebut yang melaporkan laporan keuangannya di *website*.

#### B. Kabupaten Bojonegoro

Pada tahap ini akan dianalisa masing-masing *website* desa pada kabupaten bojonegoro, bagaimana pemerintah desa melaporkan laporan keuangannya.

Tabel 4.9  
Laporan Keuangan Desa Kabupaten Bojonegoro

No	Nama	Laporan Keuangan Desa			
		1	2	3	4
1	Desa Balenrejo	-	-	-	-
2	Desa Kemamang	-	-	-	-
3	Desa Kenep	-	-	-	-
4	Desa Margomulyo	-	-	-	-

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.9  
Laporan Keuangan Desa Kabupaten Bojonegoro

No	Nama	Laporan Kuangan Desa			
		1	2	3	4
5	Desa Penganten	-	-	-	-
6	Desa Pasinan	-	-	-	-
8	Desa Sidobandung	-	-	-	-
9	Desa Campurejo	-	-	-	-
10	Desa Blongsong	-	-	-	-
11	Desa Sukorejo	-	-	-	-
12	Desa Dander	-	-	-	-
13	Desa Mayangganeng	-	-	-	-
14	Desa Mayangrejo	-	-	-	-
15	Desa Mojoranu	-	-	-	-
16	Desa Ngraseh	-	-	-	-
17	Desa Ngunut	-	-	-	-
18	Desa Pungpungan	-	-	-	-
19	Desa Sukoharjo	-	-	-	-
20	Desa Sumberagung	-	-	-	-
21	Desa Sumberarum	-	-	-	-
22	Desa Gayam	-	-	-	-
23	Desa Katur	-	-	-	-
24	Desa Sudu	-	-	-	-
25	Desa Simorejo	-	-	-	-
26	Desa Temu	-	-	-	-
27	Desa Bogo	-	-	-	-
28	Desa Duwel	-	-	-	-
29	Desa Megale	-	-	-	-
30	Desa Klampok	-	-	-	-
31	Desa Ngampel	-	-	-	-
32	Desa Plesungan	-	-	-	-
33	Desa Sambiroto	-	-	-	-
34	Desa Wedi	-	-	-	-
35	Desa Krangkong	-	-	-	-
36	Desa Ngambon	-	-	-	-
37	Desa Sengon	-	-	-	-
38	Desa Bareng	-	-	-	-
39	Desa Jelu	-	-	-	-
40	Desa Simorejo	-	-	-	-
41	Desa Sumberagung	-	-	-	-
42	Desa Tlogorejo	-	-	-	-
43	Desa Ngasem	-	-	-	-
44	Desa Rendeng	-	-	-	-

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.9  
Laporan Keuangan Desa Kabupaten Bojonegoro

No	Nama	Laporan Kuangan Desa			
		1	2	3	4
45	Desa Sukorejo	-	-	-	-
46	Desa Sumberjo	-	-	-	-
47	Desa Geneng	-	-	-	-
48	Desa Kalangan	-	-	-	-
49	Desa Sumberarum	-	-	-	-
50	Desa Tanggungan	-	-	-	-
51	Desa Meduri	-	-	-	-
52	Desa Ngelo	-	-	-	-
53	Desa Bondol	-	-	-	-
54	Desa Kalicilik	-	-	-	-
55	Desa Klepek	-	-	-	-
56	Desa Banjarrejo	-	-	-	-
57	Desa Sedah Kidul	-	-	-	-
59	Desa Klino	-	-	-	-
60	Desa Bulu	-	-	-	-
61	Desa Glagahan	-	-	-	-
62	Desa Tulungrejo	-	-	-	-
63	Desa Bakalan	-	-	-	-
64	Desa Mulyorejo	-	-	-	-

Sumber: Data primer diolah sendiri

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dijelaskan dari 64 desa yang sudah menggunakan *website* di kabupaten bojonegoro tidak ada satu pun dari *website-website* tersebut yang melaporkan laporan keuangannya di *website*.

### C. Kabupaten Malang

Pada tahap ini akan dianalisa masing-masing *website* desa pada kabupaten malang, bagaimana pemerintah desa melaporkan laporan keuangannya.

Tabel 4.10  
Laporan Keuangan Desa Kabupaten Malang

No	Nama	Laporan Kuangan Desa			
		1	2	3	4
1	Desa Wandanpuro	-	-	-	-

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.10  
Laporan Keuangan Desa Kabupaten Malang

No	Nama	Laporan Keuangan Desa			
		1	2	3	4
2	Desa Purwoharjo	-	-	-	-
3	Desa Sidorenggo	-	-	-	-
4	Desa Wirotaman	-	-	-	-
5	Desa Gajahrejo	-	-	-	-
6	Desa Girimulyo	-	-	-	-
7	Desa Segaran	-	-	-	-
8	Desa Ampeldento	-	-	-	-
9	Desa Putat Kidul	-	-	-	-
10	Desa Sepanjang	-	-	-	-
11	Desa Sukopuro	-	-	-	-
12	Desa Taji	-	-	-	-
13	Desa Jambuwer	-	-	-	-
14	Desa Sumberkerto	-	-	-	-
15	Desa Sekarpuro	-	-	-	-
16	Desa Sumberpasir	-	-	-	-
17	Desa Tirtomoyo	-	-	-	-
18	Desa Pagersari	-	-	-	-
19	Desa Sumberagung	-	-	-	-
20	Desa Waturejo	-	-	-	-
21	Desa Argosuko	-	-	-	-
22	Desa Ngadas	-	-	-	-
23	Desa Poncokusumo	-	-	-	-
24	Desa Klepu	-	-	-	-
25	Desa Sumberejo	-	-	-	-
26	Desa Wonorejo	-	-	-	-
27	Desa Wringinanom	-	-	-	-
28	Desa Sukomulyo	-	-	-	-
29	Desa Baturetno	-	-	-	-
30	Desa Randugading	-	-	-	-
31	Desa Tangkilsari	-	-	-	-
32	Desa Tumpukrenteng	-	-	-	-
33	Desa Pujiharjo	-	-	-	-
34	Desa Codo	-	-	-	-
35	Desa Sukoanyar	-	-	-	-
36	Desa Sukolilo	-	-	-	-
37	Desa Slamet	-	-	-	-
38	Desa Tulusbesar	-	-	-	-
39	Desa Wringinsongo	-	-	-	-
40	Desa Wajak	-	-	-	-

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.10  
Laporan Keuangan Desa Kabupaten Malang

No	Nama	Laporan Keuangan Desa			
		1	2	3	4
41	Desa Wonoayu	-	-	-	-
42	Desa Tanggung	-	-	-	-
43	Desa Tawangrejeni	-	-	-	-
44	Desa Mentaraman	-	-	-	-

Sumber: Data primer diolah sendiri

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dijelaskan dari 44 desa yang sudah menggunakan *website* di kabupaten malang tidak ada satu pun dari *website-website* tersebut yang melaporkan laporan keuangannya di *website*.

#### 4.3.2.3 Ketersediaan Laporan Keuangan Tambahan

Tahap dilakukan untuk menentukan ketersediaan informasi-informasi keuangan tambahan dalam *website* masing-masing lembaga pemerintah desa kepada pengguna. Pada tahap ini, langkah awal dilakukan untuk menganalisa keberadaan informasi keuangan tambahan, yaitu: 1. Buku Kas Umum, 2. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan, 3. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran, 4. Buku Kas Harian Pembantu, 5. Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja ADD.

##### A. Kabupaten Lamongan

Tahap ini akan menganalisis pada masing-masing *website* desa di kabupaten lamongan, bagaimana pemerintah desa melaporkan laporan keuangan tambahan pada *website* desanya.

Tabel 4.11

## Laporan Keuanga Tambahan Desa Kabupaten Lamongan

No	Nama Desa	Laporan Keuangan Tambahan				
		1	2	3	4	5
1	Desa Bulumargi	-	-	-	-	-
2	Desa Soko	-	-	-	-	-
3	Desa Kalitengah	-	-	-	-	-
4	Desa Latukan	-	-	-	-	-
5	Desa Pucangro	-	-	-	-	-
6	Desa Kandangrejo	-	-	-	-	-
7	Desa Kalanganyar	-	-	-	-	-
8	Desa Kaligerman	-	-	-	-	-
9	Desa Duriwetan	-	-	-	-	-
10	Desa Ngayung	-	-	-	-	-
11	Desa Sumberbendo	-	-	-	-	-
12	Desa Jabung	-	-	-	-	-
13	Desa Tunggunjagir	-	-	-	-	-
14	Desa Sendangagung	-	-	-	-	-
18	Desa Kreteranggon	-	-	-	-	-
19	Desa Payaman	-	-	-	-	-
20	Desa Selorejo	-	-	-	-	-
21	Desa Tengging	-	-	-	-	-
22	Desa Beru	-	-	-	-	-
23	Desa Bedingin	-	-	-	-	-
24	Desa Deketagung	-	-	-	-	-
25	Desa Jugo	-	-	-	-	-
26	Desa Kembangan	-	-	-	-	-
27	Desa Manyar	-	-	-	-	-
28	Desa Madulegi	-	-	-	-	-
29	Desa Sukodadi	-	-	-	-	-
30	Desa Sukolilo	-	-	-	-	-
31	Desa Ngujungrejo	-	-	-	-	-

Sumber: Data primer diolah sendiri

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dijelaskan dari 31 desa yang sudah menggunakan *website* di kabupaten lamongan tidak ada satu pun dari *website-website* tersebut yang melaporkan laporan keungan tambahan di *website*.

## B. Kabupaten Bojonegoro

Tahap ini akan menganalisis pada masing-masing *website* desa di kabupaten bojonegoro, bagaimana pemerintah desa melaporkan laporan keuangan tambahan pada *website* desanya.

Tabel 4.12  
Laporan Keuangan Tambahan Desa Kabupaten Bojonegoro

No	Nama Desa	Laporan Keuangan Tambahan				
		1	2	3	4	5
1	Desa Balenrejo	-	-	-	-	-
2	Desa Kemamang	-	-	-	-	-
3	Desa Kenep	-	-	-	-	-
5	Desa Penganten	-	-	-	-	-
6	Desa Pasinan	-	-	-	-	-
7	Desa Sembunglor	-	-	-	-	-
8	Desa Sidobandung	-	-	-	-	-
9	Desa Campurejo	-	-	-	-	-
10	Desa Blongsong	-	-	-	-	-
11	Desa Sukorejo	-	-	-	-	-
12	Desa Dander	-	-	-	-	-
13	Desa Mayanggeneng	-	-	-	-	-
14	Desa Mayangrejo	-	-	-	-	-
15	Desa Mojoranu	-	-	-	-	-
16	Desa Ngraseh	-	-	-	-	-
17	Desa Ngunut	-	-	-	-	-
18	Desa Pungpungan	-	-	-	-	-
19	Desa Sukoharjo	-	-	-	-	-
20	Desa Sumberagung	-	-	-	-	-
21	Desa Sumberarum	-	-	-	-	-
22	Desa Gayam	-	-	-	-	-
23	Desa Katur	-	-	-	-	-
24	Desa Sudu	-	-	-	-	-
25	Desa Simorejo	-	-	-	-	-
26	Desa Temu	-	-	-	-	-
27	Desa Bogo	-	-	-	-	-
28	Desa Duwel	-	-	-	-	-
29	Desa Megale	-	-	-	-	-
30	Desa Klampok	-	-	-	-	-
31	Desa Ngampel	-	-	-	-	-
32	Desa Plesungan	-	-	-	-	-

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.12  
Laporan Keuangan Tambahan Desa Kabupaten Bojonegoro

No	Nama Desa	Laporan Keuangan Tambahan				
		1	2	3	4	5
33	Desa Sambiroto	-	-	-	-	-
34	Desa Wedi	-	-	-	-	-
35	Desa Krangkong	-	-	-	-	-
36	Desa Ngambon	-	-	-	-	-
37	Desa Sengon	-	-	-	-	-
38	Desa Bareng	-	-	-	-	-
39	Desa Jelu	-	-	-	-	-
40	Desa Simorejo	-	-	-	-	-
41	Desa Sumberagung	-	-	-	-	-
42	Desa Tlogorejo	-	-	-	-	-
43	Desa Ngasem	-	-	-	-	-
45	Desa Sukorejo	-	-	-	-	-
46	Desa Sumberjo	-	-	-	-	-
47	Desa Geneng	-	-	-	-	-
48	Desa Kalangan	-	-	-	-	-
49	Desa Sumberarum	-	-	-	-	-
50	Desa Tanggungan	-	-	-	-	-
51	Desa Meduri	-	-	-	-	-
52	Desa Ngelo	-	-	-	-	-
53	Desa Bondol	-	-	-	-	-
54	Desa Kalicilik	-	-	-	-	-
55	Desa Klepek	-	-	-	-	-
56	Desa Banjarrejo	-	-	-	-	-
57	Desa Sedah Kidul	-	-	-	-	-
58	Desa Bobol	-	-	-	-	-
59	Desa Klino	-	-	-	-	-
60	Desa Bulu	-	-	-	-	-
61	Desa Glagahan	-	-	-	-	-
62	Desa Tulungrejo	-	-	-	-	-
63	Desa Bakalan	-	-	-	-	-
64	Desa Mulyorejo	-	-	-	-	-

Sumber: Data primer diolah sendiri

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dijelaskan dari 64 desa yang sudah menggunakan *website* di kabupaten bojonegoro tidak ada satu pun dari *website-website* tersebut yang melaporkan laporan keuangan tambahan di *website*.

### C. Kabupaten Malang

Tahap ini akan menganalisis pada masing-masing *website* desa di kabupaten malang, bagaimana pemerintah desa melaporkan laporan keuangan tambahan pada *website* desanya

Tabel 4.13  
Laporan Keuanga Tambahan Desa Kabupaten Malang

No	Nama Desa	Laporan Keuangan Tambahan				
		1	2	3	4	5
1	Desa Wandanpuro	-	-	-	-	-
2	Desa Purwoharjo	-	-	-	-	-
3	Desa Sidorenggo	-	-	-	-	-
4	Desa Wirotaman	-	-	-	-	-
5	Desa Gajahrejo	-	-	-	-	-
6	Desa Girimulyo	-	-	-	-	-
7	Desa Segaran	-	-	-	-	-
8	Desa Ampeldento	-	-	-	-	-
9	Desa Putat Kidul	-	-	-	-	-
10	Desa Sepanjang	-	-	-	-	-
11	Desa Sukopuro	-	-	-	-	-
12	Desa Taji	-	-	-	-	-
13	Desa Jambuwer	-	-	-	-	-
14	Desa Sumberkerto	-	-	-	-	-
15	Desa Sekarpuro	-	-	-	-	-
16	Desa Sumberpasir	-	-	-	-	-
17	Desa Tirtomoyo	-	-	-	-	-
18	Desa Pagersari	-	-	-	-	-
19	Desa Sumberagung	-	-	-	-	-
20	Desa Waturejo	-	-	-	-	-
21	Desa Argosuko	-	-	-	-	-
22	Desa Ngadas	-	-	-	-	-
23	Desa Poncokusumo	-	-	-	-	-
24	Desa Klepu	-	-	-	-	-
25	Desa Sumberejo	-	-	-	-	-
26	Desa Wonorejo	-	-	-	-	-
27	Desa Wringinanom	-	-	-	-	-
28	Desa Sukomulyo	-	-	-	-	-
29	Desa Baturetno	-	-	-	-	-
30	Desa Randugading	-	-	-	-	-

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.13  
Laporan Keuanga Tambahan Desa Kabupaten Malang

No	Nama Desa	Laporan Keuangan Tambahan				
		1	2	3	4	5
31	Desa Tangkilsari	-	-	-	-	-
32	Desa Tumpukrenteng	-	-	-	-	-
33	Desa Pujiharjo	-	-	-	-	-
34	Desa Codo	-	-	-	-	-
35	Desa Sukoanyar	-	-	-	-	-
36	Desa Sukolilo	-	-	-	-	-
37	Desa Slamet	-	-	-	-	-
38	Desa Tulusbesar	-	-	-	-	-
39	Desa Wringinsongo	-	-	-	-	-
40	Desa Wajak	-	-	-	-	-
41	Desa Wonoayu	-	-	-	-	-
42	Desa Tanggung	-	-	-	-	-
43	Desa Tawangrejeni	-	-	-	-	-
44	Desa Mentaraman	-	-	-	-	-

Sumber: Data primer diolah sendiri

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dijelaskan dari 44 desa yang sudah menggunakan *website* di kabupaten malang tidak ada satu pun dari *website-website* tersebut yang melaporkan laporan keuangan tambahan di *website*.

#### 4.3.2.4 Manfaat Fitur-Fitur Teknologi *Website* dan Tampilan *Website* Dalam Penyampaian Informasi

Pada tahap ini akan dianalisa masing-masing 139 *website* pemerintah desa, bagaimana pemerintah desa memanfaatkan media *website* sebagai teknologi yang sedang berkembang. Analisa pertama melihat kecepatan tampilan *website* pada saat di buka, kedua manfaat aplikasi JAVA untuk menampilkan gambar bergerak, ketiga penggunaan *external links*, fitur pencarian ( *search engines*) didalam *website* dan alamat dan *contact person* yang dapat dihubungi, keempat adalah kandungan isi *website* dan tampilan *website* agar penyajian informasi yang maksimal bagi

pengguna *website* tersebut. Faktor penggunaan *frame*, *teks* yang dapat jelas dibaca, menu *pull down* dan *sitemap* akan sangat berpengaruh dan sangat penting bagi para pengguna agar tertarik dan kemudahan membaca dari isi *website* tersebut.

#### A. Kabupaten Lamongan

Pada tahap ini akan dianalisa masing-masing *website* desa pada kabupaten lamongan, bagaimana pemerintah desa memanfaatkan media *website* sebagai teknologi yang sedang berkembang. Analisa: 1. Kecepatan, 2. Aplikasi JAVA, 3. *Eksternal links*, 4. *Fitur Search*, 5. Alamat dan *contact person*, 6. *Frame*, 7. *Pull down*, dan 8. *Site map*, lebih jelas lihat tabel berikut:

Tabel 4.14

#### Teknologi dan Fitur-Fitur *Website* (Kabupaten Lamongan)

No	Nama Desa	Teknologi dan Fitur-Fitur <i>Website</i>							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Desa Bulumargi	√		√	√	√	√	√	
2	Desa Soko	√		√			√	√	
3	Desa Kalitengah	√		√			√	√	
4	Desa Latukan	√		√			√		
5	Desa Pucangro	√		√			√		
6	Desa Kandangrejo	√		√			√	√	
7	Desa Kalanganyar	√		√	√		√	√	
8	Desa Kaligerman	√					√		
9	Desa Duriwetan	√			√		√		
10	Desa Ngayung	√					√		
11	Desa Sumberbendo	√					√		
12	Desa Jabung	√		√			√		
13	Desa Tunggunjagir	√		√			√		
14	Desa Sendangagung	√		√	√		√	√	
15	Desa Warulor	√					√		
16	Desa Weru	√					√		
17	Desa Warukulon	√		√			√	√	
18	Desa Kreteranggon	√					√		
19	Desa Payaman	√					√		
20	Desa Selorejo	√		√	√		√	√	
21	Desa Tenggiring	√					√		

Sumber: Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.14

Teknologi dan Fitur-Fitur *Website* (Kabupaten Lamongan)

No	Nama Desa	Teknologi dan Fitur-Fitur <i>Website</i>							
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Desa Beru	√					√		
23	Desa Bedingin	√					√		
24	Desa Deketagung	√		√	√		√		
25	Desa Jugo	√		√			√	√	
26	Desa Kembangan	√		√	√		√		
27	Desa Manyar	√		√	√		√		
28	Desa Madulegi	√		√	√		√		
29	Desa Sukodadi	√		√	√		√	√	
30	Desa Sukolilo	√		√			√		
31	Desa Ngujungrejo	√		√			√		

Sumber: Data primer diolah sendiri

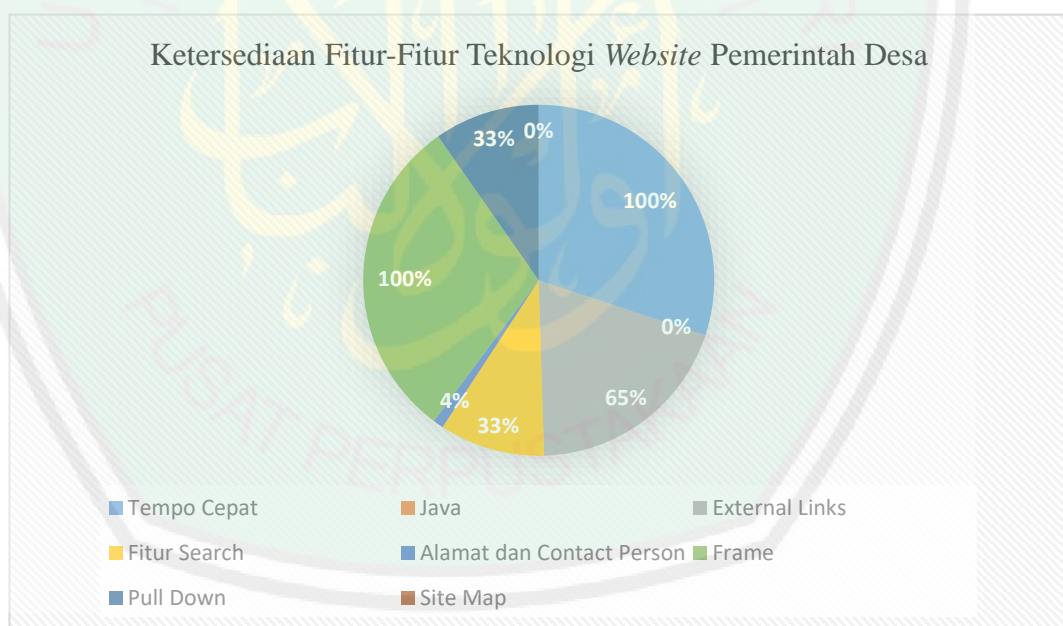
Berdasarkan dari tabel 4.14 dapat dijelaskan sebagai berikut: Analisa pertama melihat kecepatan tampilan *website* pada saat di buka, berdasarkan analisa yang didapatkan dari 31 pemerintah desa yang memiliki *website*, 31 (100%) *website* pemerintah desa dapat menampilkan *websitenya* dengan tempo cepat.

Analisa kedua melihat manfaat aplikasi *JAVA* dalam tampilan gambar bergerak *website* pada saat di buka, berdasarkan analisa yang didapatkan dari pemerintah desa yang memiliki *website*, didapatkan 0 (0%) *website* pemerintah desa dapat menerapkan aplikasi *JAVA* didalam *website*.

Analisa ketiga penggunaan *external links*, fitur pencarian ( *search engines*) didalam *website* serta alamat dan *contact person* yang dapat dihubungi, diperoleh hasil analisa yang didapatkan dari 31 pemerintah desa yang memiliki *website*, 20 (64,516%) *website* pemrintah desa menggunakan *external links* dan 1 (3,225%) memiliki alamat dan *contact person* yang dapat dihubungi, sedangkan 10 (32,258%) *website* pemerintah desa menggunakan fitur pencarian ( *search engines*).

Analisa keempat penggunaan *frame*, *teks* yang dapat jelas dibaca, menu *pull down* dan *sitemap* akan sangat berpengaruh ke kemudahan penggunaan *website*. Hasil analisa 31 pemerintah desa yang memiliki *website*, 31 (100%) *website* pemerintah desa menggunakan *Frame* dan *teks* dapat dibaca dengan jelas didalam *website*, sedangkan 10 (32,258%) pemerintah desa menyajikan menu dengan menu *pull down* dan 0 (0%) pemerintah desa menyajikan menunya dengan *site map*. Lebih jelas dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 4.7  
Ketersediaan Fitur-Fitur Teknologi *Website* Pemerintah Desa Kabupaten Lamongan



## B. Kabupaten Bojonegoro

Pada tahap ini akan dianalisa masing-masing *website* desa pada kabupaten lamonaga, bagaimana pemerintah desa memanfaatkan media *website* sebagai teknologi yang sedang berkembang. Analisa 1. Kecepatan, 2. Aplikasi *JAVA*, 3.

*Eksternal links*, 4. *Fitur Search*, 5. *Alamat dan contact person*, 6. *Frame*, 7. *Pull down*, dan 8. *Site map*, lebih jelas lihat tabel berikut:

Tabel 4.15  
Teknologi dan Fitur-Fitur *Website* (Kabupaten Bojonegoro)

No	Nama Desa	Teknologi dan Fitur-Fitur <i>Website</i>							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Desa Balenrejo	√		√	√		√	√	
2	Desa Kemamang	√		√	√		√	√	
3	Desa Kenep	√		√	√		√	√	
4	Desa Margomulyo	√		√	√	√	√	√	
5	Desa Penganten	√		√	√		√	√	
6	Desa Pasinan	√		√	√		√	√	
7	Desa Sembunglor	√		√	√		√	√	
8	Desa Sidobandung	√		√	√		√	√	
9	Desa Campurejo	√		√	√		√	√	
10	Desa Blongsong	√		√	√		√	√	
11	Desa Sukorejo	√		√	√		√	√	
12	Desa Dander	√		√	√		√	√	
13	Desa Mayanggeneng	√		√	√		√	√	
14	Desa Mayangrejo	√		√	√		√	√	
15	Desa Mojoranu	√		√	√		√	√	
16	Desa Ngraseh	√		√	√		√	√	
17	Desa Ngunut	√		√	√		√	√	
18	Desa Pungpungan	√		√	√		√	√	
19	Desa Sukoharjo	√		√	√		√	√	
20	Desa Sumberagung	√		√	√		√	√	
21	Desa Sumberarum	√		√	√		√	√	
22	Desa Gayam	√		√	√		√	√	
23	Desa Katur	√		√	√		√	√	
24	Desa Sudu	√		√	√		√	√	
25	Desa Simorejo	√		√	√		√	√	
26	Desa Temu	√		√	√		√	√	
27	Desa Bogo	√		√	√		√	√	
28	Desa Duwel	√		√	√		√	√	
29	Desa Megale	√		√	√		√	√	
30	Desa Klampok	√		√	√		√	√	
31	Desa Ngampel	√		√	√		√	√	
32	Desa Plesungan	√		√	√		√	√	
33	Desa Sambiroto	√		√	√		√	√	
34	Desa Wedi	√		√	√		√	√	

Sumber : Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.15  
Teknologi dan Fitur-Fitur *Website* (Kabupaten Bojonegoro)

No	Nama Desa	Teknologi dan Fitur-Fitur <i>Website</i>							
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	Desa Krangkong	√		√	√		√	√	
36	Desa Ngambon	√		√	√		√	√	
37	Desa Sengon	√		√	√		√	√	
38	Desa Bareng	√		√	√	√	√	√	
39	Desa Jelu	√		√	√		√	√	
40	Desa Simorejo	√		√	√		√	√	
41	Desa Sumberagung	√		√	√		√	√	
42	Desa Tlogorejo	√		√	√	√	√	√	
43	Desa Ngasem	√		√	√	√	√	√	
44	Desa Rendeng	√		√	√		√	√	
45	Desa Sukorejo	√		√	√		√	√	
46	Desa Sumberjo	√		√	√		√	√	
47	Desa Geneng	√		√	√		√	√	
48	Desa Kalangan	√		√	√		√	√	
49	Desa Sumberarum	√		√	√		√	√	
50	Desa Tanggungan	√		√	√		√	√	
51	Desa Meduri	√		√	√		√	√	
52	Desa Ngelo	√		√	√		√	√	
53	Desa Bondol	√		√	√		√	√	
54	Desa Kalicilik	√		√	√		√	√	
55	Desa Klepek	√		√	√		√	√	
56	Desa Banjarrejo	√		√	√		√	√	
57	Desa Sedah Kidul	√		√	√		√	√	
58	Desa Bobol	√		√	√		√	√	
59	Desa Klino	√		√	√		√	√	
60	Desa Bulu	√		√	√		√	√	
61	Desa Glagahan	√		√	√		√	√	
62	Desa Tulungrejo	√		√	√		√	√	
63	Desa Bakalan	√		√	√		√	√	
64	Desa Mulyorejo	√		√	√		√	√	

Sumber : Data primer diolah sendiri

Berdasarkan dari tabel 4.14 dapat dijelaskan sebagai berikut: Analisa pertama melihat kecepatan tampilan *website* pada saat di buka, berdasarkan analisa yang didapatkan dari 64 pemerintah desa yang memiliki *website*, 64 (100%) *website* pemerintah desa dapat menampilkan *websitenya* dengan tempo cepat.

Analisa kedua melihat manfaat aplikasi *JAVA* dalam tampilan gambar bergerak *website* pada saat di buka, berdasarkan analisa yang didapatkan dari pemerintah desa yang memiliki *website*, didapatkan 0 (0%) *website* pemerintah desa dapat menerapkan aplikasi *JAVA* didalam *website*.

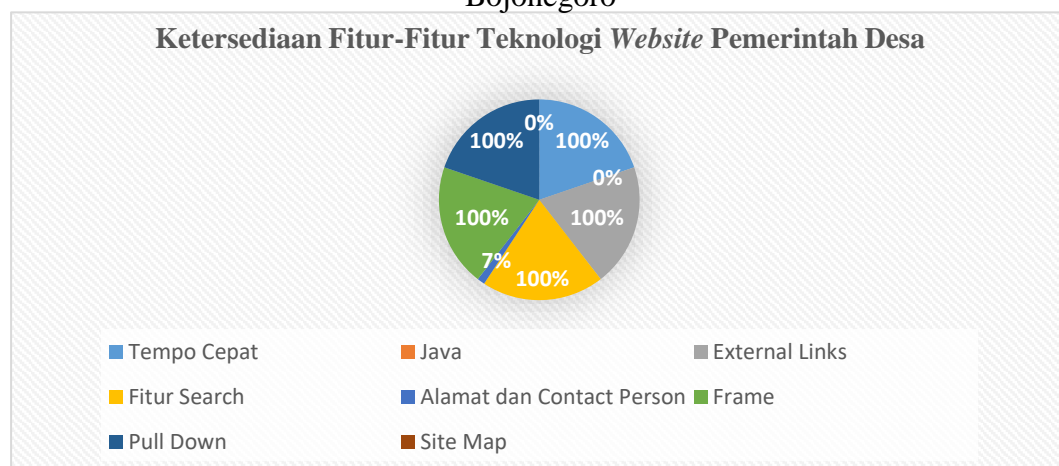
Analisa ketiga penggunaan *external links*, fitur pencarian ( *search engines*) didalam *website* serta alamat dan *contact person* yang dapat dihubungi, diperoleh hasil analisa yang didapatkan dari 64 pemerintah desa yang memiliki *website*, 64 (100%) *website* pemerintah desa menggunakan *external links* dan 4 (6,25%) memiliki alamat dan *contact person* yang dapat dihubungi, sedangkan 64 (100%) *website* pemerintah desa menggunakan fitur pencarian ( *search engines*) dan.

Analisa keempat penggunaan *frame*, *teks* yang dapat jelas dibaca, menu *pull down* dan *sitemap* akan sangat berpengaruh ke kemudahan penggunaan *website*. Hasil analisa 64 pemerintah desa yang memiliki *website*, 64 (100%) *website* pemerintah desa menggunakan *Frame* dan *teks* dapat dibaca dengan jelas didalam *website*, sedangkan 64 (100%) pemerintah desa menyajikan menu dengan menu *pull down* dan 0 (0%) pemerintah desa menyajikan menunya dengan *site map*. Lebih jelas dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 4.8

Ketersediaan Fitur-Fitur Teknologi *Website* Pemerintah Desa Kabupaten

Bojonegoro



### C. Kabupaten Malang

Pada tahap ini akan dianalisa masing-masing *website* desa pada kabupaten lamonaga, bagaimana pemerintah desa memanfaatkan media *website* sebagai teknologi yang sedang berkembang. Analisa 1. Kecepatan, 2. Aplikasi *JAVA*, 3. *Eksternal links*, 4. Fitur *Search*, 5. Alamat dan *contact person*, 6. *Frame*, 7. *Pull down*, dan 8. *Site map*, lebih jelas lihat tabel berikut:

Tabel 4.16

Teknologi dan Fitur-Fitur *Website* (Kabupaten Malang)

No	Nama Desa	Teknologi dan Fitur-Fitur <i>Website</i>							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Desa Wandanpuro	√		√			√	√	
2	Desa Purwoharjo	√		√			√	√	
3	Desa Sidorenggo	√		√			√	√	
4	Desa Wirotaman	√		√			√	√	
5	Desa Gajahrejo	√		√			√	√	
6	Desa Girimulyo	√		√			√	√	
7	Desa Segaran	√		√			√	√	
8	Desa Ampeldento	√		√			√	√	
9	Desa Putat Kidul	√		√			√	√	
10	Desa Sepanjang	√		√			√	√	
11	Desa Sukopuro	√		√			√	√	
12	Desa Taji	√		√			√	√	
13	Desa Jambuwer	√		√			√	√	
14	Desa Sumberkerto	√		√			√	√	
15	Desa Sekarpuro	√		√			√	√	
16	Desa Sumberpasir	√		√			√	√	
17	Desa Tirtomoyo	√		√			√	√	
18	Desa Pagersari	√		√			√	√	
19	Desa Sumberagung	√		√			√	√	
20	Desa Waturejo	√		√			√	√	
21	Desa Argosuko	√		√			√	√	
22	Desa Ngadas	√		√			√	√	
23	Desa Poncokusumo	√		√			√	√	
24	Desa Klepu	√		√			√	√	

Sumber : Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.16  
Teknologi dan Fitur-Fitur *Website* (Kabupaten Malang)

No	Nama Desa	Teknologi dan Fitur-Fitur <i>Website</i>							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Desa Sumberejo	√		√			√	√	
26	Desa Wonorejo	√		√			√	√	
27	Desa Wringinanom	√		√			√	√	
28	Desa Sukomulyo	√		√			√	√	
29	Desa Baturetno	√		√			√	√	
30	Desa Randugading	√		√			√	√	
31	Desa Tangkilsari	√		√			√	√	
32	Desa Tumpukrenteng	√		√			√	√	
33	Desa Pujiharjo	√		√			√	√	
34	Desa Codo	√		√			√	√	
35	Desa Sukoanyar	√		√			√	√	
36	Desa Sukolilo	√		√			√	√	
37	Desa Slamet	√		√			√	√	
38	Desa Tulusbesar	√		√			√	√	
39	Desa Wringinsongo	√		√			√	√	
40	Desa Wajak	√		√			√	√	
41	Desa Wonoayu	√		√			√	√	
42	Desa Tanggung	√		√			√	√	
43	Desa Tawangrejeni	√		√			√	√	
44	Desa Mentaraman	√		√			√	√	

Sumber : Data primer diolah sendiri

Berdasarkan dari tabel 4.15 dapat dijelaskan sebagai berikut: Analisa pertama melihat kecepatan tampilan *website* pada saat di buka, berdasarkan analisa yang didapatkan dari 44 pemerintah desa yang memiliki *website*, 44 (100%) *website* pemerintah desa dapat menampilkan websitenya dengan tempo cepat.

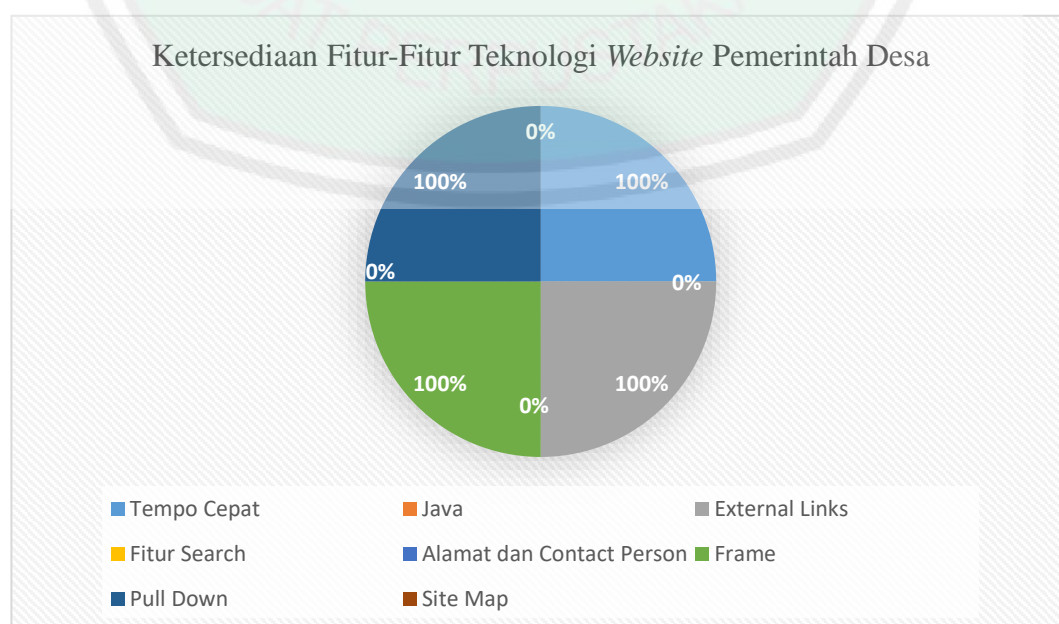
Analisa kedua melihat manfaat aplikasi *JAVA* dalam tampilan gambar bergerak *website* pada saat di buka, berdasarkan analisa yang didapatkan dari pemerintah desa yang memiliki *website*, didapatkan 0 (0%) *website* pemerintah desa dapat menerapkan aplikasi *JAVA* didalam *website*.

Analisa ketiga penggunaan *external links*, fitur pencarian ( *search engines*) didalam *website* serta alamat dan *contact person* yang dapat dihubungi, diperoleh hasil analisa yang didapatkan dari 44 pemerintah desa yang memiliki *website*, 44 (100%) *website* pemerintah desa menggunakan *external links* dan 0 (0%) memiliki alamat dan *contact person* yang dapat dihubungi, sedangkan 0 (0%) *website* pemerintah desa menggunakan fitur pencarian ( *search engines*).

Analisa keempat penggunaan *frame*, *teks* yang dapat jelas dibaca, menu *pull down* dan *sitemap* akan sangat berpengaruh ke kemudahan penggunaan *website*. Hasil analisa 44 pemerintah desa yang memiliki *website*, 44 (100%) *website* pemerintah desa menggunakan *Frame* dan *teks* dapat dibaca dengan jelas didalam *website*, sedangkan 44 (100%) pemerintah desa menyajikan menu dengan menu *pull down* dan 0 (0%) pemerintah desa menyajikan menunya dengan *site map*. Lebih jelas dapat dilihat pada diagram dan tabel berikut:

Gambar 4.9

Ketersediaan Fitur-Fitur Teknologi *Website* Pemerintah Desa Kabupaten Malang



#### 4.3.2.5 Ketersediaan Informasi Tambahan (Berita)

Rendahnya biaya dan cepatnya dalam menyampaikan informasi lebih secara detail merupakan keunggulan lain dari internet kepada pengguna (*users*). Pada bagian ini akan menganalisa bagaimana pemerintah desa memanfaatkan teknologi internet dalam menyampaikan sebuah informasi secara cepat dan tepat bagi para pengguna informasi tersebut.

Pada tahap ini pertama yang dilakukan adalah menganalisa 139 pemerintah desa mempunyai *press release* dalam *websitenya*. Waktu dalam menganalisa informasi tambahan (berita)  $\pm 4$  minggu dimulai tanggal 1 Juli 2017-1 Agustus 2017.

##### A. Kabupaten Lamongan

Hasil observasi pada *website* pemerintah desa dalam menganalisa update informasi tambahan (berita) melalui *press release* yaitu:

Tabel 4.17

##### Berita Tambahan (Kabupaten Lamongan)

No	Nama Desa	Berita		
		Update	Tidak Update	Tidak Jelas
1	Desa Bulumargi		√	
2	Desa Soko		√	
3	Desa Kalitengah		√	
4	Desa Latukan		√	
5	Desa Pucangro		√	
6	Desa Kandangrejo		√	

Sumber : Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.17  
Berita Tambahan (Kabupaten Lamongan)

No	Nama Desa	Berita		
		Update	Tidak Update	Tidak Jelas
7	Desa Kalanganyar		√	
8	Desa Kaligerman		√	
9	Desa Duriwetan		√	
10	Desa Ngayung		√	
11	Desa Sumberbendo		√	
12	Desa Jabung		√	
13	Desa Tunggunjagir		√	
14	Desa Sendangagung		√	
15	Desa Warulor		√	
16	Desa Weru		√	
17	Desa Warukulon		√	
18	Desa Kreteranggon		√	
19	Desa Payaman		√	
20	Desa Selorejo		√	
21	Desa Tenggiring		√	
22	Desa Beru		√	
23	Desa Bedingin		√	
24	Desa Deketagung		√	
25	Desa Jugo		√	
26	Desa Kembangan		√	
27	Desa Manyar		√	
28	Desa Madulegi		√	
29	Desa Sukodadi		√	
30	Desa Sukolilo		√	
31	Desa Ngujungrejo		√	

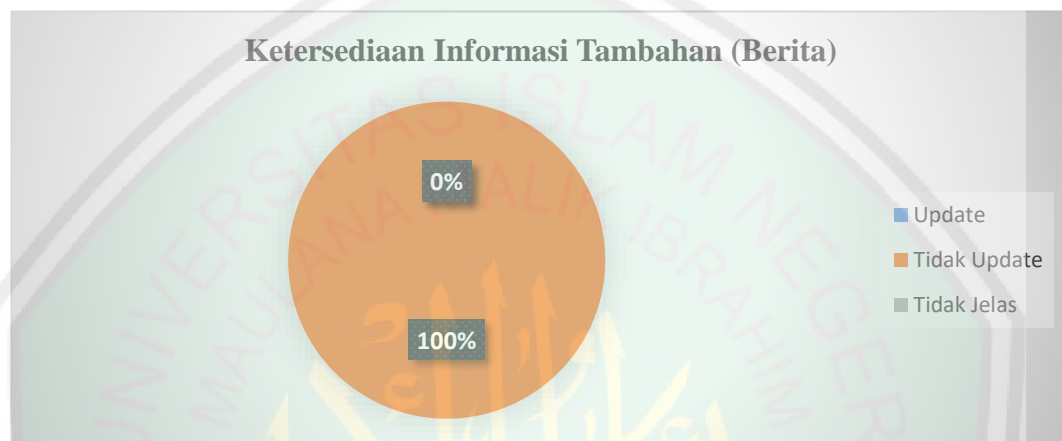
Sumber : Data primer diolah sendiri

Didapatkan dari hasil analisa tabel 4.16, *update* informasi tambahan (berita) di 31 *website* pemerintah desa dilamongan, hanya 0 (0%) *website* pemerintah desa yang mengupdate informasi pada tanggal terakhir pada *website* mereka, sedangkan 31 (100%) *website* pemerintah desa tidak mengupdate informasi-informasi untuk dipublikasikan didalam *websit*., dan 0 (0%) *website* pemerintah desa memberikan informasi tidak jelas dikarenakan informasi yang disampaikan *diwebsite* tidak

dicantumkan tanggal publikasi informasi tersebut. Lebih jelas dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 4.10

Ketersediaan Informasi Tambahan (Berita) Kabupaten Lamongan



#### B. Kabupaten Bojonegoro

Hasil observasi pada *website* pemerintah desa dalam menganalisa update informasi tambahan (berita) melalui *press release* yaitu:

Tabel 4.18

Berita Tambahan (Kabupaten Bojonegoro)

No	Nama Desa	Berita		
		Update	Tidak Update	Tidak Jelas
1	Desa Balenrejo			√
2	Desa Kemamang		√	
3	Desa Kenep			√
4	Desa Margomulyo	√		
5	Desa Penganten			√
6	Desa Pasinan		√	
7	Desa Sembunglor		√	
8	Desa Sidobandung		√	
9	Desa Campurejo		√	
10	Desa Blongsong			√
11	Desa Sukorejo		√	
12	Desa Dander			√
13	Desa Mayangganeng			√

Sumber : Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.18  
Berita Tambahan (Kabupaten Bojonegoro)

No	Nama Desa	Berita		
		Update	Tidak Update	Tidak Jelas
14	Desa Mayangrejo			√
15	Desa Mojoranu		√	
16	Desa Ngraseh			√
17	Desa Ngunut		√	
18	Desa Pungpungan			√
19	Desa Sukoharjo			√
20	Desa Sumberagung			√
21	Desa Sumberarum		√	
22	Desa Gayam			√
23	Desa Katur			√
24	Desa Sudu		√	
25	Desa Simorejo		√	
26	Desa Temu			√
27	Desa Bogo		√	
28	Desa Duwel			√
29	Desa Megale		√	
30	Desa Klampok			√
31	Desa Ngampel			√
32	Desa Plesungan			√
33	Desa Sambiroto		√	
34	Desa Wedi		√	
35	Desa Krangkong		√	
36	Desa Ngambon			√
37	Desa Sengon			√
38	Desa Bareng		√	
39	Desa Jelu			√
40	Desa Simorejo		√	
41	Desa Sumberagung			√
42	Desa Tlogorejo		√	
43	Desa Ngasem		√	
44	Desa Rendeng			√
45	Desa Sukorejo		√	
46	Desa Sumberjo		√	
47	Desa Geneng		√	
48	Desa Kalangan			√
49	Desa Sumberarum		√	
50	Desa Tanggungan		√	
51	Desa Meduri		√	
52	Desa Ngelo			√

Sumber : Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.18  
Berita Tambahan (Kabupaten Bojonegoro)

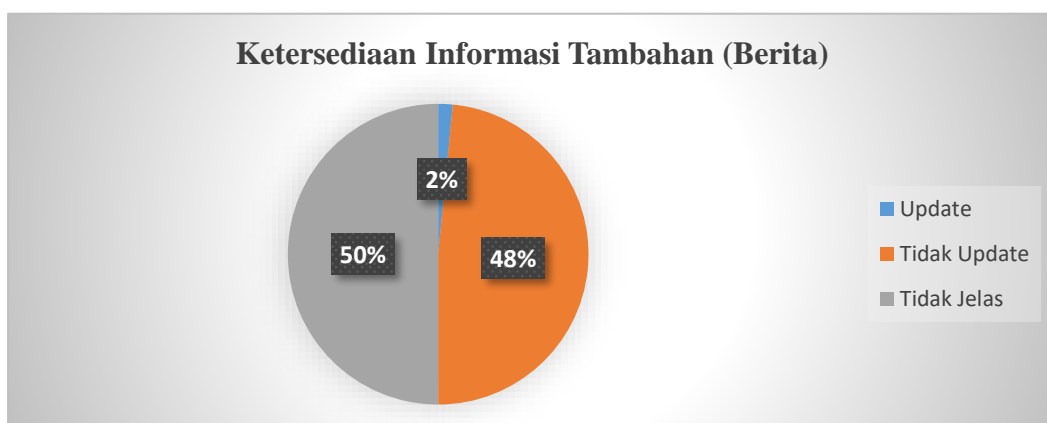
No	Nama Desa	Berita		
		Update	Tidak Update	Tidak Jelas
53	Desa Bondol			√
54	Desa Kalicilik		√	
55	Desa Klepek		√	
56	Desa Banjarrejo			√
57	Desa Sedah Kidul			√
58	Desa Bobol		√	
59	Desa Klino			√
60	Desa Bulu			√
61	Desa Glagahan		√	
62	Desa Tulungrejo			√
63	Desa Bakalan		√	
64	Desa Mulyorejo			√

Sumber : Data primer diolah sendiri

Didapatkan dari hasil analisa tabel 4.17, *update* informasi tambahan (berita) di 64 *website* pemerintah desa di bojonegoro, hanya 1 (1,562%) *website* pemerintah desa yang mengupdate informasi pada tanggal terakhir pada *website* mereka, sedangkan 31 (48,437%) *website* pemerintah desa tidak mengupdate informasi-informasi untuk dipublikasikan didalam *website*, dan 32 (50%) *website* pemerintah desa memberikan informasi tidak jelas dikarenakan informasi yang disampaikan di *website* tidak dicantumkan tanggal publikasi informasi tersebut. Lebih jelas dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 4.11

Ketersediaan Informasi Tambahan (Berita) Kabupaten Bojonegoro



### C. Kabupaten Malang

Hasil observasi pada *website* pemerintah desa dalam menganalisa update informasi tambahan (berita) melalui *press release* yaitu:

Tabel 4.19  
Berita Tambahan (Kabupaten Malang)

No	Nama Desa	Berita		
		Update	Tidak Update	Tidak Jelas
1	Desa Wandanpuro		√	
2	Desa Purwoharjo		√	
3	Desa Sidorenggo			√
4	Desa Wirotaman		√	
5	Desa Gajahrejo			√
6	Desa Girimulyo			√
7	Desa Segaran		√	
8	Desa Ampeldento		√	
9	Desa Putat Kidul			√
10	Desa Sepanjang		√	
11	Desa Sukopuro		√	
12	Desa Taji			√
13	Desa Jambuwer	√		
14	Desa Sumberkerto		√	
15	Desa Sekarpuro		√	
16	Desa Sumberpasir		√	
17	Desa Tirtomoyo			√
18	Desa Pagersari			√
19	Desa Sumberagung		√	
20	Desa Waturejo			√
21	Desa Argosuko			√
22	Desa Ngadas		√	
23	Desa Poncokusumo		√	
24	Desa Klepu		√	
25	Desa Sumberejo		√	
26	Desa Wonorejo		√	
27	Desa Wringinanom			√
28	Desa Sukomulyo		√	
29	Desa Baturetno		√	
30	Desa Randugading		√	
31	Desa Tangkilsari		√	
32	Desa Tumpukrenteng			√

Sumber : Data primer diolah sendiri

Lanjutan Tabel 4.19  
Berita Tambahan (Kabupaten Malang)

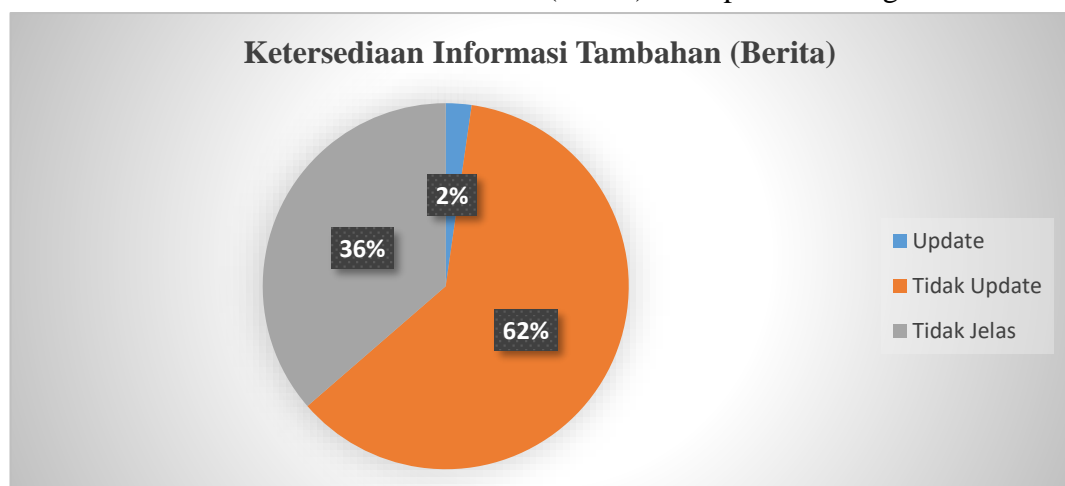
No	Nama Desa	Berita		
		Update	Tidak Update	Tidak Jelas
33	Desa Pujiharjo		√	
34	Desa Codo			√
35	Desa Sukoanyar		√	
36	Desa Sukolilo			√
37	Desa Slamet		√	
38	Desa Tulusbesar		√	
39	Desa Wringinsongo			√
40	Desa Wajak		√	
41	Desa Wonoayu		√	
42	Desa Tanggung			√
43	Desa Tawangrejeni			√
44	Desa Mentaraman		√	

Sumber : Data primer diolah sendiri

Didapatkan dari hasil analisa tabel 4.18, *update* informasi tambahan (berita) di 44 *website* pemerintah desa dimalang, hanya 1 (2,272%) *website* pemerintah desa yang mengupdate informasi pada tanggal terakhir pada *website* mereka, sedangkan 27 (61,363%) *website* pemerintah desa tidak mengupdate informasi-informasi untuk dipublikasikan didalam *website*, dan 16 (36,363%) *website* pemerintah desa memberikan informasi tidak jelas dikarenakan informasi yang disampaikan *diwebsite* tidak dicantumkan tanggal publikasi informasi tersebut. Lebih jelas dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 4.12

Ketersediaan Informasi Tambahan (Berita) Kabupaten Malang



### 4.3.3 Pembahasan

#### 4.3.3.1 Ketersediaan dan Penggunaan *Website*

Ketersediaan *website* desa dikabupaten lamongan dari total 462 desa dikabupaten lamongan di dapatkan sebanyak 31 (6,709%) *website* pemerintah desa tersebut dapat diakses dengan baik, dan ditemukan 431 (93,290%) pemerintah desa tidak memiliki *website*. Untuk kabupaten bojonegoro sendiri dari total desa sebanyak 393 desa didapatkan bahwa 64 (16,202%) *website* pemerintah desa tersebut dapat diakses dengan baik, dan ditemukan 329 (83,291%) pemerintah desa tidak memiliki *website*. Sedangkan dikabupaten malang dari total desa 378 didapatkan bahwa 44 (11,640%) *website* pemerintah desa tersebut dapat diakses dengan baik, dan ditemukan 334(88,359%) pemerintah desa tidak memiliki *website*.

#### 4.3.3.2 Ketersedian Laporan Keuangan

Dari analisis ketersediaan laporan keungan yang ada pada *website* desa, dari 139 desa yang mempunyai *website* tidak ada satupun dari 139 *website* tersebut yang mencantumkan laporan keuangannya.

#### 4.3.3.3 Ketersediaan Laporan Keuangan Tambahan

Dari analisis ketersediaan laporan keungan tambahan yang ada pada *website* desa, dari 139 desa yang mempunyai *website* tidak ada satupun dari 139 *website* tersebut yang mencantumkan laporan keuangan tambahan pada masing-masing *website*.

#### 4.3.3.4 Ketersediaan Informasi Tambahan (berita)

Ketersediaan informasi tambahan (berita) di 31 *website* pemerintah desa dilamongan, hanya 0 (0%) *website* pemerintah desa yang mengupdate informasi pada tanggal terakhir pada *website* mereka, sedangkan 31 (100%) *website* pemerintah desa tidak mengupdate informasi-informasi untuk dipublikasikan didalam *websit*, dan 0 (0%) *website* pemerintah desa memberikan informasi tidak jelas dikarenakan informasi yang disampaikan di *website* tidak dicantumkan tanggal publikasi informasi tersebut. Untuk informasi tambahan (berita) di 64 *website* pemerintah desa dibojonegoro, hanya 1 (1,562%) *website* pemerintah desa yang mengupdate informasi pada tanggal terakhir pada *website* mereka, sedangkan 31 (48,437%) *website* pemerintah desa tidak mengupdate informasi-informasi untuk dipublikasikan didalam *website*, dan 32 (50%) *website* pemerintah desa memberikan informasi tidak jelas dikarenakan informasi yang disampaikan *diwebsite* tidak dicantumkan tanggal publikasi informasi tersebut. Sedangkan informasi tambahan (berita) di 44 *website* pemerintah desa dimalang, hanya 1 (2,272%) *website* pemerintah desa yang mengupdate informasi pada tanggal terakhir pada *website* mereka, sedangkan 27 (61,363%) *website* pemerintah desa tidak mengupdate informasi-informasi untuk dipublikasikan didalam *website*, dan 16 (36,363%) *website* pemerintah desa memberikan informasi tidak jelas dikarenakan informasi yang disampaikan *diwebsite* tidak dicantumkan tanggal publikasi informasi tersebut.

Lembaga pemerintah desa yang memanfaatkan teknologi yang berupa beberapa teknologi sebagai berikut: 1. Kecepatan, 2. Aplikasi JAVA, 3. Eksternal

links, 4. Fitur Search, 5. Alamat dan contact person, 6. Frame, 7. Pull down, dan 8. Site map. Pada kabupaten lamongan, 1. 31 (100%) menampilkan dengan cepat, 2. Memakai aplikasi java 0 (0%), 3. memiliki eksternal links 20 (64,516%), 4. memiliki fitur search 10 (32,258%), 5. Mencantumkan Alamat dan contact person 1 (3,225%), 6. Memakai frame 31 (100%), 7. menggunakan Pull down 10 (32,258%), 8. menggunakan Site map 0 (0%). Pada kabupaten bojonegoro, 1. 64 (100%) menampilkan dengan cepat, 2. Memakai aplikasi java 0 (0%), 3. memiliki eksternal links 64 (100%), 4. memiliki fitur search 64 (100%), 5. Mencantumkan Alamat dan contact person 4 (6,250%), 6. Memakai frame 64 (100%), 7. menggunakan Pull down 64 (100%), 8. menggunakan Site map 0 (0%). Pada kabupaten malang, 1. 44 (100%) menampilkan dengan cepat, 2. Memakai aplikasi java 0 (0%), 3. memiliki eksternal links 44 (100%), 4. memiliki fitur search 0 (0%), 5. Mencantumkan Alamat dan contact person 0 (0%), 6. Memakai frame 44 (100%), 7. menggunakan Pull down 0 (0%), 8. menggunakan Site map 0 (0%).

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana transparansi pelaporan keuangan dan non keuangan dengan *internet financial reporting* berbasis *website* yang berada di desa di 3 kabupaten penerima dana ADD (Alokasi Dana Desa) di Jawa Timur. Dari penelitian ini sebagian besar lembaga pemerintah desa tidak memiliki *website* sehingga banyak lembaga pemerintah desa yang tidak memberikan informasi keuangan maupun informasi non keuangan. Dari 1.235 lembaga pemerintah di 3 kabupaten tersebut hanya didapatkan 139 lembaga pemerintah desa yang menggunakan *website* dan selanjutnya 139 desa tersebut oleh peneliti dijadikan obyek penelitian dengan rincian sebagai berikut: Kabupaten Lamongan 31 (6,709%), Kabupaten Bojonegoro 64 (16,202%), Kabupaten Malang 44 (11,640%).

Sebanyak 139 desa yang sudah menggunakan *website* namun tidak ada satu pun desa yang mengungkapkan laporan keuangannya maupun laporan keuangan tambahan di *website* yang dimiliki oleh masing-masing desa tersebut.

Keberadaan informasi tambahan (berita) pada 139 lembaga pemerintah desa yang memiliki *website* hanya ada 2 lembaga pemerintah desa yang mengupdate informasi dan terakhir di update pada bulan Juli.

Kelompok lembaga pemerintah desa, Lembaga pemerintah desa yang memanfaatkan teknologi yang berupa beberapa teknologi sebagai berikut: Pada

kabupaten lamongan, 1. 31 (100%) menampilkan dengan cepat, 2. Memakai aplikasi java 0 (0%), 3. memiliki eksternal links 20 (64,516%), 4. memiliki fitur search 10 (32,258%), 5. Mencantumkan Alamat dan contact person 1 (3,225%), 6. Memakai frame 31 (100%), 7. menggunakan Pull down 10 (32,258%), 8. menggunakan Site map 0 (0%). Pada kabupaten bojonegoro, 1. 64 (100%) menampilkan dengan cepat, 2. Memakai aplikasi java 0 (0%), 3. memiliki eksternal links 64 (100%), 4. memiliki fitur search 64 (100%), 5. Mencantumkan Alamat dan contact person 4 (6,250%), 6. Memakai frame 64 (100%), 7. menggunakan Pull down 64 (100%), 8. menggunakan Site map 0 (0%). Pada kabupaten malang, 1. 44 (100%) menampilkan dengan cepat, 2. Memakai aplikasi java 0 (0%), 3. memiliki eksternal links 44 (100%), 4. memiliki fitur search 0 (0%), 5. Mencantumkan Alamat dan contact person 0 (0%), 6. Memakai frame 44 (100%), 7. menggunakan Pull down 0 (0%), 8. menggunakan Site map 0 (0%).

## 5.2 Saran

Penulis merekomendasikan beberapa hal untuk lembaga pemerintah desa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Setiap lembaga pemerintah desa disarankan memiliki *website* agar dapat memberikan informasi keuangan maupun non keuangan.
2. Setiap lembaga pemerintah desa disarankan mempublikasikan informasi laporan keuangan pokok yang sudah diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.
3. Setiap lembaga pemerintah desa disarankan mengupdate informasi pada setiap *website* mereka.

4. Diharapkan pada saat mempublikasikan laporan keuangan memberikan keterangan bahwa laporan keuangan dibuat secara jujur sebagaimana sesuai dengan PERMENDAGRI 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.
5. Diharapkan pemerintah mengeluarkan aturan baku yang mengatur tentang keterbukaan informasi terutama tentang informasi keuangan pada lembaga pemerintah desa.
6. Diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan semua data di Jawa timur.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Alvarez, R. M. and Hall, T. E. (2006). *Controlling Democracy: The Principal Agent Problems in Election Administration*. Policy Studies Journal, 34 (4), 491-510.
- Andira, Prima. 2014. *Pelaporan Informasi Keuangan dan Non Keuangan dengan Internet Financial Report Berbasis Website pada Lembaga Keuangan Syariah*.
- Andriani, Sri. 2010. *Internet Sebagai Media Pelaporan Informasi Keuangan Pada Perusahaan LQ-45 di Bei*. El-Muhasaba.
- Asbaugh, H., K. Johnstone and T. Warfield, "Corporate Reporting on The Internet," *Accounting Horizons* 13, (1999), pp. 241-257.
- Babbie, Earl, 2002, *The practice of Social Research*, 10 th edition, Wadsworth, Thomson Learning
- Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Financial Comparisons, Routledge, London, 122-48.
- Emma Handayani, Luciana Spica Almilia, *Internet Financial Reporting: Studi Komparasi Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dan Bursa Efek Malaysia*.
- Fitriana, Meinar Rakhma. 2009. "Analisis Pengaruh Kompetisi dan Karakteristik perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Informasi Keuangan dalam website Perusahaan". Skripsi Tidak Dipublikasikan, Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Gang, T. (1988). *Governmental Accounting and Auditing in China: Evolution and Current Reforms*. Governmental Accounting and Auditing: International Economics. Volume 3, 305-360.
- <http://desawirausaha.blogspot.com/2016/01/jumlah-desa-dan-kelurahan-di-kabupaten-kota-provinsi-jawa-timur-tahun-2015-menurut-permendagri-no-56-tahun-2015.html>
- <http://www.depdagri.go.id>
- <http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.inonesia.capai.132.juta>

- Ikhlas Wau, Ratmono. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah.*
- Jeckly Darma, Eka Ardhani Sisdyani. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah Melalui Situs Resmi Pemerintah Provinsi.*
- Jensen, M. C. and Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial*
- Krina, L.L. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi.* [www.goodgovernance>bappenas.go.id](http://www.goodgovernance>bappenas.go.id). Diakses tanggal 26 Februari 2017.
- Kusumawardani, Arum. 2011. *Analisi Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui Internet (Internet Financial Reporting Dalam Website Perusahaan Skripsi.* Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Medina, Febri. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Indonesia.*
- Muhammad, Bagus H. P. 2012. *Analisis Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Dalam Perspektif E-Government Pada Website Pemerintah Kota/Kabupaten Di Indonesia.*
- O'brien A. James and George M. Marakas. (2011). *Management Information System 10<sup>th</sup> edition.* McGraw-Hill Irwin.
- Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelengga Pemerintahan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah NO. 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta.

Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282

Qur'an Surat An-Nisaa' Ayat 135

Qur'an Surat An-Nisaa' Ayat 29

Qur'an Surat Asy-Syura' Ayat 181-183

Soemarsono, S.R, 2004. *Akuntansi: Suatu Pengantar*. Edisi Kelima, Buku 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Styles, Alan K., Mack Tennyson. (2007). *The Accesibility of Financial Reporting U.S Municipalities on The Internet*. Journal Of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, 19 (1), 56-92.

Suci Indah Hanifa, Sugeng Praptoyo. 2015. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes)*.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suripto, Bambang. 2005, "Praktek Pelaporan Keuangan Dalam Website Perusahaan Indonesia", Jurnal akuntansi dan manajemen, volume XVII, nomor 1 april 2006

Taufiq Taufeni. 2013. *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia*.

Thompson, F. (1998). *Public Economics and Public Administration*. Handbook of Public Administration, 2nd ed. Marcel Dekker. New York, NY. 995-1063.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Wing Wahyu Winarno. 2006. *Sistem informasi akuntansi*. Edisi 2, penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Xiao, Z., Jones, M.J. & Lymer, A. 2002, *Immediate Trends in Internet Reporting*, *The European Accounting Review*, Vol.11, Iss.2, pp. 245 – 275.

Yoga, Rezka. 2016. *Pengguna Internet di Indonesia capai 132 juta*





## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1

## BUKTI KONSULTASI

Nama : 'Izzuddin Arridlo

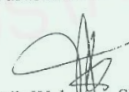
NIM/Jurusan : 13520059/Akuntansi

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Judul Skripsi : Transparansi Pelaporan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Dengan *Internet Financial Reporting* Berbasis *Website* Pada Lembaga Pemerintah Desa Di Jawa Timur.

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	3 Desember 2016	Pengajuan <i>Outline</i>	1. 
2.	6 Februari 2017	Acc Judul	2. 
3.	14 Maret 2017	Proposal	3. 
4.	1 Mei 2017	Revisi & Acc Proposal	4. 
5.	4 Mei 2017	Seminar Proposal	5. 
6.	8 Mei 2017	Bimbingan	6. 
7.	10 Mei 2017	Acc Proposal	7. 
8.	24 Agustus 2017	Skripsi BAB IV-V	8. 
9.	8 November 2017	Revisi dan Acc Skripsi	9. 
10.	28 November 2017	Acc Keseluruhan	10. 

Malang, 12 Desember 2017  
Mengetahui:  
Ketua Jurusan Akuntansi

  
Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19720322 200801 2 005

## Lampiran 2

### BIODATA PENELITI

- Nama : 'Izzuddin Arridlo
- Tempat, Tgl Lahir : Trenggalek, 06 April 1995
- Alamat : Nglongsor, Tugu, Trenggalek
- Surel : ariridlo@gmail.com
- No. HP : 0878-6213-5402
- Pengalaman Organisasi :
- Humas Cabang PTM UKM UNIOR Tahun 2014-2015
  - Kepelatihan Cabang PTM UKM UNIOR Tahun 2015-2016
  - Anggota Departemen Litbang HMJ Akuntansi Tahun 2014-2015
  - Anggota Bidang Kemahasiswaan dan Akademik SEMA FE Tahun 2015-2016
  - Anggota Departemen Luar Negeri DEMA FE 2016-2017
  - Anggota Koordinator Pembentukan IAI Anggota Muda Komisariat Malang Raya Tahun 2015
  - Kepala Departemen Human Resource IAI Anggota Muda Komisariat Malang Raya Tahun 2015-2016
  - Anggota LSO Olahraga PMII Rayon Ekonomi Moch Hatta Tahun 2014-2015
  - Sekertaris LSO Olahraga PMII Rayon Ekonomi Moch Hatta Tahun 2015-2016

### Lampiran 3

#### Alamat Website Desa

No	Kabupaten Bojonegoro	28	<a href="http://meduri.bojonegoro.info/">http://meduri.bojonegoro.info/</a>
1	<a href="http://temu.bojonegoro.info/">http://temu.bojonegoro.info/</a>	29	<a href="http://campurejo.bojonegoro.info/">http://campurejo.bojonegoro.info/</a>
2	<a href="http://kemamang.bojonegoro.info/">http://kemamang.bojonegoro.info/</a>	30	<a href="http://ngasem-bjn.desa.id/">http://ngasem-bjn.desa.id/</a>
3	<a href="http://sambiroto.bojonegoro.info/">http://sambiroto.bojonegoro.info/</a>	31	<a href="http://www.tlogorejo.desa.id/">http://www.tlogorejo.desa.id/</a>
4	<a href="http://simorejo.bojonegoro.info/">http://simorejo.bojonegoro.info/</a>	32	<a href="http://www.tulungrejo.desa.id">www.tulungrejo.desa.id</a>
5	<a href="http://gayam.bojonegoro.info/">http://gayam.bojonegoro.info/</a>	33	<a href="http://duwel.desa.id/">http://duwel.desa.id/</a>
6	<a href="http://bogo.bojonegoro.info/">http://bogo.bojonegoro.info/</a>	34	<a href="http://ngampel.desa.id/">http://ngampel.desa.id/</a>
7	<a href="http://bulu.bojonegoro.info/">http://bulu.bojonegoro.info/</a>	35	<a href="http://sumberagung-ngaho.desa.id/">http://sumberagung-ngaho.desa.id/</a>
8	<a href="http://wedi.bojonegoro.info/">http://wedi.bojonegoro.info/</a>	36	<a href="http://bulu.desa.id/">http://bulu.desa.id/</a>
9	<a href="http://bakalan.bojonegoro.info/">http://bakalan.bojonegoro.info/</a>	37	<a href="http://sumberarum.desa.id/">http://sumberarum.desa.id/</a>
10	<a href="http://plesungan.bojonegoro.info/">http://plesungan.bojonegoro.info/</a>	38	<a href="http://balenrejo.desa.id/">http://balenrejo.desa.id/</a>
11	<a href="http://klepek.bojonegoro.info/">http://klepek.bojonegoro.info/</a>	39	<a href="http://bareng.desa.id/">http://bareng.desa.id/</a>
12	<a href="http://sudu.bojonegoro.info/">http://sudu.bojonegoro.info/</a>	40	<a href="http://gayam.desa.id/">http://gayam.desa.id/</a>
13	<a href="http://kalicilik.bojonegoro.info/">http://kalicilik.bojonegoro.info/</a>	41	<a href="http://mayangrejo.desa.id/">http://mayangrejo.desa.id/</a>
14	<a href="http://pasinan.bojonegoro.info/">http://pasinan.bojonegoro.info/</a>	42	<a href="http://ngraseh.desa.id/">http://ngraseh.desa.id/</a>
15	<a href="http://megale.bojonegoro.info/">http://megale.bojonegoro.info/</a>	43	<a href="http://klampok.desa.id/">http://klampok.desa.id/</a>
16	<a href="http://krangkong.bojonegoro.info/">http://krangkong.bojonegoro.info/</a>	44	<a href="http://rendeng.desa.id/">http://rendeng.desa.id/</a>
17	<a href="http://bobol.bojonegoro.info/">http://bobol.bojonegoro.info/</a>	45	<a href="http://mayanggeneng.desa.id/">http://mayanggeneng.desa.id/</a>
18	<a href="http://mojoranu.bojonegoro.info/">http://mojoranu.bojonegoro.info/</a>	46	<a href="http://klino.desa.id/">http://klino.desa.id/</a>
19	<a href="http://sarirejo.bojonegoro.info/">http://sarirejo.bojonegoro.info/</a>	47	<a href="http://margomulyo.desa.id/">http://margomulyo.desa.id/</a>
20	<a href="http://sembunglor.bojonegoro.info/">http://sembunglor.bojonegoro.info/</a>	48	<a href="http://ngelo.desa.id/">http://ngelo.desa.id/</a>
21	<a href="http://sidobandung.bojonegoro.info/">http://sidobandung.bojonegoro.info/</a>	49	<a href="http://bondol.desa.id/">http://bondol.desa.id/</a>
22	<a href="http://sumberjo.bojonegoro.info/">http://sumberjo.bojonegoro.info/</a>	50	<a href="http://sengon.desa.id/">http://sengon.desa.id/</a>
23	<a href="http://tanggungan.bojonegoro.info/">http://tanggungan.bojonegoro.info/</a>	51	<a href="http://katur.desa.id/">http://katur.desa.id/</a>
24	<a href="http://blongsong.bojonegoro.info/">http://blongsong.bojonegoro.info/</a>	52	<a href="http://kalangan.desa.id/">http://kalangan.desa.id/</a>
25	<a href="http://geneng.bojonegoro.info/">http://geneng.bojonegoro.info/</a>	53	<a href="http://sukorejo.desa.id/">http://sukorejo.desa.id/</a>
26	<a href="http://glagahan.bojonegoro.info/">http://glagahan.bojonegoro.info/</a>	54	<a href="http://dander.desa.id/">http://dander.desa.id/</a>
27	<a href="http://ngunut.bojonegoro.info/">http://ngunut.bojonegoro.info/</a>	55	<a href="http://mulyorejo.desa.id/">http://mulyorejo.desa.id/</a>

### Lampiran 3 (Lanjutan)

#### Alamat Website Desa

56	<a href="http://banjarjo.desa.id/">http://banjarjo.desa.id/</a>	19	<a href="http://malangsukolilo.desa.kemendesa.go.id/">http://malangsukolilo.desa.kemendesa.go.id/</a>
57	<a href="http://kandangan.desa.id/">http://kandangan.desa.id/</a>	20	<a href="http://malangpujiharjo.desa.kemendesa.go.id/">http://malangpujiharjo.desa.kemendesa.go.id/</a>
58	<a href="http://ngambon.desa.id/">http://ngambon.desa.id/</a>	21	<a href="http://malangputatkidul.desa.kemendesa.go.id/">http://malangputatkidul.desa.kemendesa.go.id/</a>
59	<a href="http://kenep-balen.desa.id/">http://kenep-balen.desa.id/</a>	22	<a href="http://malangsepanjang.desa.kemendesa.go.id/">http://malangsepanjang.desa.kemendesa.go.id/</a>
60	<a href="http://www.penganten.desa.id/">http://www.penganten.desa.id/</a>	23	<a href="http://malangrandugading.desa.kemendesa.go.id/">http://malangrandugading.desa.kemendesa.go.id/</a>
61	<a href="http://sukoharjo-kalitidu.desa.id/">http://sukoharjo-kalitidu.desa.id/</a>	24	<a href="http://malangtangkilisari.desa.kemendesa.go.id/">http://malangtangkilisari.desa.kemendesa.go.id/</a>
62	<a href="http://pungpungan.desa.id/">http://pungpungan.desa.id/</a>	25	<a href="http://malangslamet.desa.kemendesa.go.id/">http://malangslamet.desa.kemendesa.go.id/</a>
63	<a href="http://jelu.desa.id/">http://jelu.desa.id/</a>	26	<a href="http://malangtulusbesar.desa.kemendesa.go.id/">http://malangtulusbesar.desa.kemendesa.go.id/</a>
64	<a href="http://sedahkidul.desa.id/">http://sedahkidul.desa.id/</a>	27	<a href="http://malangwringinsongo.desa.kemendesa.go.id/">http://malangwringinsongo.desa.kemendesa.go.id/</a>
Kabupaten Malang		28	<a href="http://malangsukomulyo.desa.kemendesa.go.id/">http://malangsukomulyo.desa.kemendesa.go.id/</a>
1	<a href="http://malangargosuko.desa.kemendesa.go.id/">http://malangargosuko.desa.kemendesa.go.id/</a>	29	<a href="http://malangsukopuro.desa.kemendesa.go.id/">http://malangsukopuro.desa.kemendesa.go.id/</a>
2	<a href="http://malangbaturetno.desa.kemendesa.go.id/">http://malangbaturetno.desa.kemendesa.go.id/</a>	30	<a href="http://malangsumberpasir.desa.kemendesa.go.id/">http://malangsumberpasir.desa.kemendesa.go.id/</a>
3	<a href="http://malangpurwoharjo.desa.kemendesa.go.id/">http://malangpurwoharjo.desa.kemendesa.go.id/</a>	31	<a href="http://malangtanggung.desa.kemendesa.go.id/">http://malangtanggung.desa.kemendesa.go.id/</a>
4	<a href="http://malangwirotaman.desa.kemendesa.go.id/">http://malangwirotaman.desa.kemendesa.go.id/</a>	32	<a href="http://malangtawangrejeni.desa.kemendesa.go.id/">http://malangtawangrejeni.desa.kemendesa.go.id/</a>
5	<a href="http://malangsidorenggo.desa.kemendesa.go.id/">http://malangsidorenggo.desa.kemendesa.go.id/</a>	33	<a href="http://malangtumpukrenteng.desa.kemendesa.go.id/">http://malangtumpukrenteng.desa.kemendesa.go.id/</a>
6	<a href="http://malangmentaraman.desa.kemendesa.go.id/">http://malangmentaraman.desa.kemendesa.go.id/</a>	34	<a href="http://malangwandanpuro.desa.kemendesa.go.id/">http://malangwandanpuro.desa.kemendesa.go.id/</a>
7	<a href="http://malanggajahrejo.desa.kemendesa.go.id/">http://malanggajahrejo.desa.kemendesa.go.id/</a>	35	<a href="http://malangwringinanom.desa.kemendesa.go.id/">http://malangwringinanom.desa.kemendesa.go.id/</a>
8	<a href="http://malanggirimulyo.desa.kemendesa.go.id/">http://malanggirimulyo.desa.kemendesa.go.id/</a>	36	<a href="http://malangwonoayu.desa.kemendesa.go.id/">http://malangwonoayu.desa.kemendesa.go.id/</a>
9	<a href="http://malangtaji.desa.kemendesa.go.id/">http://malangtaji.desa.kemendesa.go.id/</a>	37	<a href="http://malangklepu.desa.kemendesa.go.id/">http://malangklepu.desa.kemendesa.go.id/</a>
10	<a href="http://malangjambuwer.desa.kemendesa.go.id/">http://malangjambuwer.desa.kemendesa.go.id/</a>	38	<a href="http://malangngadas.desa.kemendesa.go.id/">http://malangngadas.desa.kemendesa.go.id/</a>
11	<a href="http://malangpagersari.desa.kemendesa.go.id/">http://malangpagersari.desa.kemendesa.go.id/</a>	39	<a href="http://malangponcokusumo.desa.kemendesa.go.id/">http://malangponcokusumo.desa.kemendesa.go.id/</a>
12	<a href="http://malangsumberagung.desa.kemendesa.go.id/">http://malangsumberagung.desa.kemendesa.go.id/</a>	40	<a href="http://malangsumberejo.desa.kemendesa.go.id/">http://malangsumberejo.desa.kemendesa.go.id/</a>
13	<a href="http://malangwaturejo.desa.kemendesa.go.id/">http://malangwaturejo.desa.kemendesa.go.id/</a>	41	<a href="http://malangwonorejo.desa.kemendesa.go.id/">http://malangwonorejo.desa.kemendesa.go.id/</a>
14	<a href="http://malangsumberkerto.desa.kemendesa.go.id/">http://malangsumberkerto.desa.kemendesa.go.id/</a>	42	<a href="http://malangsegaran.desa.kemendesa.go.id/">http://malangsegaran.desa.kemendesa.go.id/</a>
15	<a href="http://malangtirtomoyo.desa.kemendesa.go.id/">http://malangtirtomoyo.desa.kemendesa.go.id/</a>	43	<a href="http://malangsekarpuo.desa.kemendesa.go.id/">http://malangsekarpuo.desa.kemendesa.go.id/</a>
16	<a href="http://malangampeldento.desa.kemendesa.go.id/">http://malangampeldento.desa.kemendesa.go.id/</a>	44	<a href="http://malangwajak.desa.kemendesa.go.id/">http://malangwajak.desa.kemendesa.go.id/</a>
17	<a href="http://malangcodo.desa.kemendesa.go.id/">http://malangcodo.desa.kemendesa.go.id/</a>	Kabupaten Lamongan	
18	<a href="http://malangsukoanyar.desa.kemendesa.go.id/">http://malangsukoanyar.desa.kemendesa.go.id/</a>	1	<a href="http://lamonganwarukulon.desa.kemendesa.go.id/">http://lamonganwarukulon.desa.kemendesa.go.id/</a>

### Lampiran 3 (Lanjutan)

#### Alamat Website Desa

2	<a href="https://bulumargi.blogspot.com/">https://bulumargi.blogspot.com/</a>	30	<a href="http://desa-sukolilo.16mb.com/">http://desa-sukolilo.16mb.com/</a>
3	<a href="http://desasoko.hol.es/">http://desasoko.hol.es/</a>	31	<a href="http://ngujungrejo.blogspot.co.id/">http://ngujungrejo.blogspot.co.id/</a>
4	<a href="http://munglikalitengah.blogspot.co.id/">http://munglikalitengah.blogspot.co.id/</a>		
5	<a href="http://pucangrodesa.blogspot.co.id/">http://pucangrodesa.blogspot.co.id/</a>		
6	<a href="http://pemdekalanganyar.blogspot.co.id/">http://pemdekalanganyar.blogspot.co.id/</a>		
7	<a href="http://kali-german.blogspot.co.id/">http://kali-german.blogspot.co.id/</a>		
8	<a href="http://desalatukan.blogspot.co.id/">http://desalatukan.blogspot.co.id/</a>		
9	<a href="http://desakandangrejo08.blogspot.co.id/">http://desakandangrejo08.blogspot.co.id/</a>		
10	<a href="http://ngayung2016.blogspot.co.id/">http://ngayung2016.blogspot.co.id/</a>		
11	<a href="http://duriwetan.blogspot.co.id/">http://duriwetan.blogspot.co.id/</a>		
12	<a href="http://pemdejabung.blogspot.co.id/">http://pemdejabung.blogspot.co.id/</a>		
13	<a href="http://desasumberbendo.blogspot.co.id/">http://desasumberbendo.blogspot.co.id/</a>		
14	<a href="http://desatunggunjagir.blogspot.co.id/">http://desatunggunjagir.blogspot.co.id/</a>		
15	<a href="http://desaberu.blogspot.co.id/">http://desaberu.blogspot.co.id/</a>		
16	<a href="http://payamansolokurolamongan.blogspot.co.id/">http://payamansolokurolamongan.blogspot.co.id/</a>		
17	<a href="http://sendangagung.blogspot.co.id/">http://sendangagung.blogspot.co.id/</a>		
18	<a href="http://warulorpaciran.blogspot.co.id/">http://warulorpaciran.blogspot.co.id/</a>		
19	<a href="http://weru-paciran.blogspot.co.id/">http://weru-paciran.blogspot.co.id/</a>		
20	<a href="http://kreteranggonlamongan.blogspot.co.id/">http://kreteranggonlamongan.blogspot.co.id/</a>		
21	<a href="https://selorejolamongan.wordpress.com/">https://selorejolamongan.wordpress.com/</a>		
22	<a href="http://tenggiringsambeng.blogspot.co.id/">http://tenggiringsambeng.blogspot.co.id/</a>		
23	<a href="http://bedingin-1-1-1.blogspot.co.id/">http://bedingin-1-1-1.blogspot.co.id/</a>		
24	<a href="http://desa-jugo.blogspot.co.id/">http://desa-jugo.blogspot.co.id/</a>		
25	<a href="http://kembangan01.blogspot.co.id/">http://kembangan01.blogspot.co.id/</a>		
26	<a href="http://desamanyar.blogspot.co.id/">http://desamanyar.blogspot.co.id/</a>		
27	<a href="http://deketagungugio.blogspot.co.id/">http://deketagungugio.blogspot.co.id/</a>		
28	<a href="http://desa-madulegi.16mb.com/about.php">http://desa-madulegi.16mb.com/about.php</a>		
29	<a href="https://sukodadikabuh.wordpress.com/">https://sukodadikabuh.wordpress.com/</a>		

